

Laporan Utama

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Laporan Utama

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

LEMBAR PERYATAAN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

IKPLHD merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

IKPLHD Kabupaten Pemalang Tahun 2017 menitikberatkan pada upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam merespon kondisi lingkungan hidup yang menjadi isu prioritas di wilayah Kabupaten Pemalang. Bersama ini saya sebagai Bupati Pemalang menyatakan bahwa penyusunan IKPLHD Kabupaten Pemalang Tahun 2017 ini telah dirumuskan dan disusun dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pemalang, 19 Desember 2017



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT karena atas izin dan kemurahannya, sehingga Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Pemalang Tahun 2017 dapat terselesaikan dengan baik.

IKPLHD merupakan laporan tentang gambaran kinerja daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah daerah memiliki peran yang besar dalam mengelola lingkungan hidup dan mengupayakan inovasi-inovasi berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup erat kaitannya dengan berbagai aspek lingkungan hidup yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam terwujudnya laporan ini. Dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Pemalang, 19 Desember 2017



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR PETA	x
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Profil Kabupaten Pemalang	I-2
1.2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	I-2
1.2.1.1. Luas dan Batas Wilayah	I-2
1.2.1.2. Topografi	I-4
1.2.1.3. Jenis Tanah	I-6
1.2.1.4. Geologi	I-6
1.2.1.5. Hidrologi.....	I-7
1.2.2. Potensi Unggulan Daerah	I-8
1.2.2.1. Potensi Pertanian	I-8
1.2.2.2. Potensi Peternakan.....	I-13
1.2.2.3. Potensi Perikanan.....	I-13
1.2.2.4. Potensi Industri	I-13
1.2.2.5. Potensi Pertambangan.....	I-14
1.2.2.6. Potensi Pariwisata.....	I-15
1.3. Gambaran Proses Penyusunan dan Perumusan Isu Prioritas.....	I-16
1.3.1. Proses Penyusunan Dokumen IKPLHD	I-16
1.3.1.1. Tahap Persiapan.....	I-16
1.3.1.2. Tahap Penyusunan	I-19
1.3.2. Proses, Pendekatan atau Metode Perumusan Isu Prioritas	I-23
1.4. Maksud dan Tujuan	I-24
1.5. Ruang Lingkup Penulisan.....	I-26

BAB II ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	II-1
2.1. Proses Perumusan Isu Prioritas.....	II-1
2.2. Proses Analisis Yang Digunakan Untuk Memperoleh Isu Prioritas.....	II-2
2.3. Rumusan Isu Prioritas Yang Dihasilkan.....	II-7
BAB III ANALISIS <i>PRESSURE, STATE</i> DAN <i>RESPONSE</i>	III-1
3.1. TATAGUNA LAHAN	III-1
3.1.1. Kawasan Lindung	III-1
3.1.2. Penggunaan Lahan Utama di Kabupaten Pemalang	III-5
3.1.3. Hutan.....	III-7
3.1.4. Lahan Kritis	III-9
3.1.5. Kerusakan Tanah	III-10
3.1.6. Laut, Pesisir dan Pantai.....	III-11
3.1.7. Perubahan Penggunaan Lahan	III-13
3.1.8. Reboisasi dan Penghijauan	III-14
3.1.9. Analisis <i>State, Pressure</i> , dan <i>Response</i> Tata Guna Lahan di Kabupaten Pemalang	III-15
3.1.9.1. Analisis <i>State</i>	III-15
3.1.9.2. Analisis <i>Pressure</i>	III-15
3.1.9.3. Analisis <i>Response</i>	III-15
3.2. KUALITAS AIR	III-17
3.2.1. Sungai	III-17
3.2.2. Danau/Waduk/Situ/Embung	III-17
3.2.3. Kualitas Air Sungai.....	III-18
3.2.4. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung	III-22
3.2.5. Kualitas Air Sumur	III-23
3.2.6. Kualitas Air Laut	III-23
3.2.7. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan.....	III-24
3.2.8. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum	III-25
3.2.9. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	III-27
3.2.10. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan	III-29
3.2.11. Jumlah Rumah Tangga Miskin	III-30
3.2.12. Limbah Padat dan Cair	III-31

3.2.13. Analisis <i>State</i> , <i>Pressure</i> , dan <i>Response</i> Kualitas Air di Kabupaten Pemalang	III-32
3.2.13.1. Analisis <i>State</i>	III-32
3.2.13.2. Analisis <i>Pressure</i>	III-32
3.2.13.3. Analisis <i>Response</i>	III-33
3.3. KUALITAS UDARA	III-34
3.3.1. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan	III-34
3.3.2. Kualitas Air Hujan	III-36
3.3.3. Kualitas Udara Ambien	III-36
3.3.4. Penggunaan Bahan Bakar	III-40
3.3.5. Jumlah Kendaraan Bermotor	III-41
3.3.6. Perubahan Penambahan Ruas Jalan	III-42
3.3.7. Analisis <i>State</i> , <i>Pressure</i> , dan <i>Response</i> Kualitas Udara di Kabupaten Pemalang	III-43
3.3.7.1. Analisis <i>State</i>	III-43
3.3.7.2. Analisis <i>Pressure</i>	III-43
3.3.7.3. Analisis <i>Response</i>	III-44
3.4. Resiko Bencana	III-44
3.4.1. Analisis <i>State</i>	III-44
3.4.2. Analisis <i>Pressure</i>	III-47
3.4.3. Analisis <i>Response</i>	III-51
3.5. Perkotaan	III-52
3.5.1. Analisis <i>State</i>	III-53
3.5.2. Analisis <i>Pressure</i>	III-55
3.5.3. Analisis <i>Response</i>	III-56

**BAB IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP..... IV-1**

BAB V PENUTUP..... V-1	V-1
5.1. Kesimpulan	V-1
5.2. Rencana Tindak Lanjut	V-5
5.3. Penutup	V-5

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN DATA

DAFTAR TABEL

TABEL III. 1	KUALITAS AIR SUNGAI TAHUN 2016.....	III-20
TABEL III. 2	KUALITAS AIR SUMUR TAHUN 2016.....	III-23
TABEL III. 3	INVENTARISASI MATA AIR.....	III-26
TABEL III. 4	KONDISI FISIK MATA AIR.....	III-26
TABEL III. 5	PENGUNAAN BAHAN BAKAR TAHUN 2016.....	III-40
TABEL III. 6	JUMLAH DAN KAPASITAS ALAT ANGKUT PERSAMPAHAN TAHUN 2017	III-56
TABEL III. 7	RUTE PENGANGKUTAN PERSAMPAHAN TAHUN 2017	III-56
TABEL III. 8	PENGOLAHAN SAMPAH DI SUMBER SAMPAH TAHUN 2016.....	III-59
TABEL III. 9	TPA DAN TPST TAHUN 2016	III-61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW Dan Tutupan Lahannya Tahun 2017	III-4
Gambar 3. 2	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama Tahun 2017	III-6
Gambar 3. 3	Prosentase Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status Tahun 2017	III-8
Gambar 3. 4	Grafik Kecenderungan Luasan Kawasan Hutan Tahun 2016.....	III-8
Gambar 3. 5	Grafik Kecenderungan Luas Lahan Kritis Tahun 2016	III-9
Gambar 3. 6	Luas Tutupan Mangrove Tahun 2017	III-12
Gambar 3. 7	Realisasi Kegiatan Penghijauan Dan Reboisasi Tahun 2017	III-14
Gambar 3. 8	Panjang Sungai di Kabupaten Pemalang.....	III-17
Gambar 3. 9	Diagram Perbandingan Konsentrasi <i>Fecal Coliform</i> di Sungai Waluh	III-21
Gambar 3. 10	Diagram Konsentrasi <i>Fecal Coliform</i> di Sungai Waluh.....	III-22
Gambar 3. 11	Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2017	III-25
Gambar 3. 12	Jumlah Rumah Tangga Dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2017.....	III-28
Gambar 3. 13	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah / Kabupaten Pemalang Tahun 2017.....	III-29
Gambar 3. 14	Jumlah Rumah Tangga Miskin di Provinsi Jawa Tengah/ Kabupaten Pemalang Tahun 2017.....	III-30
Gambar 3. 15	Volume Limbah Padat.....	III-31
Gambar 3. 16	Volume Limbah Padat.....	III-31
Gambar 3. 17	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2017.....	III-35
Gambar 3. 18	Kualitas Udara Ambien SO ₂	III-37
Gambar 3. 19	Kualitas Udara Ambien CO.....	III-38
Gambar 3. 20	Kualitas Udara Ambien NO ₂	III-38
Gambar 3. 21	Kualitas Udara Ambien <i>Dustfall</i>	III-39
Gambar 3. 22	Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2017	III-40

Gambar 3. 23	Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2017	III-42
Gambar 3. 24	Perubahan Penamabahan Ruas Jalan Raya Tahun 2017	III-43
Gambar 3. 25	Intensitas Kejadian Bencana di Kabupaten Pemalang Tahun 2017	III-46
Gambar 3. 26	Luas Wilayah Daerah Bencana Kekeringan di Kabupaten Pemalang Tahun 2017	III-47
Gambar 3. 27	Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Pemalang Tahun 2017	III-54
Gambar 4.1	Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	IV-5
Gambar 4.2	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Dalam Mendukung Perbaikan Kualitas Lingkungan Kabupaten Pemalang	IV-7
Gambar 4.3	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	IV-11
Gambar 4.4	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	IV-13
Gambar 4.5	Perkembangan PDRB ADHB Dan ADHK Kabupaten Pemalang	IV-14

DAFTAR PETA

Peta 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Pemalang.....	I-3
Peta 1.2	Peta Kelerengan Kabupaten Pemalang.....	I-5
Peta 1.3	Peta Jenis Tanah Kabupaten Pemalang.	I-9
Peta 1.4	Peta Struktur Geologi Kabupaten Pemalang.	I-10
Peta 1.5	Peta Sumber Air Kabupaten Pemalang	I-11
Peta 1.6	Peta Cadangan Air Tanah Kabupaten Pemalang.....	I-12
Peta 3.1	Peta Bencana Alam dan Permasalahan Lingkungan Kabupaten Pemalang	III-50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal ini juga termaktub dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Pemalang Tahun 2017 menitikberatkan pada upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam merespon kondisi lingkungan hidup yang menjadi isu prioritas di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) merupakan salah satu instrumen penting karena menyajikan perubahan penduduk dengan kualitas dan aktivitasnya, dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan karena kegiatan sosial ekonomi yang berasal dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan penduduk.

Pemerintah daerah memiliki peran yang besar dalam mengelola lingkungan hidup dan mengupayakan inovasi-inovasi berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good*

governance) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup erat kaitannya dengan berbagai aspek lingkungan hidup yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya.

1.2. Profil Kabupaten Pemalang

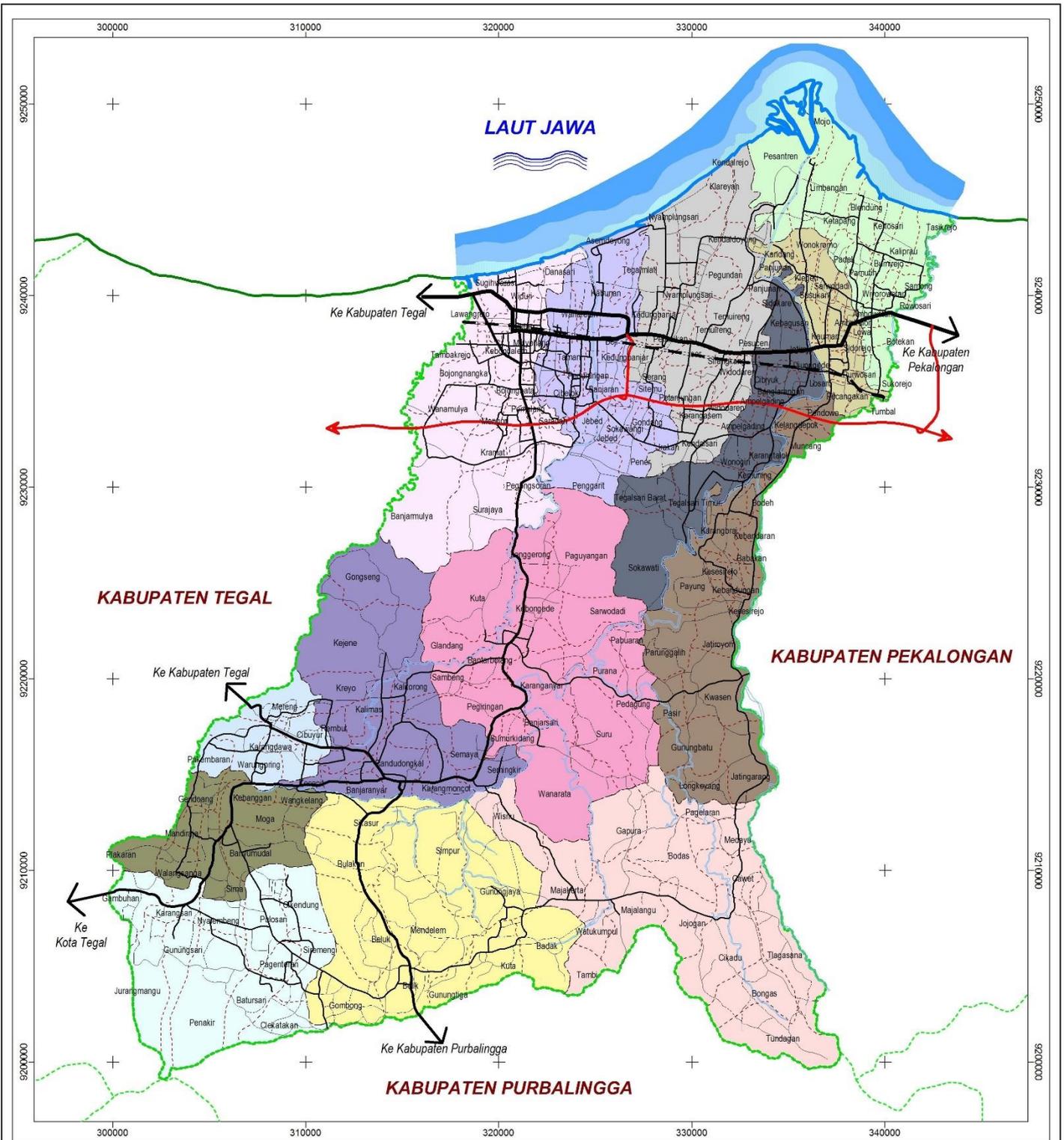
1.2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1.2.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Pemalang terletak pada koordinat $109^{\circ} 17' 30''$ - $109^{\circ} 40' 30''$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 52' 30''$ - $7^{\circ} 20' 11''$ Lintang Selatan. Dari Semarang (Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah), Pusat pemerintah Kabupaten Pemalang berjarak kira-kira 135 Km ke arah barat, atau jika ditempuh dengan kendaraan darat memakan waktu lebih kurang 3-3,5 jam. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pemalang meliputi:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga
- Sebelah Barat : Kabupaten Tegal
- Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pemalang dapat dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Secara keseluruhan Kabupaten Pemalang memiliki luas 1.115,30 km² yang terdiri dari lahan sawah seluas 383,51 km² dan lahan bukan sawah seluas 731,79 km². Kabupaten Pemalang mencakup 14 kecamatan, 211 desa, dan 11 kelurahan. Secara spasial kondisi geografis dan administrasi Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada **Peta Administrasi Kabupaten Pemalang**.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jln. Jend. Gatot Subroto No. 28 Pemalang

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD)
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2017

PETA
ADMINISTRASI KABUPATEN PEMALANG

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - - Batas Desa

JALAN

- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Lokal Primer
- Lingkungan
- Rel K A
- Rencana Jalan Tol

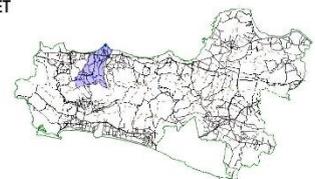
PERAIRAN

- Garis Pantai
- Sungai

KECAMATAN

- Watukumpul
- Warungpring
- Ulujami
- Taman
- Pulosari
- Randudongkal
- Petarukan
- Pemalang
- Moga
- Comal
- Bodeh
- Ampelgading
- Belik
- Bantarbolang

INSET



SUMBER

- PETA DASAR**
- PETA RUPABUMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001
- CITRAUDARA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006
- PETA TEMATIK**
- OLAHAN CITRAUDARA KABUPATEN PEMALANG
- PETA ADMINISTRASI RTRW KABUPATEN PEMALANG

	NO. PETA	HALAMAN
	1.1	1-3
SKALA 1 : 200.000 		

1.2.1.2. Topografi

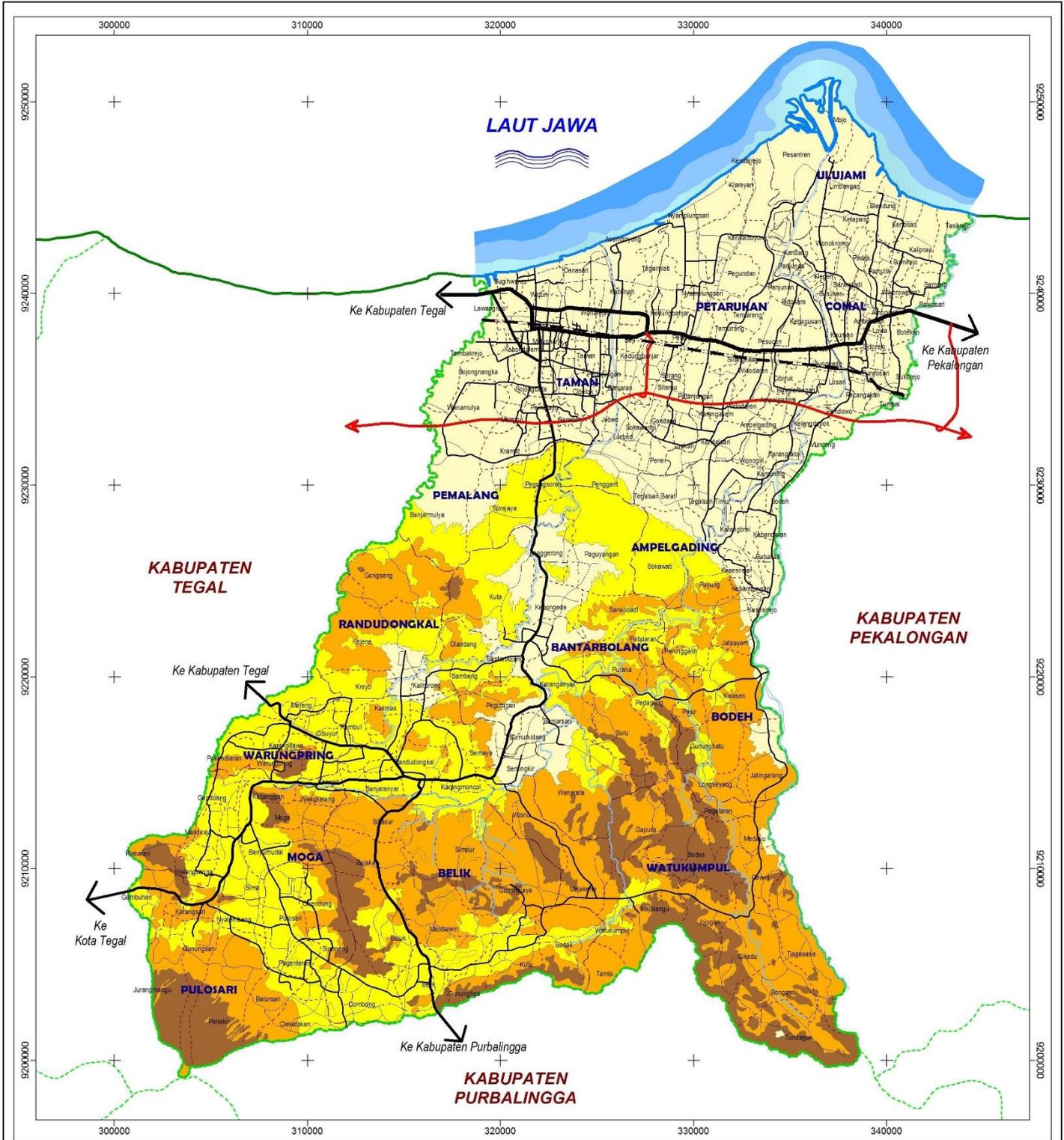
Kabupaten Pemalang mempunyai bentuk topografi yang bervariasi antara lain :

- a) Daerah dataran pantai dengan ketinggian 1-5 meter diatas permukaan air laut (mdpl), terletak di bagian utara yang meliputi 17 desa dan 1 kelurahan.
- b) Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6-15 meter diatas permukaan air laut, terletak di bagian utara yang meliputi 94 desa dan 4 kelurahan, dataran tinggi dengan ketinggian antara 16-212 mdpl terletak di bagian tengah dan selatan meliputi 17 desa.
- c) Daerah dataran pegunungan yang terbagi menjadi 2 yaitu daerah dengan ketinggian 213-924 mdpl yang meliputi 55 desa dan 10 desa lainnya memiliki ketinggian di atas 925, terletak di wilayah bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan secara morfologi, kenampakan bentang alam wilayah Kabupaten Pemalang merupakan areal pedataran, perbukitan, dan pegunungan yang memiliki kemiringan lereng beragam mulai 0% sampai >40%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Daerah dataran berada pada wilayah bagian utara yang meliputi Kecamatan Petarukan, Ampelgading, Comal dan Ulujami serta sebagian wilayah Kecamatan Pemalang, Taman, Randudongkal dan Bodeh dengan presentase kemiringan lereng antara 0-2%.
- Daerah dengan kemiringan lereng 2-15% terdapat di sebagian besar Kecamatan Moga, sebagian kecil wilayah Kecamatan Pemalang, Taman, dan Kecamatan Belik.
- Daerah perbukitan yang cukup curam dengan kemiringan lereng antara 15-40% terdapat di Kecamatan Watukumpul, sebagian besar wilayah Kecamatan Belik, dan Pulosari serta sebagian kecil wilayah Kecamatan Bodeh.
- Daerah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% hanya terdapat di Kecamatan Moga dan Kecamatan Belik.

Secara spasial kondisi topografi Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada **Peta Kelereng Kabupaten Pemalang**.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jln. Jend. Gatot Subroto No. 28 Pemalang

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD)
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2017

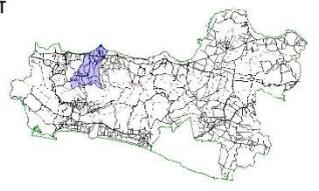
PETA
TOPOGRAFI
KABUPATEN PEMALANG

LEGENDA

- ADMINISTRASI**
- Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa
- JALAN**
- Arteri Primer
 - Kolektor Primer
 - Lokal Primer
 - Lingkungan
 - Rel K A
 - Rencana Jalan Tol
- PERAIRAN**
- Garis Pantai
 - Sungai

- KELERENGAN**
- 0-2 %
 - 2-15 %
 - 15-40 %
 - >40 %

INSET



SUMBER

PETA DASAR

- PETA RUPABUMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001
- CITRAUDARA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006

PETA TEMATIK

- OLAHAN CITRAUDARA KABUPATEN PEMALANG
- PROFIL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007

	NO. PETA	HALAMAN
	1.2	1-5
SKALA 1 : 200.000		

1.2.1.3. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Pemalang secara garis besar terbagi menjadi Endapan Aluvial, Kelompok Litosol, Latosol, Regosol, Andosol, dan Podsolik dengan sebaran sebagai berikut :

- Jenis Aluvial terdapat di wilayah Kecamatan Petarukan, Pemalang, Ampelgading, Bodeh, Comal dan Ulujami.
- Jenis tanah Litosol dan kompleksnya, terdapat di Kecamatan Pemalang, Randudongkal, Belik, Watukumpul, dan Bantarbolang.
- Jenis Latosol dan asosiasinya terdapat di Kecamatan Bantarbolang, Pemalang, Moga, Pulosari, Randudongkal dan Belik.

Secara rinci persebaran jenis tanah di wilayah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I. 1 PERSEBARAN JENIS TANAH DI WILAYAH KABUPATEN PEMALANG

No	Jenis Tanah	Persebaran
1	Aluvial kelabu tua	Kecamatan Petarukan, Pemalang dan Taman
2	Aluvial kelabu kekuningan	Kecamatan Pemalang, Taman, Ampelgading dan Petarukan
3	Aluvial kelabu dan coklat kelabu	Kecamatan Ampelgading, Bodeh, Comal dan Ulujami
4	Regosol kelabu	Kecamatan Pemalang dan Taman
5	Litosol	Kecamatan Pemalang dan Randudongkal
6	Aluvial hidromorf	Kecamatan Comal dan Ulujami
7	Litosol coklat	Kecamatan Belik dan Watukumpul
8	Andosol coklat kekuningan	Kecamatan Pulosari
9	Latosol coklat tua kemerahan	Kecamatan Bantarbolang dan Pemalang
10	Asosiasi latosol coklat dan regosol coklat	Kecamatan Moga Pulosari dan Belik
11	Kompleks regosol kelabu dan litosol	Kecamatan Pulosari
12	Kompleks latosol merah kekuningan latosol coklat tua dan litosol	Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang dan Pemalang
13	Kompleks podsolik merah kekuningan podsolik kuning dan regosol	Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari dan Moga

Sumber: Sistem Informasi Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pemalang

Secara spasial kondisi jenis tanah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada **Peta Jenis Tanah Kabupaten Pemalang**.

1.2.1.4. Geologi

Secara geologi, struktur geologi Kabupaten Pemalang terdiri dari struktur *Aluvium*, *Tapak Formation*, *Rambatan Formation*, *Vulcanic Product / Undivided*, *Vulcanic Product / Lava* dan *Halang Formation* dengan sebaran sebagai berikut :

- Struktur *Aluvium* terdapat di Kecamatan Ulujami, Comal, Ampelgading, Petarukan, Taman, Pemalang bagian utara dan Kecamatan Bodeh.
 - Formasi Tapak (*Tapak Formation*) terdapat di Kecamatan Pemalang bagian utara, Ampelgading, Bodeh dan bagian selatan Kecamatan Bantarbolang.
 - Formasi Rambatan (*Rambat Formation*), terdapat di sebagian besar Kecamatan Belik, Kecamatan Watukumpul, bagian utara Kecamatan Bodeh dan sebagian Kecamatan Randudongkal.
 - Struktur Batuan Produk Gunung Api/ tak terpisahkan (*Vulcanic Product / Undivided*), terdapat di sebagian besar Kecamatan Randudongkal.
 - Struktur Batuan Produk Gunung Api/ Lava (*Vulcanic Product / Lava*), terdapat di sebagian besar Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulosari.
 - Formasi Halang (*Halang Formation*), terdapat di sebagian besar Kecamatan Watukumpul, sebagian Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal dan Pulosari.
- Secara spasial kondisi struktur geologi Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada **Peta Struktur Geologi Kabupaten Pemalang.**

1.2.1.5. Hidrologi

Sedangkan secara hidrologi, air tanah, dan hidrogeologi, di Kabupaten Pemalang terdapat beberapa sungai cukup besar yaitu:

- Sungai Waluh, terletak kurang lebih 4 km dari pusat kota, mencakup 15 anak sungai dengan panjang sekitar 43,5 Km, melalui wilayah Kecamatan Moga, Randudongkal, Bantarbolang, Pemalang dan Taman.
- Sungai Rambut, terdiri dari 13 anak sungai, melalui wilayah Kecamatan Moga dan Pemalang dengan panjang sekitar 48 Km.
- Sungai Comal, terletak kurang lebih 14 km dari pusat kota, yang terdiri dari 30 anak sungai yang melewati wilayah Kecamatan Belik, Moga, Randudongkal, Bantarbolang, Ampelgading, Comal dan Ulujami dengan panjang sekitar 92,5 Km.

Selain sungai sebagai potensi air permukaan, kondisi potensi hidrologi di Kabupaten Pemalang ditunjukkan dari adanya potensi mata air sebagai sumber air dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum di Kabupaten

Pemalang. Secara spasial potensi hidrologi di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada **Peta Sumber Air Kabupaten Pemalang**.

Kondisi hidrogeologi di Kabupaten Pemalang dapat digambarkan dari adanya 2 (dua) Cekungan Air Bawah Tanah, yaitu Cekungan Air Tanah Lebaksiu dan Cekungan Air Tanah Pekalongan-Pemalang. Adanya potensi cekungan air tanah di Kabupaten Pemalang menjadi potensi tersedianya cadangan air tanah di Kabupaten Pemalang. Secara spasial potensi cadangan air tanah di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada **Peta Cadangan Air Tanah Kabupaten Pemalang**.

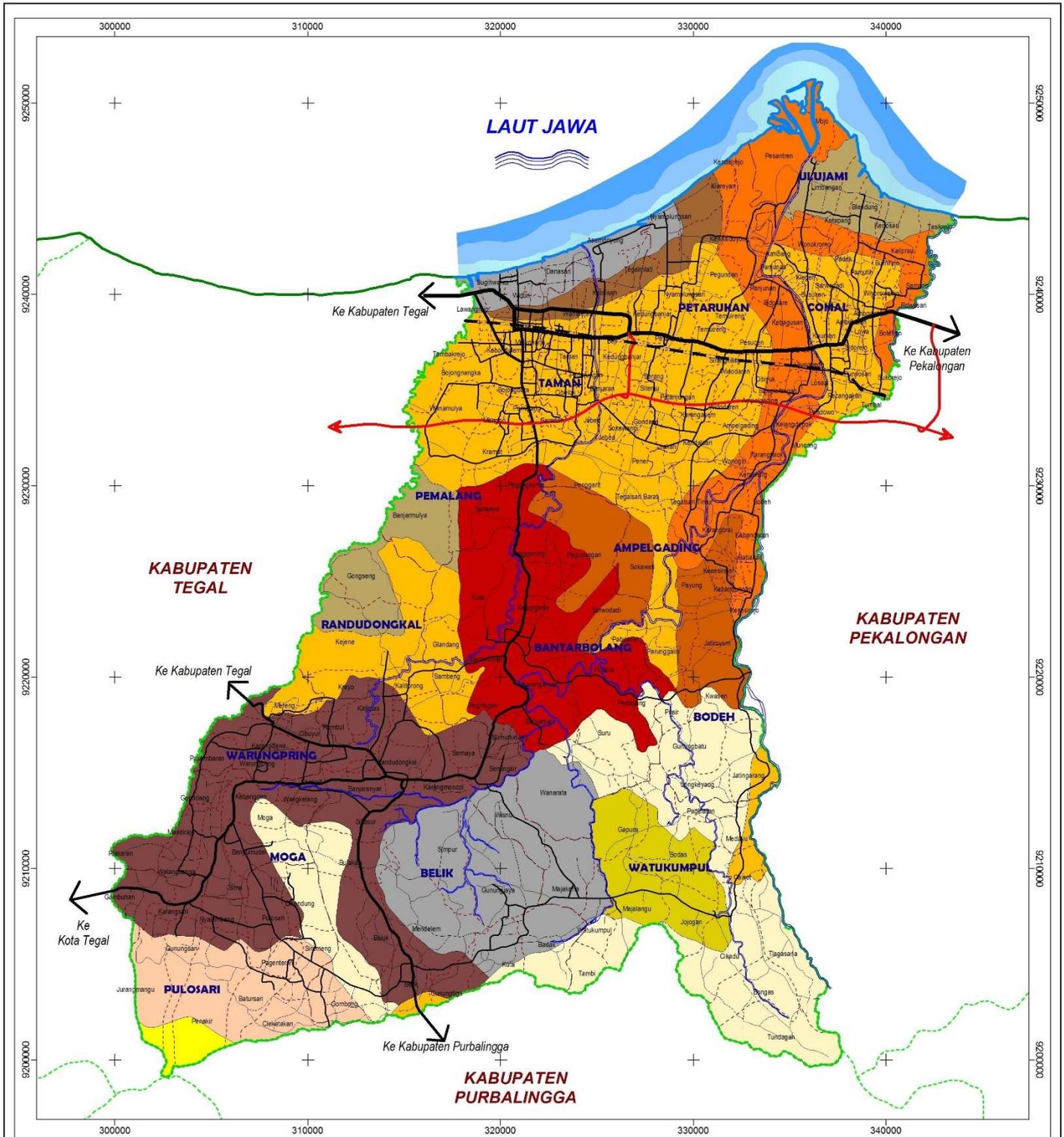
1.2.2. Potensi Unggulan Daerah

1.2.2.1. Potensi Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (*crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Potensi komoditas pertanian yang terdapat di Kabupaten Pemalang meliputi :

- Tanaman pangan dengan komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang hijau,
- Tanaman hortikultura sayur-sayuran dengan komoditas bawang merah, bawang putih, kentang, sawi, kacang panjang, sawi besar, terung, buncis, ketimun, kobis, tomat,
- Tanaman hortikultura buah-buahan dengan komoditas alpukat, manga, rambutan, duku, jeruk, durian, papaya, pisang, nanas.
- Tanaman perkebunan dengan komoditas kelapa sayur, cengkeh, kapuk randu, kopi robusta, teh, kelapa deres/kopyor, mete, lada, kakao, sereh wangi, kopi arabika, pala dan nilam.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jln. Jend. Gatot Subroto No. 28 Pemalang

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD)
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2017

PETA
JENIS TANAH
KABUPATEN PEMALANG

LEGENDA

- ADMINISTRASI**
- Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan
 - - - Batas Desa

- JALAN**
- Arteri Primer
 - Kolektor Primer
 - Lokal Primer
 - Lingkungan
 - Rel K A
 - Jalan Tol

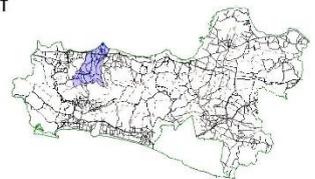
PERAIRAN

- Garis Pantai
- Sungai

JENIS TANAH

- Alluvial Kelabu dan Coklat Kelabu
- Alluvial Kelabu Kekuningan
- Alluvial Kelabu Tua
- Andosol Coklat Kekuningan
- Asosiasi Gromosol Kelabu Kekuningan
- Asosiasi Latosol Coklat dan Regosol Coklat
- Kompleks Latosol Merah Kekuningan, Latosol Coklat
- Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik
- Kompleks Regosol Kelabu dan Litosol
- Latosol Coklat Tua Kemerahan
- Litosol
- Regosol Kelabu

INSET



SUMBER

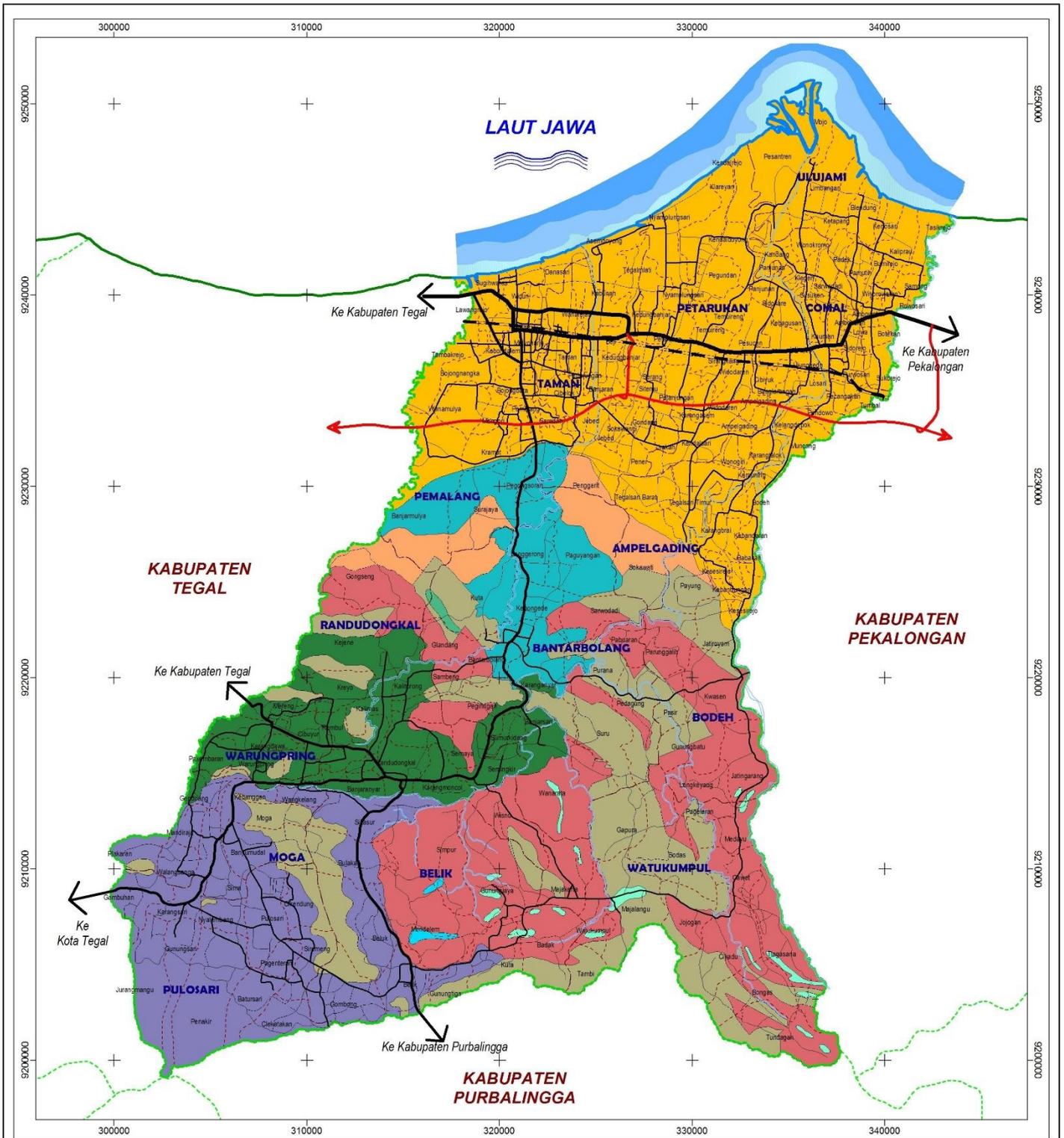
- PETA DASAR
- PETA RUPABUMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001
- CITRAUDARA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006
- PETA TEMATIK
- OLAHAN CITRAUDARA KABUPATEN PEMALANG
- PROFIL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007



NO. PETA	HALAMAN
1.3	1-9

SKALA





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 28 Pemalang

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD)
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2017

PETA
STRUKTUR GEOLOGI
KABUPATEN PEMALANG

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - - Batas Desa

JALAN

- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Lokal Primer
- Lingkungan
- Rel K A
- Jalan Tol

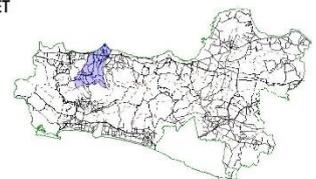
PERAIRAN

- Garis Pantai
- Sungai

GEOLOGI

- Alluvium
- Diorit
- Halang formation
- Limestone, member of halang formation
- Portil mikrodiortit
- Rambatan formation
- Tapak formation
- Tuffaceous units
- Volcanic products, lava
- Volcanic products, undivided

INSET



SUMBER

- PETA RUPABUMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001
- CITRAUDARA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006

PETA TEMATIK

- OLAHAN CITRAUDARA KABUPATEN PEMALANG
- PROFIL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007



NO. PETA

HALAMAN

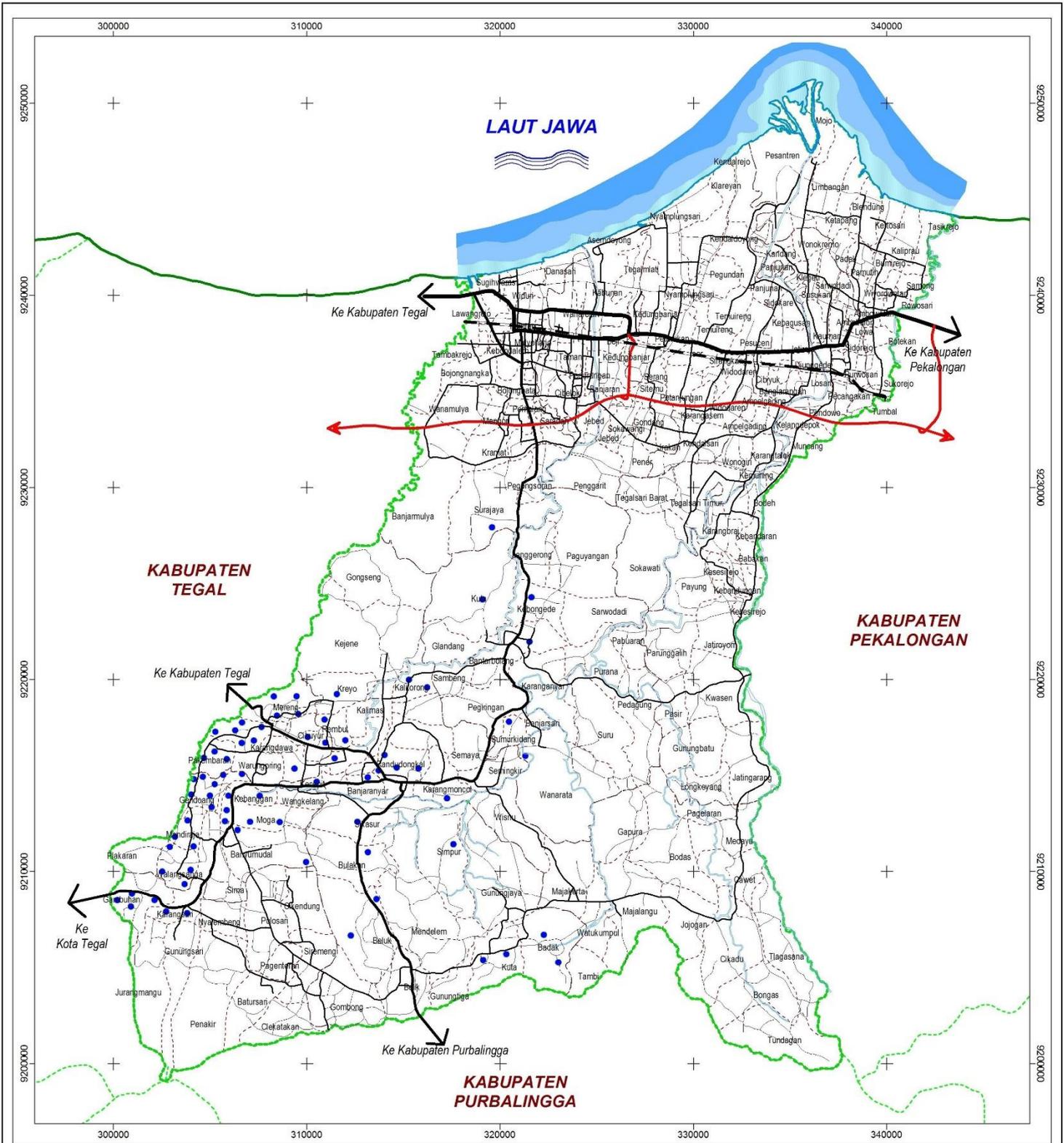
1.4

I-10

SKALA

1 : 200.000





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jln. Jend. Gatot Subroto No. 28 Pemalang

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD)
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2017

PETA
SUMBER AIR
KABUPATEN PEMALANG

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - - Batas Desa

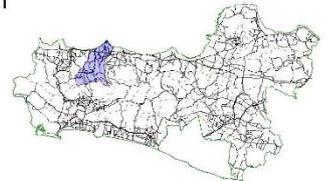
JALAN

- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Lokal Primer
- Lingkungan
- Rel K A
- Jalan Tol

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Sungai
- Mata Air

INSET



SUMBER

PETA DASAR

- PETA RUPABUMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001
- CITRAUDARA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006

PETA TEMATIK

- OLAHAN CITRAUDARA KABUPATEN PEMALANG
- PROFIL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007



SKALA

1 : 200.000

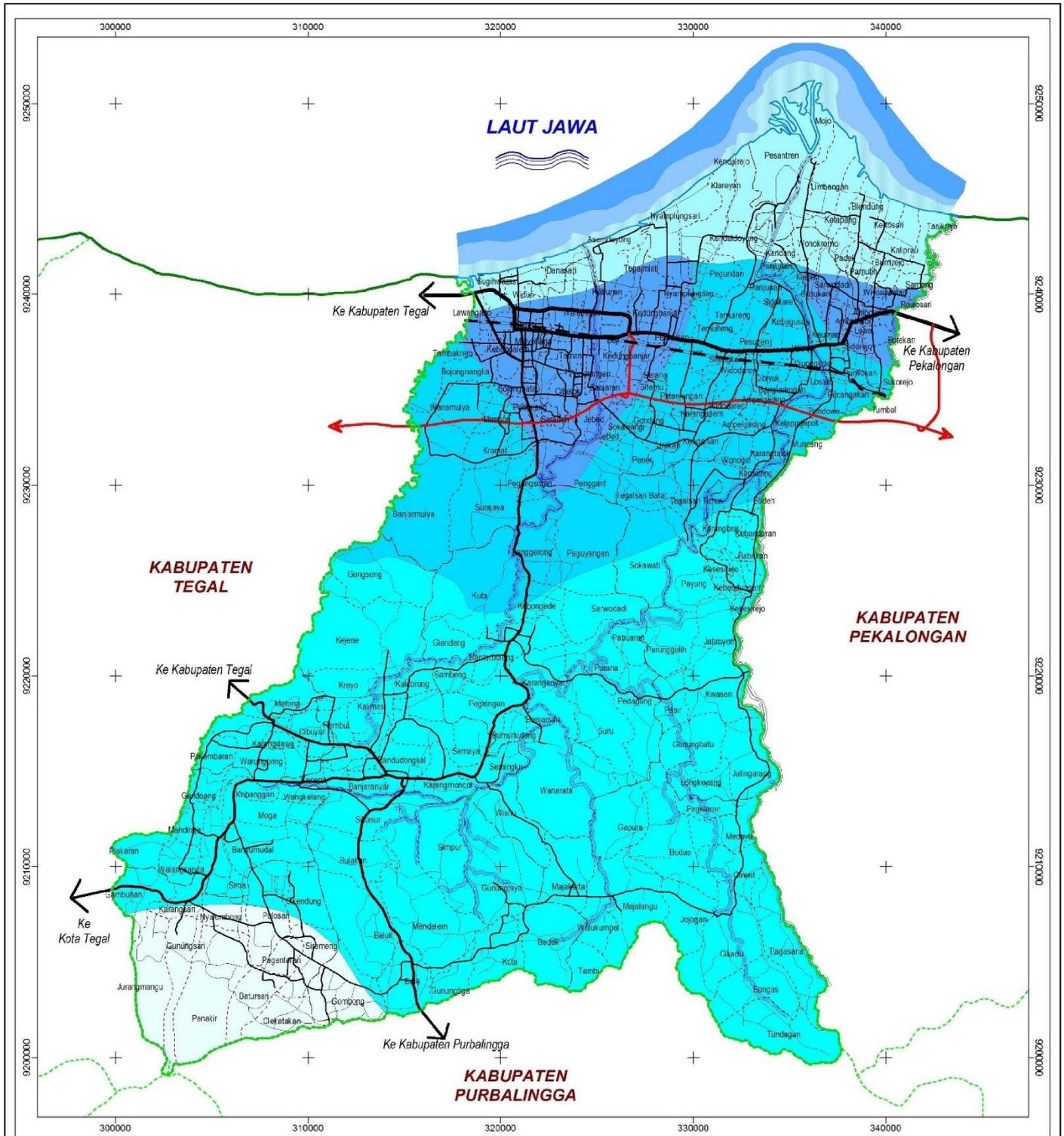
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Meter

NO. PETA

I.5

HALAMAN

I-11



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jln. Jend. Gatot Subroto No. 28 Pemalang

**INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (KPLHD)
 KABUPATEN PEMALANG
 TAHUN 2017**

**PETA
 CADANGAN AIR TANAH
 KABUPATEN PEMALANG**

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Desa

JALAN

- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Lokal Primer
- Lingkungan
- Rel K A
- Jalan Tol

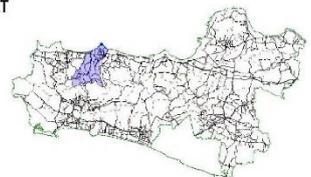
PERAIRAN

- Garis Pantai
- Sungai

CADANGAN AIR TANAH

- KRISIS AIR
- MERATA ASIN
- < 2.5 l/d/Km²
- 2.5 - 10 l/d/Km²
- > 10 l/d/Km²

INSET



SUMBER

- PETA DASAR**
- PETA RUPAUMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001
- CITRA UDARA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006
- PETA TEMATIK**
- OLAHAN CITRA UDARA KABUPATEN PEMALANG
- HASIL ANALISA TIM PENYUSUN TAHUN 2009



NO. PETA
 1.6

HALAMAN
 1-12

SKALA

1 : 200.000



1.2.2.2. Potensi Peternakan

Potensi lain yang dimiliki Kabupaten Pemalang yaitu peternakan. Komoditas potensi peternakan Kabupaten Pemalang adalah hasil peternakan baik berupa ternak besar, ternak kecil maupun unggas. Komoditas potensi peternakan sebagai berikut :

- Ternak besar dan ternak kecil dengan komoditas kuda, sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, dan domba.
- Unggas dengan komoditas ayam, itik, puyuh, dan unggas lainnya.

1.2.2.3. Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Pemalang meliputi potensi ikan laut dan ikan darat/ ikan peliharaan. Adapun jenis ikan yang merupakan potensi di Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

- Potensi ikan laut, meliputi :
 - Potensi ikan laut dengan jenis pelagis meliputi jenis ikan layang, selar, tembang/jui, lemuru, tengiri, kembung, tongkol, belanak, julung-julung, layur, ekor kuning, kuniran, teri hitam, dan teri nasi.
 - Potensi ikan laut dengan jenis demersal meliputi jenis ikan bawal hitam, bawal putih, petek/peperok, kakap, tigawaja, ikan terbang, cucut, pari/peh, manyung, songot, bambangan, kuro/laosan, beloso, dan ikan karang.
 - Potensi ikan laut dengan jenis lain-lain meliputi cumi-cumi, shell fish, rajungan, udang jerbung, udang peci, udang krosok, rebon, dan lain-lain.
- Potensi ikan darat dengan jenis ikan tambak berupa ikan bandeng, udang, kepiting, rucah dan rumput laut.

1.2.2.4. Potensi Industri

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau *assembling* dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Industri dikelompokkan ke dalam 2 (dua) sektor yaitu sektor industri kecil dan sektor industri besar-menengah.

Industri mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi industri juga berpotensi terhadap pencemaran terhadap lingkungan. Oleh karena itu semua kegiatan industri juga harus menjaga kelestarian lingkungan, memahami dan mematuhi peraturan pengelolaan lingkungan yang ada.

Berdasarkan data yang telah disajikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang terdapat 12.667 industri kecil, 95 industri menengah, dan 2 (dua) industri besar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL I. 2 JUMLAH INDUSTRI DI KABUPATEN PEMALANG

No	Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Nilai Produksi (Rp. Juta)
1	Industri Kecil	12.667	41.424	490.730	1.626.216
2	Industri Menengah	95	3.340	64.325	634.668
3	Industri Besar	2	1.348	77.679	182.467

Sumber: Kabupaten Pemalang dalam Angka, 2017

1.2.2.5. Potensi Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan dan persiapan untuk pengolahan lanjutan dari benda padat, benda cair, dan gas. Pertambangan dapat dilakukan di atas permukaan bumi (tambang terbuka) maupun di bawah tanah (tambang dalam) termasuk penggalian, pengerukan, dan penyedotan dengan tujuan mengambil benda padat, cair atau gas yang ada di dalamnya. Kegiatan pertambangan juga dapat berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sumber daya mineral di Kabupaten Pemalang cukup potensial. Apabila dapat dieksploitasi, sampai saat ini minat investor untuk menanamkan modalnya masih rendah, sedangkan galian golongan C yang sudah dieksploitasi adalah pasir dan batu (Sirtu), pasir, batu dan tanah urug. Berdasarkan RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031, potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Pemalang meliputi :

TABEL I. 3 POTENSI PERTAMBANGAN DI KABUPATEN PEMALANG

No	Potensi Pertambangan	Kecamatan	Sebaran Potensi Lokasi	Luas (Ha)
1	Pasir Batu(Sirtu)	Pemalang	Pegongsoran, Surajaya	55,85
2	Tanah Urug	Bantarbolang	Kuta, Lenggerong, Pegiringan, Wananata, Bantarbolang, Purana, Sumurkidang, Pabuaran, Pedagung,	120

No	Potensi Pertambangan	Kecamatan	Sebaran Potensi Lokasi	Luas (Ha)
			Karanganyar, Banjarsari	
		Bodeh	Muncang, Kebandaran, Karangbrai, Babakan, Kwasen, Pasir, Kesesirejo, Jatiroyom, Purunggalih, Payung, Gunungbatu	60
		Ampelgading	Karangtalok, Tegalsari Timur, Sidokare, Kebagusan, Kemuning, Sokawati, Losari	50
		Randudongkal	Semingkir, Semaya, Karangmoncol	80
		Watukumpul	Gapura	12,5
3	Lempung/tanah liat	Randudongkal	Gongseng	250,85
		Bantarbolang	Purana, Kuta, Kalipolaga, Kalisat	153,75
		Warungpring	Warungpring	41,5
		Watukumpul	Majalangu, Jojogan, Majakerta, Wisnu	351,2
		Belik	Mendelem, Gunungjaya, Karanganyar	162,45
4	Batu gamping	Bantarbolang	Glandang	150
		Bodeh	Gunungbatu	40
5	batu sabak	Belik	Gunungjaya	10
6	Kaolin	Watukumpul	Jojogan, Cikadu, Watukumpul	63
		Moga	Pakembaran, Datar	462,6
7	Tras	Belik	Badak, Kuta	17
		Pulosari	Gambuhan	25,2
8	Diorit	Belik	Kuta, Mendelem	25
		Watukumpul	Watukumpul, Majakerta, Wisnu	10
9	Andesit	Pulosari	Siremeng, Pulosari, Penakir	1850
		Belik	Sikasur, Mendelem, Gunungjaya, Badak	83,25
		Randudongkal	Kecepit, Gongseng	144,75
10	Marmer	Bantarbolang	Wanarata	0,02
11	Oker	Warungpring	Pakembaran. Datar	89,5
12	Kaisit	Bantarbolang	Kuta	0,002

Sumber: RTRW Kabupaten Pemalang tahun 2011-2031

1.2.2.6. Potensi Pariwisata

Kabupaten Pemalang memiliki beberapa objek wisata yang terdiri dari wisata alam dan wisata buatan. Berdasarkan data Dinas kebudayaan dan Pariwisata dalam Buku Kabupaten Pemalang Dalam Angka tahun 2017 yang diterbitkan oleh BPS, objek wisata dan jumlah pengunjung tahun 2016 Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut.

TABEL I. 4 OBYEK WISATA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

No	Obyek Wisata	Jumlah Wisatawan
1	Pantai Widuri	187.538
2	Kolam renang Nyai Widuri	-
3	Ventura River	5.095

No	Obyek Wisata	Jumlah Wisatawan
4	Widuri Water Park	137.674
5	Road Race	269.329
6	Makam Mbah Kramat	136.274
7	Wista Pangeran Purbaya	5.126
8	Kolam renang Zatobay	45.880
9	Pantai Blendung	6.872
10	Kolam Renang Bening	83.901
11	Hutan Mangrove Mojo	3.510
12	Pantai Kaliprau	32.000
13	Pantai Nyamplungsari (Joko Tingkir)	7.850
14	Sumur Pandan	5.410
15	Makan Pandanjati	8.007
16	Makam Buyut Bantarbolang	6.739
17	Rainbow Rafting & Outbond (Comal River)	9.982
18	Telaga Silanting	2.755
19	Jambe Kembar	15.100
20	Kolam renang Moga	1.750
21	PTPN IX Semugih	10.129
22	Curug Sibedil	12.839
23	Agro Wisata Comal Baru	15.400
24	Pos Pendakian Gunung Slamet	2.159

Sumber: Kabupaten Pemalang dalam Angka, 2017

1.3. Gambaran Proses Penyusunan dan Perumusan Isu Prioritas

1.3.1. Proses Penyusunan Dokumen IKPLHD

1.3.1.1. Tahap Persiapan

1) Perencanaan

Tahap perencanaan proses penyusunan dokumen IKPLHD diawali dengan membuat perencanaan yang meliputi kegiatan antara lain: pembagian tugas, penjadwalan, penentuan isu prioritas, perumusan struktur isi, identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data yang mengikuti kerangka kerja *Pressure-State-Response* (PSR), evaluasi, penyusunan/penulisan laporan, dan finalisasi (pencetakan serta upload pada website).

2) Tim Penyusunan

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Pemalang disusun oleh tim yang dibentuk oleh Bupati melalui Keputusan Bupati Kabupaten Pemalang tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Pemalang Tahun 2017. Keanggotaan tim penyusun terdiri dari para pejabat/staf di Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku

kepentingan lainnya yang terkait dengan kegiatan Penyusunan IKPLHD Kabupaten Pemalang.

3) **Kemitraan**

Laporan IKPLHD merupakan laporan multisektor yang disusun secara komprehensif. Dibutuhkan kerjasama dan kemitraan dari seluruh pemangku kepentingan agar data dan informasi yang diperoleh mutakhir, lengkap, akurat dan tertelusur. Tujuan kemitraan adalah agar laporan dapat digunakan sebagai acuan bersama para pemangku kepentingan sebagai sarana pertukaran data dan informasi baik dari sumber internal maupun sumber eksternal yaitu pihak pemerintah dan non pemerintah (LSM/swasta/media massa/masyarakat, dan sebagainya).

4) **Penentuan Isu Prioritas**

Penentuan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup didasari dari permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan dialami. Permasalahan lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas, yaitu lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sector, dan lintas generasi. Dalam penentuan isu prioritas Laporan IKPLHD Kabupaten Pemalang dilakukan dengan pertimbangan kriteria yang tertuang dalam Pedoman Nirmasita Tantra, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017 dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).

Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan. Proses pelibatan pemangku kepentingan ini dilakukan melalui diskusi yang secara sederhana didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu.

Proses penyusunan dan perumusan isu lingkungan hidup dibantu pendekatan PSR (*Pressure State and Response*) untuk memberi pemahaman kerangka prioritas dari persoalan-persoalan yang muncul. Dengan memperhatikan sumber daya stakeholders, maka dibuat pilihan masalah-masalah yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah dilakukan

penjaringan isu-isu lingkungan melalui diskusi, selanjutnya dilakukan penentuan isu prioritas.

Pendekatan atau metode yang digunakan menentukan isu proiritas adalah dengan analisis pembobotan (*scoring*). Penggunaan alat analisis pembobotan dapat diaplikasikan untuk kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan atau perumusan strategi prioritas. Beberapa rumusan isu lingkungan hidup yang dirumuskan dari hasil diskusi selanjutnya dirangking berdasarkan kriteria yang ada untuk menentukan urutan prioritas isu yang merupakan isu prioritas lingkungan hidup dalam penyusunan IKPLH Kabupaten Pemalang.

5) Struktur Isi

Struktur isi adalah substansi atau muatan yang ada pada Laporan IKPLHD. Muatan atau substansi Laporan IKPLHD Kabupaten Pemalang mengikuti kerangka kerja PSR (*Pressure-State-Response*) yang tertuang dalam Pedoman Nirmasita Tantra yang meliputi kondisi lingkungan hidup meliputi tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, dan perkotaan. Kelima komponen lingkungan hidup tersebut memberikan gambaran kesimpulan mengenai status atau kondisi (*state*) yang dilengkapi dengan penyebab terjadinya kondisi tersebut (*tekanan/Pressure*), serta upaya-upaya untuk mengatasinya (*Response*).

6) Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan jenis data (spasial dan tabular) dan bentuk data (numerik, narasi, gambar atau foto), sedangkan pengolahan data dilakukan dengan urutan pemilihan, pemilahan, penapisan dan perhitungan data dengan satuan yang konsisten. Mekanisme pertukaran data dan informasi dalam penyusunan IKPLHD dapat dilakukan melalui pertemuan teknis, kontak langsung (telepon), tatap muka, dan konsultasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mempunyai data.

7) Sumber Data

Data yang dihasilkan dalam mendukung Penyusunan Dokumen IKPLHD dari pemantauan lapangan, pengukuran, perhitungan, dan pencacahan. Sumber data IKPLHD antara lain:

- a) Unit-unit kerja internal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

- b) Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Pemalang
- c) Hasil penelitian, kajian, studi atau survei yang pernah dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta di Kabupaten Pemalang
- d) Kebijakan dan peraturan perundangan yang terkit dengan kegiatan Penyusunan IKPLD Kabupaten Pemalang
- e) Data dari pihak lainnya.

Penyusunan Laporan IKPLHD Kabupaten Pemalang menggunakan data dan informasi kondisi lingkungan hidup. Data yang digunakan dan disajikan merupakan data yang paling mutakhir tersedia sesuai kondisi penyediaan data dan informasi pada masing-masing OPD yang terkait.

8) Pengelolaan Basis Data

Pengelolaan basis data (data base) berfungsi sebagai media tata kelola data lingkungan hidup yang terstruktur dan terintegrasi. Dengan basis data yang tertata dengan baik dan terstruktur, proses analisis pada penyusunan laporan IKPLHD akan optimal, efektif dan efisien. Basis data memudahkan akses dan stabilitas keamanan data lingkungan. Basis data juga mendorong terjadinya transparansi data lingkungan hidup kepada publik.

1.3.1.2. Tahap Penyusunan

1) Analisis atau Pengolahan Data

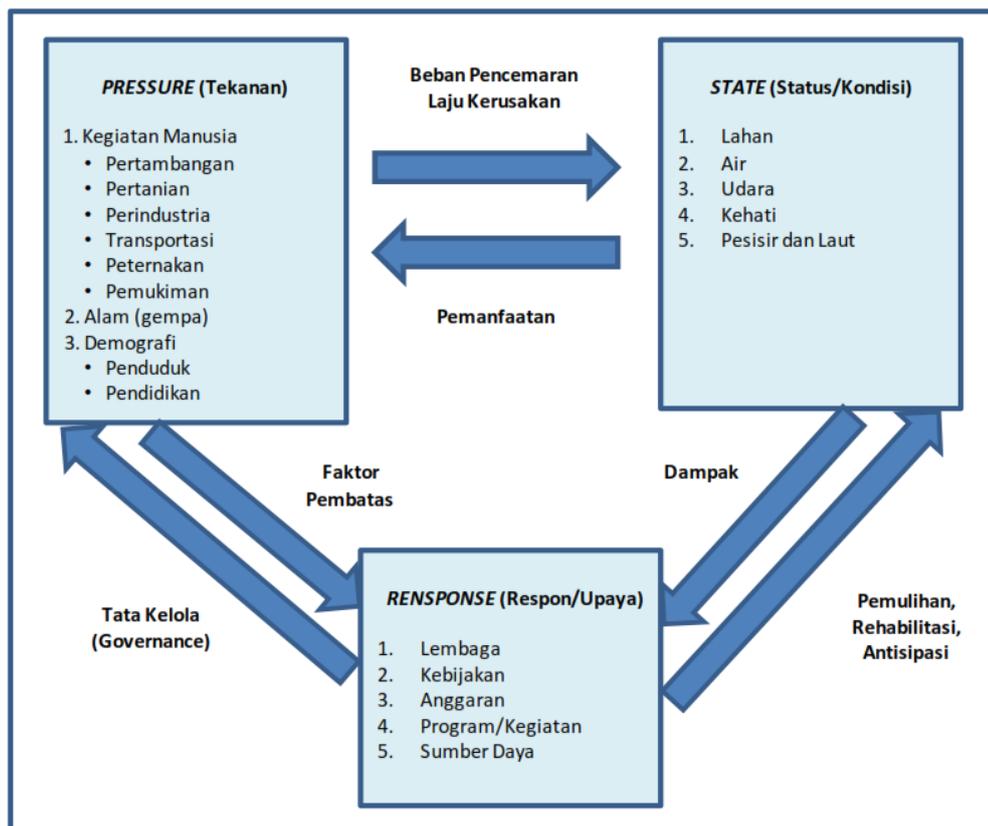
Analisis atau pengolahan data adalah upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dengan mudah dipahami dan bermanfaat. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan, data biofisik dan data sosio-ekonomis perlu dikumpulkan, diintegrasikan, serta dianalisis untuk dapat merepresentasikan keadaan lingkungan hidup secara lebih menyeluruh dan multisektoral. Kemampuan untuk mengevaluasi secara akurat perubahan lingkungan hidup sangat tergantung pada adanya data dasar dimana perubahan itu akan dibandingkan.

2) Kerangka Kerja Model PSR (Pressure-State-Response)

Kerangka Laporan IKPLHD didasarkan pada model PSR (Pressure-State-Response) yang dikembangkan oleh United Nations Environment Programme

(UNEP) dan telah menjadi kerangka acuan penulisan status lingkungan hidup di dunia internasional. Metode PSR ini bentuk analisisnya lebih sederhana dibanding metode lainnya.

Model PSR adalah hubungan sebab akibat (kausalitas) antara penyebab permasalahan, kondisi lingkungan hidup, dan upaya mengatasinya. Kegiatan manusia yang memanfaatkan sumberdaya alam memberikan tekanan kepada lingkungan hidup (*pressure*) dan menyebabkan perubahan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup baik secara kualitas maupun kuantitas (*state*). Selanjutnya pemerintah dan masyarakat/stakeholder melakukan reaksi terhadap perubahan ini baik melakukan adaptasi maupun mitigasi melalui berbagai kebijakan, program, maupun kegiatan (*response*). Hal yang terakhir merupakan umpan balik terhadap tekanan melalui kegiatan manusia. Analisis terhadap tekanan yang muncul, kondisi eksisting yang terjadi berikut dampaknya serta respons yang dilakukan kemudian dikenal sebagai pendekatan PSR (*Pressure – State – Respons*) seperti terlihat dalam diagram alir pada gambar berikut.



Sumber : UNEP dimodifikasi

Gambar 1. 1 Diagram Model PSR (Tekanan-Status-Respon)

Ada tiga indikator utama dalam kerangka PSR yang akan dianalisis, yaitu:

- a. Indikator tekanan terhadap lingkungan hidup (*pressure*). Indikator ini menggambarkan tekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
- b. Indikator kondisi lingkungan hidup (*state*). Indikator ini menggambarkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Indikator respon (*response*). Indikator ini menunjukkan tingkat upaya dari para pemangku kepentingan terutama pemerintah terhadap kondisi lingkungan hidup.

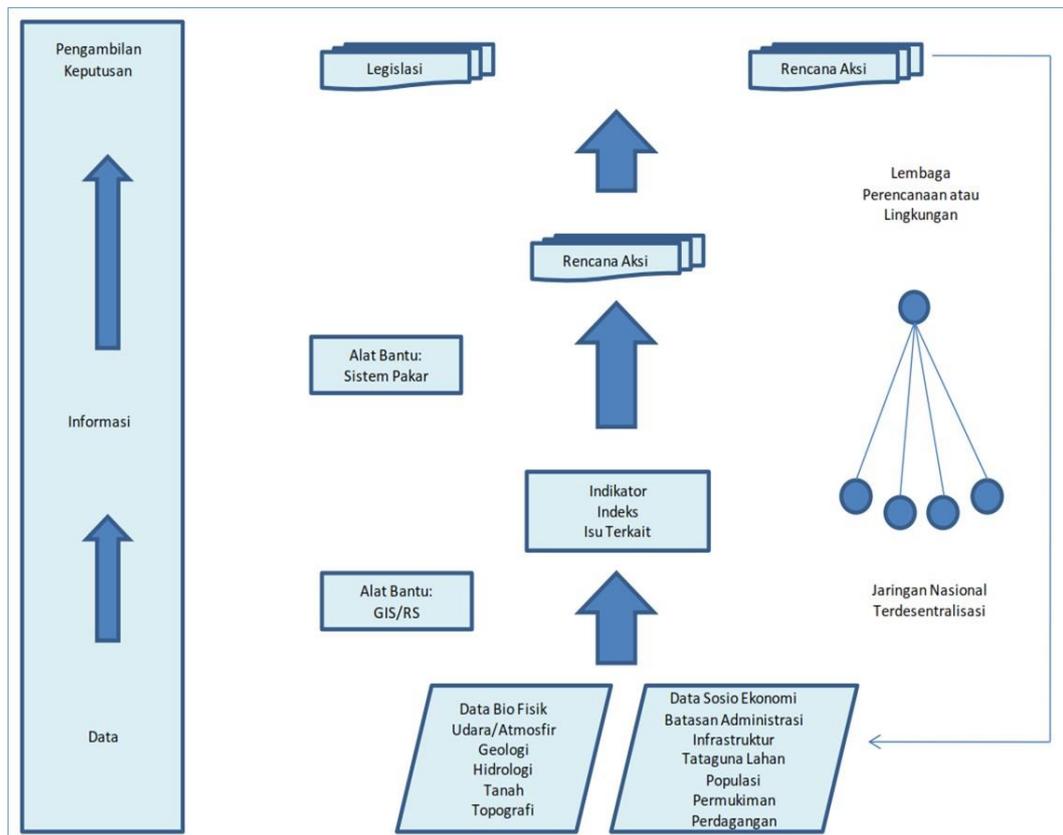
Tekanan terhadap lingkungan hidup meliputi aktivitas seperti konsumsi energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan urbanisasi. Tekanan juga meliputi interaksi-interaksi berikut:

- a. Lingkungan hidup sebagai sumber aktivitas ekonomi manusia seperti mineral, makanan dan energi. Dalam prosesnya berpotensi mengurangi (*depleting*) sumber-sumber daya tersebut atau mengganggu ekosistem.
- b. Aktivitas manusia memberikan dampak negatif berupa polutan (sampah/limbah) dan kerusakan lingkungan hidup.
- c. Kondisi lingkungan hidup seperti udara, air, dan sumber pangan yang tercemar mempunyai dampak langsung terhadap kesehatan manusia dan kesejahteraan.

Model bagi proses analisis lingkungan hidup memfasilitasi pemrosesan serta pentransformasian data ke dalam informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan, data biofisik dan data sosio-ekonomis haruslah dikumpulkan, diintegrasikan, serta dianalisis untuk dapat mempresentasikan dan menganalisis keadaan lingkungan hidup secara lebih menyeluruh dan multisektoral. Kemampuan untuk mengevaluasi secara akurat perubahan lingkungan hidup sangatlah bergantung pada adanya data dasar di mana perubahan itu akan dibandingkan.

Pada umumnya data lingkungan hidup daerah ini meliputi atmosfer, topografi, geologi, hidrologi, tanah, serta flora dan fauna. Selain itu ditunjang oleh data sosio-ekonomi seperti data populasi, kesehatan, kemiskinan, pendidikan, keterbatasan administratif, tata guna lahan, perdagangan, infrastruktur, serta

permukiman. Data dasar yang berbeda akan digunakan untuk mempelajari isu yang berbeda. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1. 2 Kerangka Kerja Analisis Lingkungan Hidup

3) Penyajian Informasi

Penyajian data dan informasi dimaksudkan untuk mempermudah pembaca memahami maksud dari data dan informasi tersebut dalam cara yang tepat, efektif dan efisien. Beberapa bentuk penyajian informasi adalah verbal dan non verbal. Selain itu penyajian informasi dapat dibuat dalam tabulasi dan grafik. Penyajian dalam bentuk tabulasi dan grafik dapat mempermudah pembaca dalam memahami informasi yang diberikan.

4) Finalisasi

Pada tahap akhir penyusunan IKPLHD dilakukan review dan editing secara menyeluruh, antara lain edit bahasa (mengikuti tata bahasa/EYD); edit substansi (antara data mentah dan grafik); konsistensi konten, istilah, pengertian dan lainnya; konsistensi bahasa misal desimal memakai koma,

huruf besar dan kecil, standar warna untuk grafik. Dilanjutkan dengan penataan layout/tata letak dan terakhir setelah menjadi draft final.

1.3.2. Proses, Pendekatan atau Metode Perumusan Isu Prioritas

Penentuan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup didasari dari permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan dialami. Permasalahan lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas, yaitu lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sector, dan lintas generasi. Dalam penentuan isu prioritas Laporan IKPLHD Kabupaten Pemalang dilakukan dengan pertimbangan kriteria yang tertuang dalam Pedoman Nirmasita Tantra, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017 dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Adapun kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas adalah:

- a) Kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati;
- b) Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan
- c) Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgensi).

Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan. Proses pelibatan pemangku kepentingan ini dilakukan melalui diskusi yang secara sederhana didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Sebagai salah satu metode pengumpulan data, pengambilan data kualitatif melalui metode diskusi dapat memberikan kemudahan dan peluang bagi penyusun IKPLHD untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. Diskusi yang ada memungkinkan tim penyusun IKPLHD dan stakeholder berdiskusi intensif dalam membahas isu-isu lingkungan hidup yang sangat spesifik. Diskusi yang dilakukan juga memungkinkan tim penyusun IKPLHD mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda.

Proses penyusunan dan perumusan isu lingkungan hidup dibantu pendekatan PSR (*Pressure State and Response*) untuk memberi pemahaman

kerangka prioritas dari persoalan-persoalan yang muncul. Dengan memperhatikan sumber daya stakeholders, maka dibuat pilihan masalah-masalah yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah dilakukan penjaringan isu-isu lingkungan melalui diskusi, selanjutnya dilakukan penentuan isu prioritas.

Pendekatan atau metode yang digunakan menentukan isu proiritas adalah dengan analisis pembobotan (*scoring*). Penggunaan alat analisis pembobotan dapat diaplikasikan untuk kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan atau perumusan strategi prioritas. Beberapa rumusan isu lingkungan hidup yang dirumuskan dari hasil diskusi selanjutnya dirangking berdasarkan kriteria yang ada untuk menentukan urutan prioritas isu yang merupakan isu prioritas lingkungan hidup dalam penyusunan IKPLH Kabupaten Pemalang.

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) dimaksudkan untuk mendokumentasikan perubahan dan kecenderungan kondisi lingkungan hidup. Pelaporan yang rutin akan menjamin akses informasi lingkungan hidup yang terkini dan akurat secara ilmiah bagi publik, industri, organisasi non-pemerintah, serta semua tingkatan lembaga pemerintah. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Pemalang juga akan menyediakan referensi dasar tentang keadaan lingkungan hidup bagi pengambil kebijakan sehingga akan memungkinkan diambilnya kebijakan yang baik dalam rangka mempertahankan proses ekologis serta meningkatkan kualitas kehidupan di masa kini dan masa datang. Pelaporan keadaan lingkungan hidup yang baik dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti berikut:

1. Secara rutin menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan hidup kini dan prospeknya dimasa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik, pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta pengambil keputusan;
2. Memfasilitasi pengembangan, penilaian dan pelaporan indikator dan indeks lingkungan hidup yang disepakati pada tingkat nasional;

3. Menyediakan peringatan dini akan masalah potensial, serta memungkinkan adanya evaluasi akan rencana mendatang;
4. Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk menjawab perubahan lingkungan hidup, termasuk kemajuan dalam mencapai standar dan target lingkungan hidup;
5. Memberikan sumbangan dalam menelaah kemajuan bangsa dalam menjamin keberlanjutan ekologis;
6. Merancang mekanisme integrasi informasi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, untuk menyediakan gambaran yang jelas tentang keadaan bangsa;
7. Mengidentifikasi adanya kesenjangan (gap) pengetahuan tentang kondisi dan kecenderungan lingkungan hidup, serta merekomendasikan strategi penelitian dan pemantauan untuk mengisi kesenjangan tersebut, serta membantu pengambil keputusan untuk membuat penilaian yang terinformasi mengenai konsekuensi luas dari kebijakan dan rencana sosial, ekonomis dan terkait lingkungan hidup, serta untuk memenuhi kewajiban bangsa untuk pelaporan lingkungan hidup.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Pemalang sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Adapun tujuan dasar dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pemalang, yaitu :

1. Menyediakan data dasar bagi perbaikan pengambilan keputusan pada semua tingkat;
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kecenderungan dan kondisi lingkungan hidup;
3. Sarana evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.5. Ruang Lingkup Penulisan

Buku II Laporan utama “Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah” (IKPLHD) Kabupaten Pemalang Tahun 2017 disusun meliputi 5 (Lima) bab yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, profil Kabupaten Pemalang, gambaran proses penyusunan dan perumusan isu prioritas, maksud dan tujuan serta ruang lingkup penulisan.

Bab II Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Bab ini menguraikan tentang proses perumusan isu prioritas, proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas dan rumusan isu prioritas yang dihasilkan.

Bab III Analisis *Pressure, State* dan *Response* Isu Lingkungan Hidup Daerah

Bab ini menguraikan analisis *pressure, state* dan *response* untuk masing-masing isu daerah meliputi : tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana dan perkotaan.

Bab IV Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bab ini memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan baik oleh kepala daerah maupun masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Insisiatif meliputi kegiatan atau program yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.

Bab V Penutup

Bab ini memuat intisari (simpulan) dari laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Pemalang.

BAB II

ISU PRIORITAS

LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

2.1. Proses Perumusan Isu Prioritas

Penentuan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup didasari dari permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan dialami. Permasalahan lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas, yaitu lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sector, dan lintas generasi. Dalam penentuan isu prioritas Laporan IKPLHD Kabupaten Pemalang dilakukan dengan pertimbangan kriteria yang tertuang dalam Pedoman Nirmasita Tantra, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017 dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Adapun kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas adalah:

- a) Kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati;
- b) Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan
- c) Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen).

Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan. Proses pelibatan pemangku kepentingan ini dilakukan melalui diskusi yang secara sederhana didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Sebagai salah satu metode pengumpulan data, pengambilan data kualitatif melalui metode diskusi dapat memberikan kemudahan dan peluang bagi penyusun IKPLHD untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. Diskusi yang ada memungkinkan tim penyusun IKPLHD dan stakeholder berdiskusi intensif dalam membahas isu-isu lingkungan hidup yang sangat spesifik. Diskusi yang dilakukan juga memungkinkan tim penyusun IKPLHD mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda.

Proses penyusunan dan perumusan isu lingkungan hidup dibantu pendekatan PSR (*Pressure State and Response*) untuk memberi pemahaman kerangka prioritas dari persoalan-persoalan yang muncul. Dengan memperhatikan sumber daya stakeholders, maka dibuat pilihan masalah-masalah yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah dilakukan penjarangan isu-isu lingkungan melalui diskusi, selanjutnya dilakukan penentuan isu prioritas.

2.2. Proses Analisis Yang Digunakan Untuk Memperoleh Isu Prioritas

Pendekatan atau metode yang digunakan menentukan isu proiritas adalah dengan analisis pembobotan (*scoring*). Penggunaan alat analisis pembobotan dapat diaplikasikan untuk kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan atau perumusan strategi prioritas. Beberapa rumusan isu lingkungan hidup yang dirumuskan dari hasil diskusi selanjutnya dirangking berdasarkan kriteria yang ada untuk menentukan urutan prioritas isu yang merupakan isu prioritas lingkungan hidup dalam penyusunan IKPLH Kabupaten Pematang.

Beberapa isu lingkungan hidup yang dihasilkan dari proses diskusi dijabarkan sebagai berikut :

A. Lahan/Tanah, Hutan Dan Keanekaragaman Hayati

1. Masih ditemuinya lahan kritis di beberapa daerah.
2. Konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun/non pertanian.
3. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan.
4. Aktivitas penambangan batu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan tol (di Kecamatan Randudongkal dan Kecamatan Bantarbolang)
5. Belum semua masyarakat yang memiliki tanah melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

B. Degradasi Wilayah Pesisir

1. Degradasi habitat wilayah pesisir (mangrove, terumbu karang dan pantai berpasir).
2. Pencemaran wilayah pesisir dan laut oleh limbah industri dan rumah tangga.

3. Sedimentasi yang cukup tinggi di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang.

C. Degradasi Kawasan Cagar Alam

1. Adanya tekanan penduduk terhadap cagar alam di Kabupaten Pemalang yaitu berupa aktivitas budidaya pertanian yang memanfaatkan lahan kawasan cagar alam, khususnya berupa guna lahan hutan.
2. Sampah yang menumpuk di sekitar kawasan cagar alam berpotensi mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan dan kelestarian cagar alam.
3. Pengajuan alih fungsi Cagar Alam Curug Bengkawah menjadi Taman Wisata Alam belum sesuai dengan prosedur.
4. Sumber potensi plasma nutfah yang belum dieksplor yaitu terdapat spesies tanaman yang dapat berfungsi sebagai sumberdaya air.

D. Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air

1. Neraca air di Kabupaten Pemalang tidak seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan.
2. Penurunan kualitas air sungai di Kabupaten Pemalang, terutama dari segi kimia anorganik (konsentrasi *Dissolved Oxygen* (DO) lebih tinggi dari kriteria baku mutu) dan mikrobiologi (adanya konsentrasi *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) yang melebihi kriteria baku mutu).
3. Sedimentasi yang terjadi di badan sungai.

E. Perubahan Iklim

1. Peningkatan suhu udara akibat peningkatan aktivitas transportasi (terutama setelah adanya jalan tol)

F. Bencana Alam

1. Banjir yang terjadi di beberapa daerah terutama di wilayah bagian utara.
2. Masih adanya bencana alam tanah longsor di Kabupaten Pemalang, khususnya di daerah pegunungan.

G. Persampahan

1. Belum terimplementasinya konsep pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) dengan baik diseluruh wilayah Kabupaten Pemalang.
2. Masih adanya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya terutama di saluran air.

H. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

1. Masih adanya perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarang (BABS)

Berdasarkan daftar identifikasi isu lingkungan hidup diatas, selanjutnya dilakukan penentuan isu prioritas. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan metode uji silang antara daftar isu lingkungan hidup dengan kriteria penentuan isu prioritas (Pedoman Nirmasita Tantra, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017 dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)). Adapun kriteria yang dapat dijadikan dasar penetapan isu prioritas adalah:

- a) Kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati;
- b) Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan
- c) Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgensi).

Hasil uji silang tersebut selanjutnya dijadikan dasar penilaian melalui metode pembobotan. Nilai pembobotan dengan skala 1 sampai dengan 5 yang diasumsikan tidak berpengaruh – sangat berpengaruh dengan kondisi lingkungan hidup, dengan rincian :

- Nilai Bobot : 5 = Sangat Berpengaruh
- Nilai Bobot : 4 = Berpengaruh
- Nilai Bobot : 3 = Cukup Berpengaruh
- Nilai Bobot : 2 = Kurang Berpengaruh
- Nilai Bobot : 1 = Tidak Berpengaruh

Lebih jelasnya hasil uji silang dan hasil pembobotan identifikasi isu prioritas dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL II. 1Matrik Hasil Pembobotan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

No	Isu Strategis Lingkungan Hidup	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Skor	Keterangan
A Lahan/Tanah, Hutan Dan Keanekaragaman Hayati						
1.	Masih ditemuinya lahan kritis di beberapa daerah.	4	3	3	10	Berpengaruh Sedang
2.	Konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun/non pertanian.	3	2	4	9	Berpengaruh Sedang
3.	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan.	2	2	2	6	Berpengaruh Rendah
4.	Aktivitas penambangan batu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan tol (di Kecamatan Randudongkal dan Kecamatan Bantarbolang)	4	3	2	9	Berpengaruh Sedang
5.	Belum semua masyarakat yang memiliki tanah melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).	1	1	1	3	Berpengaruh Rendah
B Degradasi Wilayah Pesisir						
1.	Degradasi habitat wilayah pesisir (mangrove, terumbu karang dan pantai berpasir).	4	4	3	11	Berpengaruh Sedang
2.	Pencemaran wilayah pesisir dan laut oleh limbah industri dan rumah tangga.	4	4	3	11	Berpengaruh Sedang
3.	Sedimentasi yang cukup tinggi di wilayah pesisir Kabupaten Pematang	3	3	3	9	Berpengaruh Sedang
C Degradasi Kawasan Cagar Alam						
1.	Adanya tekanan penduduk terhadap cagar alam di Kabupaten Pematang yaitu berupa aktivitas budidaya pertanian yang memanfaatkan lahan kawasan cagar alam, khususnya berupa guna lahan hutan.	4	3	2	9	Berpengaruh Sedang
2.	Sampah yang menumpuk di sekitar kawasan cagar alam berpotensi mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan dan kelestarian cagar alam.	3	4	2	9	Berpengaruh Sedang
3.	Pengajuan alih fungsi Cagar Alam Curug Bengkawah menjadi Taman Wisata Alam belum sesuai dengan prosedur.	3	2	2	7	Berpengaruh Sedang
4.	Sumber potensi plasma nutfah yang belum dieksplor yaitu terdapat spesies tanaman yang dapat berfungsi	1	1	3	5	Berpengaruh Rendah

No	Isu Strategis Lingkungan Hidup	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Skor	Keterangan
	sebagai sumberdaya air.					
D	Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air					
1.	Neraca air di Kabupaten Pemalang tidak seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan.	3	4	3	10	Berpengaruh Sedang
2.	Penurunan kualitas air sungai di Kabupaten Pemalang, terutama dari segi kimia anorganik (konsentrasi <i>Dissolved Oxygen</i> (DO) lebih tinggi dari kriteria baku mutu) dan mikrobiologi (adanya konsentrasi <i>Biological Oxygen Demand</i> (BOD) dan <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD) yang melebihi kriteria baku mutu).	5	5	4	14	Berpengaruh Tinggi
3.	Sedimentasi yang terjadi di badan sungai.	3	3	3	9	Berpengaruh Sedang
E	Perubahan Iklim					
1.	Peningkatan suhu udara akibat peningkatan aktivitas transportasi (terutama setelah adanya jalan tol)	4	5	5	14	Berpengaruh Tinggi
F	Bencana Alam					
1.	Banjir yang terjadi di beberapa daerah terutama di wilayah bagian utara.	5	5	5	15	Berpengaruh Tinggi
2.	Masih adanya bencana alam tanah longsor di Kabupaten Pemalang, khususnya di daerah pegunungan.	5	5	5	15	Berpengaruh Tinggi
G	Persampahan					
1.	Belum terimplementasinya konsep pengelolaan sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (3R) dengan baik diseluruh wilayah Kabupaten Pemalang.	5	5	5	15	Berpengaruh Tinggi
2.	Masih adanya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya terutama di saluran air.	4	5	5	14	Berpengaruh Tinggi
H	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					
1.	Masih adanya perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarang (BABS)	3	4	4	11	Berpengaruh Sedang

Keterangan :

Kriteria 1 : Kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati;

Kriteria 2 : Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan

Kriteria 3 : Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen).

Keterangan :

Interval/ ordo dibagi kedalam 3 kelas :

- a. Kelas : Berpengaruh rendah
- b. Kelas : Berpengaruh sedang
- c. Kelas : Berpengaruh tinggi

Interval / Ordo : (nilai tertinggi – nilai terendah) : 2

: (15 – 3) : 3

: 4

Interval nilai skor:

- a. Berpengaruh rendah : ≤ 7
- b. Berpengaruh sedang : 7 – 11
- c. Berpengaruh tinggi : > 11

Berdasarkan hasil uji silang dan pembobotan yang telah dilakukan diatas, dapat diketahui beberapa isu yang masuk kedalam klasifikasi berpengaruh rendah, sedang dan tinggi sesuai dengan nilai interval skor diatas.

2.3. Rumusan Isu Prioritas Yang Dihasilkan

Rumusan isu prioritas lingkungan hidup daerah yang dihasilkan berdasarkan analisis diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Penurunan kualitas air sungai

Penurunan kualitas air sungai di Kabupaten Pemalang, terutama dari segi kimia anorganik (konsentrasi *Dissolved Oxygen* (DO) lebih tinggi dari kriteria baku mutu) dan mikrobiologi (adanya konsentrasi *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) yang melebihi kriteria baku mutu).

2. Adanya daerah rawan bencana alam

- Masih adanya bencana alam banjir yang terjadi di beberapa daerah terutama di wilayah bagian utara.
- Masih adanya bencana alam tanah longsor di Kabupaten Pemalang, khususnya didaerah pegunungan.

3. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah
 - Belum terimplementasinya konsep pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) dengan baik diseluruh wilayah Kabupaten Pemalang.
 - Masih adanya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya terutama di saluran air.
4. Adanya perubahan iklim akibat peningkatan aktivitas transportasi
Peningkatan suhu udara akibat peningkatan aktivitas transportasi (terutama setelah adanya jalan tol)

BAB III

ANALISIS PRESSURE, STATE

DAN RESPONSE

PADA ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

3.1. TATAGUNA LAHAN

3.1.1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung terdiri atas :

- a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- b) Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c) Kawasan suaka alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d) Kawasan rawan bencana alam.

Beberapa jenis kawasan lindung di Kabupaten Pemalang berdasarkan Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Pemalang, meliputi :

1. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas kawasan hutan lindung, dan kawasan resapan air. Kawasan hutan lindung Kawasan hutan berfungsi lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan/atau yang mampu memberikan perlindungan

kepada kawasan sekitar maupun bawahannya yaitu sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah. Luas Kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Pemalang adalah 6.609 hektar, berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung dengan luas kurang lebih 6.609 Ha. Luas kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Pemalang terdistribusi ke Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Belik, Kecamatan Moga, Kecamatan Pulosari, dan Kecamatan Watukumpul.

Sedangkan kawasan resapan air yang merupakan kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pangisian air bumi (aquifer) dengan kriteria :

- a) kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan;
- b) curah hujan tinggi, memiliki aquifer tebal, struktur tanah mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Luas kawasan resapan air di wilayah Kabupaten Pemalang adalah 1.250 hektar, meliputi Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Belik, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Moga, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Warungpring, dan Kecamatan Watukumpul.

2. Kawasan Perlindungan setempat

Kawasan Perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air dan ruang terbuka hijau. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dengan luas luas 109,85 Ha, meliputi Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, dan Kecamatan Ulujami.

Adapun Ruang Terbuka Hijau (RTH) bisa merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH di wilayah Kabupaten Pemalang adalah 5,051 Ha meliputi Alun-alun Kabupaten Pemalang, Lapangan Sirandu, Taman/ Lapangan

Mulyoharjo, Taman Segitiga Terminal, Kawasan Hutan Jati, Rest Area Tugu Kepiting, dan Taman Patih Sampun.

3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas agar alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan muara sungai (estuari), dan kawasan pantai berhutan bakau. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami meliputi :

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Luasnya di wilayah Kabupaten Pemalang adalah 0,98 hektar, meliputi Kecamatan Pemalang, Kecamatan Petarukan, dan Kecamatan Ulujami.

4. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas :

a) Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi tersebar di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan dan Ulujami.

b) Kawasan rawan banjir tersebar di Kecamatan Comal, Kecamatan Pemalang, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Taman dan Kecamatan Ulujami;

c) Kawasan rawan kekeringan tersebar di Kecamatan Pulosari dan Belik.

d) Kawasan rawan angin topan tersebar di Kecamatan Belik, Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Bantarbolang, dan Kecamatan Ampelgading;

e) Kawasan rawan tanah longsor tersebar di Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Belik, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Moga, Kecamatan Randudongkal, dan sepanjang alur Daerah Aliran Sungai (DAS) Comal.

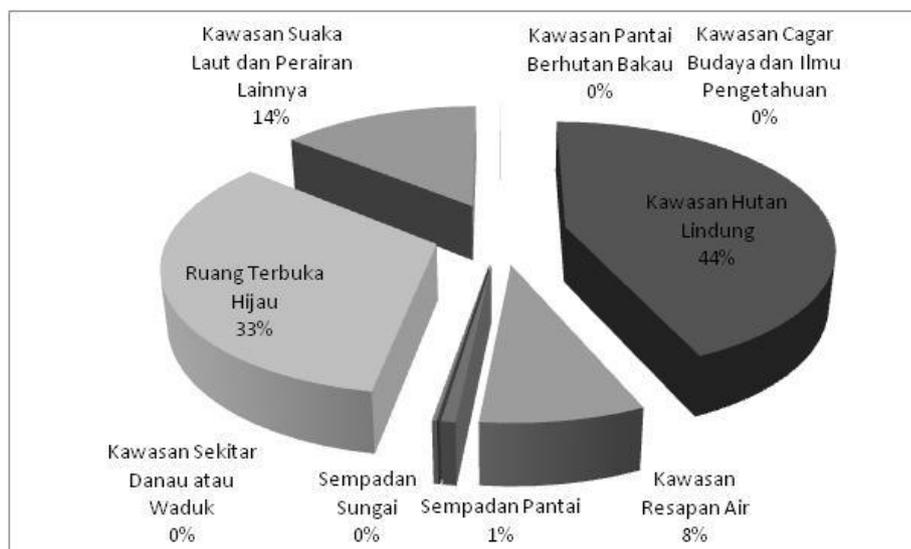
f) Kawasan rawan letusan gunung berapi

Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi,yaitu :

(1) wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau

- (2) wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.
 - g) Kawasan rawan letusan gunung berapi di wilayah Kabupaten Pemalang tersebar di Kecamatan Pulosari dan Belik. .
 - h) Kawasan rawan bencana lainnya berupa kawasan rawan petir dan kawasan rawan kebakaran.
5. Kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan imbuhan air meliputi kawasan resapan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Pekalongan-Pemalang dan CAT Lebaksiu.
 6. Kawasan lindung lainnya terdiri dari kawasan perlindungan plasma nutfah.

Penetapan kawasan lindung pada suatu wilayah dimaksudkan untuk memberikan batasan atau limitasi kegiatan budidaya di dalam kawasan. Luasan kawasan lindung di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 1** dan grafik berikut.



Sumber : Bappeda Kabupaten Pemalang - Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang RTRW

Gambar 3. 1 Luas Kawasan Lindung Berdasarkan Rtrw Dan Tutupan Lahannya Tahun 2017

3.1.2. Penggunaan Lahan Utama di Kabupaten Pemalang

Lahan, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah, adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Lahan merupakan sumberdaya pembangunan yang memiliki karakteristik unik, yakni :

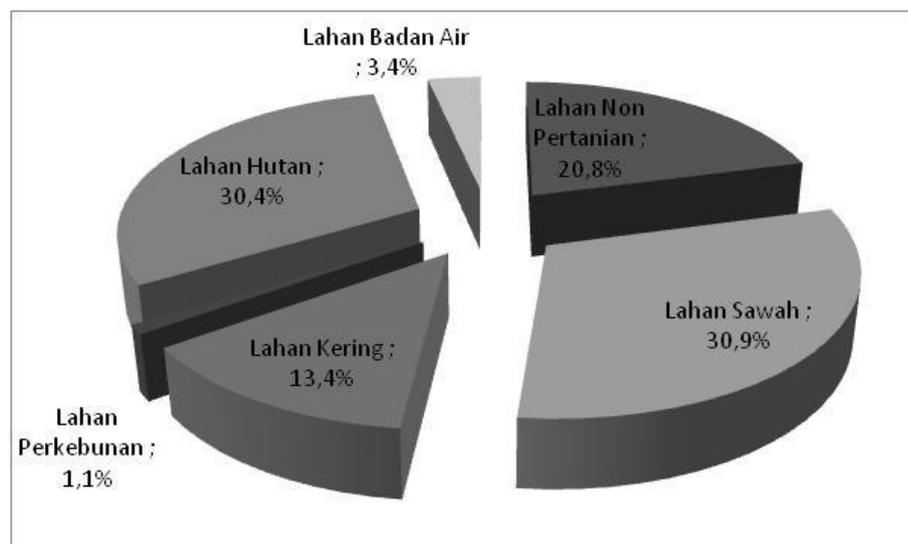
- a. Luas relatif tetap karena perubahan luas akibat proses alami (sedimentasi) dan proses artifisial (reklamasi) sangat kecil.
- b. Memiliki sifat fisik (jenis batuan, kandungan mineral, topografi, dsb.) dengan kesesuaian dalam menampung kegiatan masyarakat yang cenderung spesifik.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi lahan maka diperlukan tata guna lahan, yaitu pengarahan penggunaan lahan sesuai kebutuhan manusia dan atau kebijakan untuk memperoleh manfaat yang optimal secara berkelanjutan. Dalam tata guna lahan juga terkandung makna menempatkan tiap kegiatan pada bagian lahan yang berkemampuan sesuai dengan kegiatan tersebut. Oleh karena itu terdapat dua pengukuran penting dalam analisis sumberdaya lahan, yaitu kemampuan lahan dan kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan merupakan spesifikasi kemampuan lahan, khususnya kecocokan suatu jenis lahan tertentu untuk suatu macam penggunaan tertentu pula. Idealnya, tingkat kesesuaian lahan merupakan imbalan kemanfaatan lahan dan daya dukung lahan.

Tejoyuwono (1991) mengilustrasikan kemampuan dan kesesuaian lahan dalam pengertian daya dukung, dimana dari perbandingan antara daya dukung lahan (*supply*) dan nilai kemanfaatannya (*demand*) dapat dinilai kelayakannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara daya dukung lahan dan kemanfaatannya maka dapat mengakibatkan ketidakefisienan yang berarti daya dukung telah terlampaui atau tidak efektif, karena tingkat kemanfaatannya masih jauh di bawah kemampuan daya dukung lahannya.

Kemampuan lahan adalah kapasitas suatu lahan untuk memproduksi (Yudono dkk., 2006). Kemampuan ini sering diartikan sebagai potensi lahan untuk penggunaan pertanian secara umum dengan kemampuan produksi dari tanah tersebut yang didasarkan pada fakta-fakta iklim, drainase dan kemiringan.

Klasifikasi kemampuan lahan merupakan penilaian lahan secara sistematis dan pengelompokkannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat – sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari (Arsyad, 2006). Sesuai dengan sifat dan faktor-faktor pembatas yang ada, tiap – tiap lahan mempunyai daya guna yang berbeda antara satu lahan dengan lahan lainnya. Pada penentuan kemampuan lahan, sifat, dan faktor pembatas yang dipakai adalah yang menentukan dan mempengaruhi mudah tidaknya suatu lahan menjadi rusak jika lahan tersebut dijadikan suatu usaha pertanian. Langkah klasifikasi kemampuan lahan agar tanah dapat digunakan dengan tepat adalah dengan menyelidiki dan mengumpulkan data tentang sifat – sifat tanah dan faktor pembatas yang diperlukan. Kemudian berdasarkan data tersebut ditentukan kombinasi antara pemakaian lahan dan konservasi lahan dengan mengijinkannya untuk pemakaian usaha pertanian yang paling intensif yang tidak menimbulkan kerusakan lahan. Dengan demikian semua lahan yang termasuk dalam suatu kelompok tentunya akan mempunyai kepekaan yang sama terhadap kerusakan. Luasan wilayah menurut penggunaan lahan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 2** dan grafik berikut ini.



Sumber: Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang, 2017.

Gambar 3. 2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama Tahun 2017

Luas wilayah di Kabupaten Pemalang yang mempunyai luasan terbesar adalah luas sawah, seluas 35.093,68 ha (30,9%), selanjutnya luas hutan seluas 34.523,48 ha (30,4%), lahan non pertanian seluas 23.643,29 ha (20,8%), lahan

kering seluas 15.218,9 ha (13,4%), badan air seluas 3.823,45 ha (3,4%) dan perkebunan seluas 1.194,01 ha (1,1%).

Berdasarkan Prosentase Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama di atas, terdapat peningkatan penggunaan lahan non pertanian yang bersumber dari penurunan penggunaan lahan untuk sawah. Peningkatan penggunaan lahan non pertanian disebabkan oleh banyak hal namun yang paling sering terjadi yaitu karena adanya aktivitas pembangunan untuk pemukiman maupun fasilitas-fasilitas umum. Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian memang prakteknya cukup marak di Kabupaten Pemalang. Pemerintah Daerah kabupaten Pemalang tetap menempatkan prioritas lahan pertanian agar Kabupaten Pemalang tetap menjadi lumbung padi nasional sehingga dapat berkontribusi dalam ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang.

3.1.3. Hutan

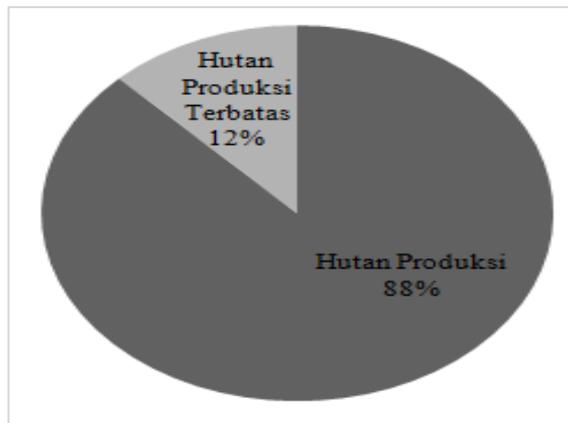
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menetapkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai kawasan hutan . Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pengelolaan hutan negara di wilayah Kabupaten Pemalang dikelola oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pemalang, BKPH Moga, BKPH Randudongkal. Berdasarkan informasi Perhutani tahun 2017, batasan wilayah hutan tidak berdasarkan wilayah administratif. Luas secara keseluruhan hutan produksi 32.996,51 ha, hutan lindung 5.438,30 ha, cagar alam 0,70 ha dan hutan negara 8.880,30 ha. KPH Pemalang memiliki letak geografis antara 8°52'30" Lintang Selatan - 7°20'00" Lintang Selatan dan 109°17'30" Bujur Timur – 109°40'30" Bujur Timur. Batas Wilayah Hutan KPH Pemalang meliputi :

- Utara : Kab. Pemalang
- Timur : Kab. Pekalongan & KPH Pekalongan Timur

- Selatan : Kab. Pemalang, KPH Pekalongan Timur & KPH Pekalongan Barat
- Barat : Kab. Tegal & KPH Pekalongan Barat

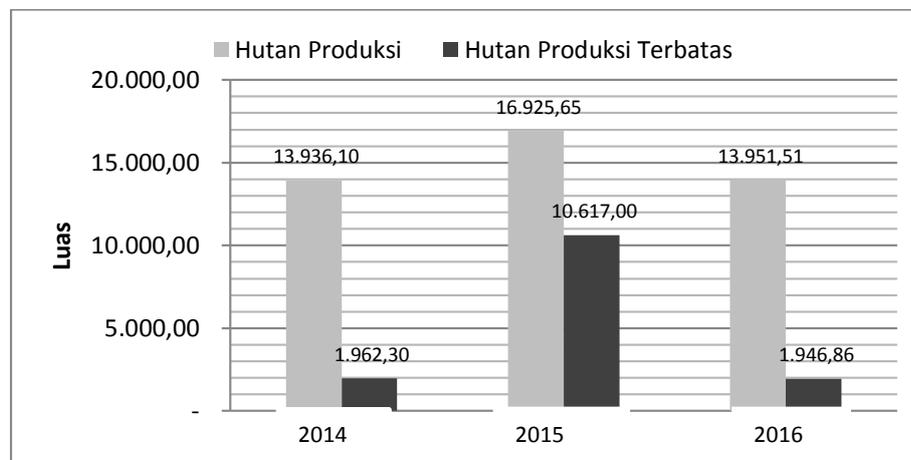
Luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 adalah 15.898,37 Ha. Kawasan hutan tersebut dibedakan menurut fungsi/statusnya yang terdiri dari hutan produksi seluas 13.951,51 Ha dan 1.946,86 sebagai hutan produksi terbatas. Luas total 15.898,37 Ha. Luas kawasan hutan menurut fungsi/status di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 3** dan grafik berikut.



Sumber: Perhutani KPH Kabupaten Pemalang, 2017

Gambar 3. 3 Prosentase Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status Tahun 2017

Berdasarkan data IKPLHD Kabupaten Pemalang tahun 2016, luasan kawasan hutan Kabupaten Pemalang dari tahun data 2014 ke tahun 2016 mengalami perubahan. Perkembangan luasan kawasan hutan di Kabupaten Pemalang berdasarkan dokumen IKPLHD Tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut.



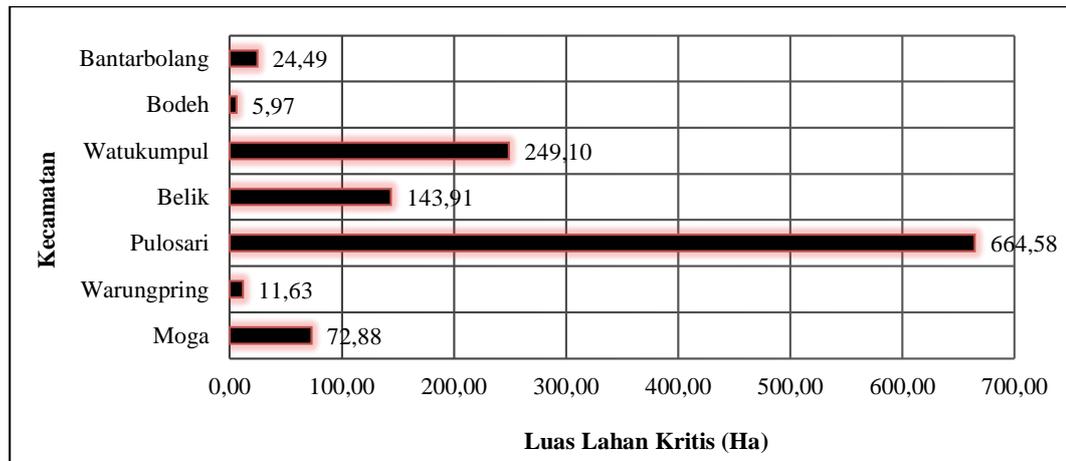
Sumber: IKPLHD, Kabupaten Pemalang 2016

Gambar 3. 4 Grafik Kecenderungan Luasan Kawasan Hutan Tahun 2016

3.1.4. Lahan Kritis

Lahan kritis, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan. Kabupaten Pemalang tidak mempunyai luasan lahan dengan kategori sangat kritis. Luasan lahan kritis di Kabupaten Pemalang tersebar di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Lahan yang bertatus kritis di dalam kawasan hutan mencapai 4,3 Ha. Luasan lahan kritis di tahun 2017 ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pendataan di tahun 2016. Secara rinci luas lahan kritis Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 4**.

Berdasarkan Data IKPLHD tahun 2016, luas lahan kritis Kabupaten Pemalang berada di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Moga, Warungpring, Pulosari, Belik, Watukumpul, Bodeh dan Bantarbolang. Perkembangan luas lahan kritis Kabupaten Pemalang berdasarkan dokumen IKPLHD 2016 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: IKPLHD Kabupaten Pemalang, 2016

Gambar 3. 5 Grafik Kecenderungan Luas Lahan Kritis Tahun 2016

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, untuk memulihkan fungsi tanah pada lahan kritis dalam kawasan budi daya dilaksanakan dengan metode vegetatif, agronomi dan/atau sipil teknik pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air. Sementara untuk pemulihan fungsi tanah pada lahan kritis dalam kawasan lindung dilaksanakan dengan metode vegetatif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengatur bahwa rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis,

terutama yang terdapat di bagian hulu daerah aliran sungai, agar fungsi tata air serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal.

Perhutani KPH Pemalang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Kehutanan telah melakukan indentifikasi lahan kritis di wilayah Kabupaten Pemalang. Dengan teridentifikasinya lahan kritis dan potensi kritis di Kabupaten Pemalang maka dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah kebijakan dalam penanganan rehabilitasi lahan yang lebih tepat diantaranya dengan penanaman tanaman keras melalui program penghijauan. Upaya-upaya perbaikan lahan dilakukan dengan melakukan kegiatan rehabilitasi dari berbagai dukungan sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan untuk pemulihan lahan kritis. Namun demikian masih terdapat faktor penghambat antara lain kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam usaha melestarikan lahan, keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang mampu menangani pengelolaan lahan serta faktor alam yang dapat mendukung keberhasilan program penanganan lahan kritis.

3.1.5. Kerusakan Tanah

Kerusakan tanah untuk produksi biomassa, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang, berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa. Kriteria baku kerusakan tanah nasional untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman meliputi kriteria baku kerusakan tanah akibat erosi air, di lahan kering dan di lahan basah. Setiap daerah diharapkan untuk menetapkan kriteria baku kerusakan tanah daerah yang sama atau lebih ketat daripada kriteria baku kerusakan tanah nasional. Kriteria baku kerusakan tanah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Kondisi kerusakan tanah di Kabupaten Pemalang salah satunya disebabkan karena adanya erosi air. Pada tahun 2016 ,kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi terjadi pada tanah dengan ketebalan 20 - < 50 cm dengan besaran erosi

162,890 mm/10 tahun, 50 - < 100 cm dengan besaran erosi 152,227 mm/10 tahun, dan 100 – 150 cm dengan besaran erosi 199,675 mm/10 tahun. Ketiga kerusakan lahan di tanah kering tersebut berstatus melebihi dari ambang batas kritis erosi. Namun pada Tahun 2017, belum dilakukan pendataan sehingga masih belum didapatkan data terkini (Lampiran **Tabel 5**) yang secara rinci memperlihatkan evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air di Kabupaten Pemalang.

Kerusakan tanah di Kabupaten Pemalang tidak hanya disebabkan oleh erosi air namun juga kerusakan tanah di lahan kering. Kriteria baku kerusakan tanah dibagi menjadi dua golongan, yaitu kriteria kerusakan untuk lahan basah dan kering. Lahan kering di Kabupaten Pemalang seluas 714,15 Ha. Sama halnya pada evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air, pada tahun 2017 juga belum dilaksanakan pendataan secara rinci (Lampiran **Tabel 6**) pada parameter terkait evaluasi kerusakan tanah di lahan kering.

Pada tahun 2014, tanah di Desa Tundagan, Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang masuk dalam kategori rusak ringan. Evaluasi kerusakan tanah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang bekerjasama dengan Universitas Negeri Surakarta (UNS). Setelah kerjasama selesai belum ada dilakukan lagi evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air dan kerusakan tanah di lahan kering. Berdasarkan hasil pengamatan di atas diperlukan tindak lanjut dari evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air dan kerusakan tanah di lahan kering karena status kerusakan tanah yang melebihi dari kriteria baku kerusakan tanah.

Selain lahan kering terdapat pula lahan basah. Lahan basah berupa lahan yang selalu terendam, seperti halnya lahan gambut maupun lahan rawa. Kabupaten Pemalang tidak memiliki lahan berjenis gambut maupun rawa sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi kerusakan pada lahan basah (Lampiran **Tabel 7**).

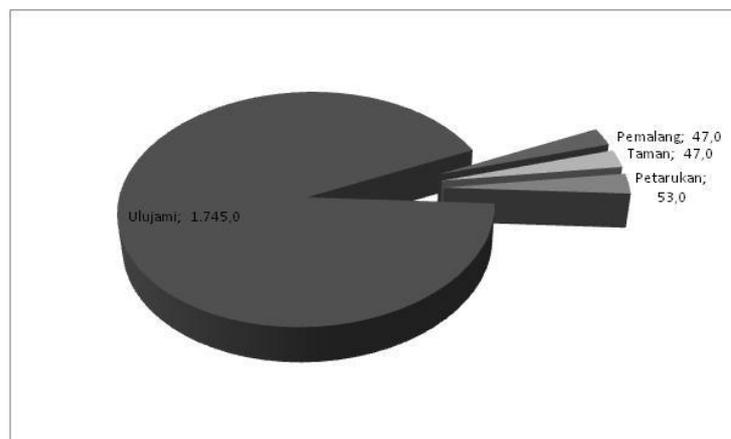
3.1.6. Laut, Pesisir dan Pantai

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis

dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Wilayah Pesisir, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten tidak memiliki kewenangan lagi terhadap bidang kelautan dan kehutanan. Saat ini, pengelolaan bidang kelautan dan kehutanan di Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Pemalang mempunyai potensi lingkungan hidup dari laut, pesisir dan pantai yang salah satunya berupa luas dan kerapatan tutupan mangrove. Tabel tersebut menunjukkan bahwa luas lokasi hutan mangrove terluas ada di Kecamatan Ulujami, dimana sebagian besar wilayah Kecamatan Ulujami merupakan daerah pesisir pantai. Rata-rata persentase tutupan pada kisaran 5 s/d 25 % dan kerapatan (pohon/Ha) pada kisaran 100 sampai dengan 400. Secara rinci luas dan kerapatan tutupan mangrove di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 8**.



Sumber : Badan Pengelolaan Hutan Wilayah V, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 3. 6 Luas Tutupan Mangrove Tahun 2017

Padang lamun adalah ekosistem perairan dangkal yang didominasi oleh lamun. Pada ekosistem ini banyak ragam biota yang hidup berasosiasi dengan lamun. Kabupaten Pemalang belum pernah melakukan pendataan terkait luas dan kerusakan padang lamun di wilayah perairannya (Lampiran **Tabel 9**).

Terumbu karang secara umum dapat dinisbatkan kepada struktur fisik berupa ekosistem yang menyertainya yang secara aktif membentuk sedimen kalsium karbonat akibat aktivitas biologi (biogenik) yang berlangsung di bawah permukaan laut. Luasan terumbu karang dan tingkat kerusakannya belum pernah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Lampiran **Tabel 10**, tetapi, berdasarkan informasi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Kabupaten Pemalang terkait dengan luasan terumbu karang di Kabupaten Pemalang, dapat diketahui luas terumbu karang di Kabupaten Pemalang yang teridentifikasi seluas kurang lebih 1,98 ha.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka inventarisasi terumbu karang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

3.1.7. Perubahan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan merupakan peralihan dari penggunaan lahan tertentu menjadi penggunaan lainnya. Proses penggunaan lahan yang dilakukan manusia dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Wilayah Kabupaten Pemalang mengalami perubahan penggunaan lahan akibat meningkatnya kebutuhan lahan untuk menampung seluruh aktivitas manusia. Kebutuhan pokok manusia yaitu sandang, pangan dan papan menyebabkan perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Pemalang.

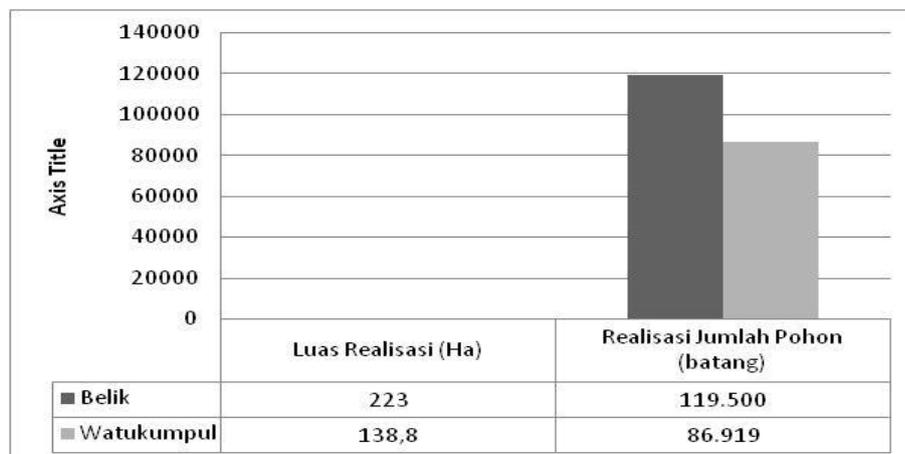
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2017, dapat diketahui luasan permukiman seluas 11.908,19 ha, industri seluas 31,66 ha, perkebunan seluas 1.194,01 ha, sawah seluas 35.093,68 ha, pertanian lahan kering seluas 25.218,90 ha dan perikanan seluas 2.365,93 ha. Selengkapnya mengenai tabel luas

perubahan penggunaan lahan dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 11**. Sedangkan untuk jenis pemanfaatan lahan dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 12**.

Salah satu jenis pemanfaatan lahan adalah pertambangan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Pemalang telah memberikan rekomendasi izin lingkungan terhadap beberapa usaha pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Pemalang. Rekomendasi izin lingkungan tersebut hanya bisa didapatkan apabila telah menyelesaikan persyaratan perizinan yang diperlukan yaitu dokumen UKL-UPL. Terdapat 29 area potensi pertambangan di Kabupaten Pemalang yang telag mendapatkan perijinan penambangan. Luas areal pertambangan seluas 186,31 ha. Selengkapnnya mengenai data luas areal dan produksi pertambangan yang telah memiliki rekomendasi izin lingkungan dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 13**.

3.1.8. Reboisasi dan Penghijauan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa kegiatan reboisasi dan penghijauan merupakan bagian rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan hutan, sedangkan kegiatan penghijauan dilaksanakan di luar kawasan hutan. Seiring dengan masifnya perubahan penggunaan lahan dan kerusakan lahan di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang telah melakukan upaya perbaikan lingkungan yaitu dengan melakukan reboisasi dan penghijauan. Data realisasi kegiatan reboisasi dan penghijauan dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 14** dan grafik berikut.



Sumber : Badan Pengelolaan Hutan Wilayah V dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 3. 7 Realisasi Kegiatan Penghijauan Dan Reboisasi Tahun 2017

Pendataan yang dilakukan pada tahun 2017, di 2 (dua) kecamatan yaitu Belik dan Watukumpul dilakukan reboisasi dengan luas total 361,8 ha dengan jumlah pohon yang ditanam sebanyak 206.419 batang. Reboisasi dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga fungsi ekologis suatu kawasan.

3.1.9. Analisis *State*, *Pressure*, dan *Response* Tata Guna Lahan di Kabupaten Pemalang

3.1.9.1. Analisis *State*

Penggunaan lahan di Kabupaten Pemalang mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan lahan terbangun sehingga mengurangi luasan lahan non terbangun. Kebutuhan lahan yang terus mengalami peningkatan adalah kebutuhan lahan untuk fungsi permukiman, hal ini dikarenakan dampak adanya peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, di Kabupaten Pemalang juga terdapat lahan kritis di Kecamatan Bantarbolang. Lahan kritis tersebut berada di kawasan hutan produksi.

3.1.9.2. Analisis *Pressure*

Tekanan tata guna lahan yang paling utama terjadi akibat adanya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Pada tahun 2017 ini, pertumbuhan penduduk rata-rata kabupaten mencapai 0,34%. Pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Bantarbolang dan Randudongkal yang mencapai 0,40%. Selain akibat peningkatan jumlah penduduk, pola pikir masyarakat yang ingin meningkatkan produktifitas lahannya melalui perubahan fungsi lahan juga memberikan tekanan terhadap perubahan alih fungsi lahan. Hal ini terjadi pada wilayah-wilayah yang cukup strategis dari sisi ekonomi, seperti pada kawasan disepanjang koridor jalan.

3.1.9.3. Analisis *Response*

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah dengan membuat beberapa strategi, salah satunya berkaitan dengan penggunaan lahan. Strategi tersebut antara lain: perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan, penetapan fungsi

lindung kawasan, pengendalian alih fungsi lahan melalui penerapan Perda RTRW Kabupaten Pemalang. Selain itu, beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam upaya mengatasi permasalahan tata guna lahan antara lain :

1) Kehutanan

Program rehabilitasi hutan dan lahan dengan kegiatan luasan lahan kritis yang direhabilitasi. Beberapa kegiatan lain yang diusulkan adalah :

- a) Pengembalian fungsi hutan.
- b) Perlindungan mata air.
- c) Pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
- d) Pembinaan masyarakat yang ada di sekitar kawasan cagar alam.
- e) Pendampingan kepada masyarakat dalam pengembangan usaha produksi bagi masyarakat di sekitar hutan.
- f) Pengembangan plasma nutfah yang berpotensi dalam upaya konservasi sumberdaya air.
- g) Pengembangan Kawasan hutan mangrove yang berada di desa Mojo menjadi kawasan ekosistem esensial mangrove.

2) Lingkungan Hidup

- a) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan; dan penanaman tanaman unggulan lokal daerah/tanaman lokal.
- b) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan kegiatan luas RTH publik kawasan perkotaan dan luas RTH privat kawasan perkantoran.
- c) Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
- d) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan Cadangan SDA

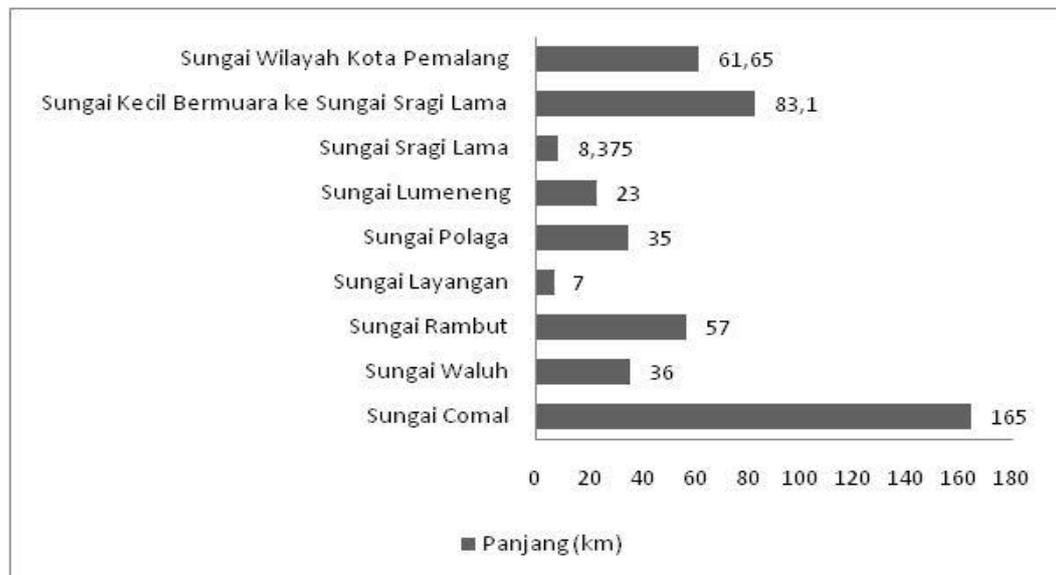
3) Pertanahan

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

3.2. KUALITAS AIR

3.2.1. Sungai

Sungai, berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai, adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari ulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai di Kabupaten Pemalang meliputi sungai besar, sungai sedang, dan sungai kecil. Sungai dalam klasifikasi sungai besar yaitu Sungai Comal dengan debit maksimal 1102,319 m³/detik, Sungai Waluh dengan debit maksimal 35,325 m³/detik, Sungai Rambut, dan Sungai Layangan. Selain itu, ada 3 (tiga) sungai yang termasuk dalam klasifikasi sungai sedang yaitu Sungai Polaga, Sungai Lumeneng, dan Sungai Sragi Lama. Sedangkan sungai kecil meliputi anak Sungai Comal, anak Sungai Waluh, anak Sungai Rambut, Sungai Kecil bermuara ke Sungai Sragi Lama, dan sungai wilayah Kota Pemalang. Inventarisasi sungai secara rinci dapat dilihat Lampiran **Tabel 15** dan grafik panjang sungai berikut ini.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, 2017

Gambar 3. 8 Panjang Sungai di Kabupaten Pemalang

3.2.2. Danau/Waduk/Situ/Embung

Selain sungai, potensi sumberdaya air di Kabupaten Pemalang juga dapat dilihat dari adanya danau/waduk yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan

untuk pengairan sawah atau irigasi. Kabupaten Pemalang memiliki 39 embung yang tersebar di berbagai kecamatan. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan limpasan serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan dan peternakan terutama pada saat musim kemarau. Embung merupakan cekungan yang dalam di suatu daerah perbukitan. Air embung berasal dari limpasan air hujan yang jatuh di daerah tangkapan. Embung juga dapat diartikan sebagai bangunan penyimpan air yang dibangun di daerah depresi, biasanya di luar sungai. Luas Genangan (m^3) pada masing-masing embung dapat dilihat pada tabel, sedangkan data terkait luas embung (Ha) dan volumenya (m^3) perlu dilakukan studi kembali untuk mengukur luas genangan dan volume dari tiap embung. Danau/Waduk/Situ/Embung terdapat di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Moga : Tuk Wungu, Bengkok/Mandiraja, Tuk Suci, Jagel, Tegal Salam
- b. Kecamatan Pulosari : Bawangan/Penakir, Pagenteran, Cikuwung (kiri), Cikuwung (kanan), Cikunang, Sarangan, Pasamoan, Tuk Kedondong, Cikendung
- c. Kecamatan Belik : Pagengan, Telaga Gede, Tuk Tembok, Tuk Gesing, Lubang Warak, Tuk Mangli, Tuk Kali Singit
- d. Kecamatan Watukumpul : Telaga Jendul, Telaga Rengganis, Mentek, Gamping, Jurang, Ringin, Cempaka, Pejarakan
- e. Kecamatan Bodeh : Karangbrai
- f. Kecamatan Bantarbolang : Rancah, Paguyangan
- g. Kecamatan Pemalang : Mengori, Pelutan
- h. Kecamatan Taman : Danayasa, Kali Gelang, Ponowaren
- i. Kecamatan Ampelgading : Cibiyuk, Tegalsari Barat

Selengkapnya hasil inventarisasi danau/waduk/situ/embung dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 16**.

3.2.3. Kualitas Air Sungai

Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,

menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan pemukiman penduduk di sepanjang daerah aliran sungai. Pemukiman di daerah aliran sungai biasanya tampak kumuh dan tidak sehat sebagai tempat tinggal. Pemukiman di daerah aliran sungai juga menimbulkan timbulan sampah di sungai yang mengakibatkan air sungai menjadi tercemar. Penduduk yang tinggal di sekitar sungai juga memanfaatkan air sungai untuk aktivitas sehari-hari.

Tidak hanya penduduk yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai yang menyumbang pencemaran terhadap air sungi namun juga penduduk yang tinggal di daerah yang jauh dari sungai yaitu dengan membuang air limbah domestik ke saluran air yang bermuara di sungai tanpa melakukan pengolahan air limbah terlebih dahulu. Pencemaran air sungai telah berlangsung secara masif dan terus menerus tentu saja menyebabkan penurunan kualitas air sungai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan. Pengelolaan sungai yang dimaksud meliputi konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak air sungai.

Pada tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup telah mengirimkan sampel air Sungai Comal dan Waluh kepada laboratorium terkreditasi yaitu Balai Pengujian dan Pemeriksaan Lingkungan Hidup (BPL2H) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel masing-masing dilakukan di enam titik di Sungai Comal dan Waluh. Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 13 September 2016 dan lama pengujian di laboratorium sekitar satu bulan. Hasil pengujian yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa pada keduabelas sampel yang diuji parameter mikrobiologi yaitu *Total Coliform* dan *Fecal Coliform* dengan konsentrasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa di sepanjang aliran Sungai Comal dan Waluh terdapat limbah aktivitas domestik yang mencemari kedua sungai. Selengkapnya mengenai kualitas air sungai dari hasil pengujian sampel air Sungai Waluh dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL III. 1 KUALITAS AIR SUNGAI TAHUN 2016

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (oC)	Residu terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)
1.	Waluh	a. Ds. Rembul Kec. Randudongkal	13/09/2016	25	74,5	8	8,1	-	74,5	8	9,7	0,1	<25	0,007	0,6
		b. Ds.Glandang Kec. Bantarbolang	13/09/2016	24	96,5	30	8,3	-	96,5	30	9,5	0,1	<25	0,01	1,2
		c. Ds.Lenggerong Kec. Bantarbolang	13/09/2016	25	116	26	8,1	-	116	26	9,1	0,8	<25	0,009	1,1
		d. Kel. Beji Kec. Taman	13/09/2016	26	104	23	7,6	-	104	23	8,9	0,6	<25	0,031	1,2
		e. Ds. Asemdayong Kec. Taman	13/09/2016	26	259	16	7,1	-	259	16	9,4	0,5	<25	0,043	1,3
		f. Kel. Beji Kec. Taman	13/09/2016	26	123	23	7,2	-	123	23	9,1	0,5	<25	0,048	1,3

Lanjutan Tabel III.1

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000)	Total coliform (jmlh/1000)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
1.	Waluh	a. Ds. Rembul Kec. Randudongkal	13/09/2016	-	0,07	0,05	-	4500	55	8000	24200	<0,001	0,012
		b. Ds.GlandangKec. Bantarbolang	13/09/2016	-	0,08	0,01	-	750	44	5100	27800	0,001	0,014
		c. Ds.Lenggerong Kec. Bantarbolang	13/09/2016	-	0,08	0,15	-	1500	34	4700	19500	0,001	0,014
		d. Kel. Beji Kec. Taman	13/09/2016	-	0,09	0,1	-	2500	36	800	10000	0,002	0,015
		e. Ds. Asemdayong Kec. Taman	13/09/2016	-	0,11	0,13	-	500	39	10100	39600	0,006	0,014
		f. Kel. Beji Kec. Taman	13/09/2016	-	0,09	0,12	-	3750	51	14900	52200	0,001	0,013

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2016

Keterangan : 1. Mengacu pada PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

2. (-) : Parameter tidak dipersyaratkan

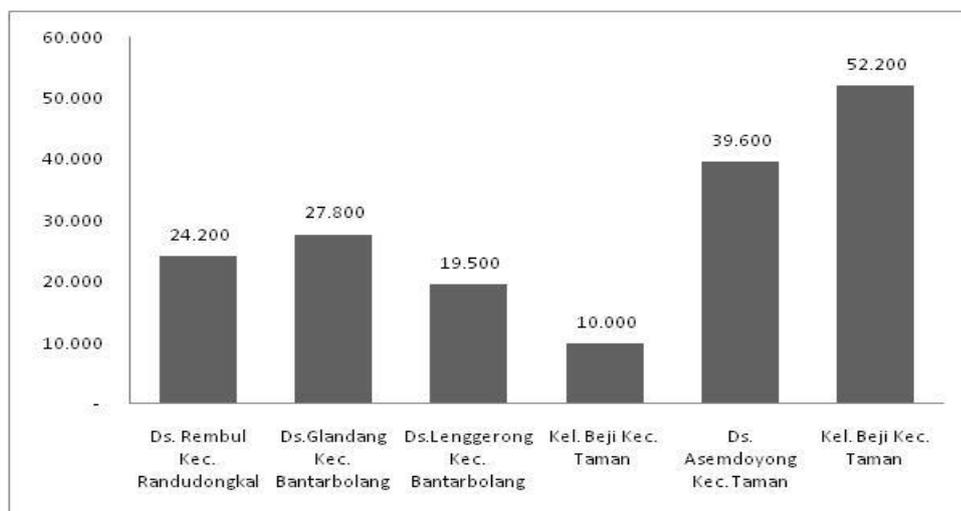
3. (-) : Parameter tidak dianalisis

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang melanjutkan kegiatan pengendalian dan pengelolaan kualitas air sungai di Kabupaten Pemalang pada tahun 2017. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara mengambil sampel air sungai yang ada di Kabupaten Pemalang yaitu Sungai Waluh. Sampel air diambil di enam titik di sepanjang aliran Sungai Waluh pada tanggal 7 Maret 2017. Air sampel kemudian diujikan di Laboratorium BPL2H di Semarang. Pengujian

kualitas air sungai yang dilakukan meliputi pengujian parameter fisika, kimia anorganik, kimia organik, dan mikrobiologi. Hasil pengujian kualitas air sungai dapat pada tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 17**.

Berdasarkan hasil uji kualitas air sungai dapat diketahui beberapa hal terkait kualitas air sungai Kabupaten Pemalang Tahun 2017. Pada tabel menunjukkan *Total Coliform* dan *Fecal Coliform* di Sungai Waluh melebihi baku mutu. Konsentrasi tinggi dari bakteri *coli* tersebut menunjukkan bahwa air sungai telah tercemar oleh akibat aktivitas domestik. Air Sungai Waluh tidak dapat dimanfaatkan untuk air minum karena dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia maupun hewan.

Pengujian terhadap konsentrasi bakteri *Total Coliform* dan *Fecal Coliform* menunjukkan adanya bakteri patogen dalam sampel air Sungai Waluh. Secara diagramatis perbandingan konsentrasi *Total Coliform* di Sungai Waluh pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat sebagai berikut.



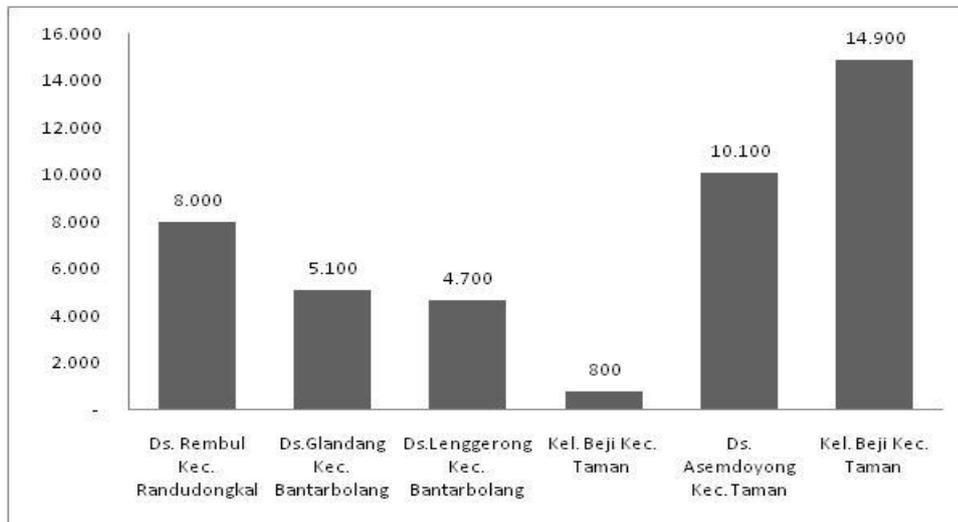
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2017

Gambar 3. 9 Diagram Perbandingan Konsentrasi *Fecal Coliform* di Sungai Waluh

Total Coliform adalah bakteri yang dapat ditemukan di lingkungan tanah dan air yang telah terpengaruh oleh air permukaan serta limbah pembuangan kotoran manusia dan hewan.

Selain bakteri *Total Coliform* terdapat pula bakteri *Fecal Coliform*. *Fecal Coliform* merupakan kelompok bakteri *Total Coliform* yang pada umumnya terdapat secara spesifik dalam saluran usus dan feses hewan berdarah panas. Sumber *Fecal Coliform* lebih spesifik daripada *Total Coliform* maka pengujian

Fecal Coliform dianggap sebagai indikasi yang lebih akurat terhadap adanya kontaminasi limbah kotoran hewan atau manusia daripada pengujian *Total Coliform*. Secara diagramatis konsentrasi *Fecal Coliform* di Sungai Waluh pada tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2017

Gambar 3. 10 Diagram Konsentrasi *fecal Coliform* di Sungai Waluh

Contoh bakteri *Fecal Coliform* adalah *Esherichia coli*. Keberadaan *E. Coli* dalam air dapat menjadi indikator adanya pencemaran air oleh tinja karena *E. Coli* secara normal hanya ditemukan di saluran pencernaan manusia atau hewan mamalia atau bahan yang telah terkontaminasi dengan tinja manusia atau hewan. Air yang telah terkontaminasi oleh bakteri *Fecal Coliform* dianggap berbahaya bagi penggunaan domestik.

Hasil pengujian tersebut di atas perlu dilakukan tindak lanjut dalam mengatasi penurunan kualitas air sungai. Salah satu yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran penduduk terutama yang tinggal di daerah aliran sungai untuk selalu menjaga kebersihan air sungai dan tidak menggunakan air sungai untuk kebutuhan domestik.

3.2.4. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung

Air embung pada umumnya digunakan untuk pengairan tanaman di musim kemarau. Dengan menjamin adanya pengairan di musim kemarau maka produktivitas lahan, masa pola tanam dan pendapatan petani di lahan tadah hujan akan tercapai. Sampai saat ini, kualitas air embung belum mendapatkan perhatian

untuk diujikan di Kabupaten Pemalang (Lampiran **Tabel 18**). Dengan adanya pengujian terhadap air tersebut, hasil yang didapatkan nantinya akan menjadi acuan dalam penentuan kebijakan pengelolaan kualitas air danau/waduk/situ/embung.

3.2.5. Kualitas Air Sumur

Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, masih ada masyarakat di Kabupaten Pemalang yang memanfaatkan air sumur sebagai sumber air minum dan aktivitas lainnya. Seiring dengan perubahan kondisi lingkungan maka pengujian kualitas air sumur perlu dilakukan. Dengan mengetahui kualitas air sumur yang digunakan oleh masyarakat akan dapat dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan untuk pengelolaan kualitas air. Air sumur yang telah diambil sampel dan diuji oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2016 terdapat di tiga titik di Desa Kemandungan, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Ketiga titik tersebut merupakan sumur milik warga yaitu milik Bapak Slamet, Ibu Dewi dan Bapak Nauvva. Berikut disajikan hasil pengujian dari sampel air sumur tersebut.

TABEL III. 2 KUALITAS AIR SUMUR TAHUN 2016

No	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Kekeruhan	Kesadanan (Mg/L)	Nitrat, sebagai NO ₃ (Mg/L)	Nitrit, sebagai NO ₂ (mg/L)	pH (mg/L)	MPN (Golongan Coliform) Jumlah per 100 ml
1	Bp. Slamet	23/08/2016	27	572	1,7	380	2,3	0,6	7	210
2	Ibu Dewi	23/08/2016	27	380	1,65	0	2,3	0	8	210
3	Bp. Nauvva	23/08/2016	27	365	1,65	0	5,6	0	8	27

Sumber : IKPLHD, 2016

Pada tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tidak melakukan pengujian terhadap kualitas air sumur karena keterbatasan alat untuk mengujikan sampel air sumur Lampiran **Tabel 19**.

3.2.6. Kualitas Air Laut

Air laut adalah air dari laut atau samudera. Air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Air laut memiliki kadar garam karena bumi dipenuhi dengan garam mineral yang terdapat di dalam batu-batuan dan tanah. Contohnya natrium, kalium, kalsium, dll. Apabila air sungai mengalir ke lautan, air tersebut membawa

garam. Ombak laut yang memukul pantai juga dapat menghasilkan garam yang terdapat pada batu-batuan. Lama-kelamaan air laut menjadi asin karena banyak mengandung garam.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang kelautan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Oleh karena itu, pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang tidak melakukan pengujian atas kualitas air laut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang sudah pernah melakukan pengujian kualitas air laut pada tahun 2010. Air laut yang dijadikan sampel berasal dari laut di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang. Pengujian tersebut hanya untuk beberapa parameter antara lain : bau, TSS, temperature, pH, BOD dan COD. Selengkapnya mengenai hasil pengujian kualitas air laut dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 20**.

Dari hasil pengujian kualitas air laut, dapat diketahui bahwa kondisi air laut tidak berbau, mempunyai temperatur 30,6°C dan PH 7,26, nilai BOD 3 mg/L, nilai COD >1.500 mg/L dan klor 0,14 mg/L. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas air laut di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang masih baik.

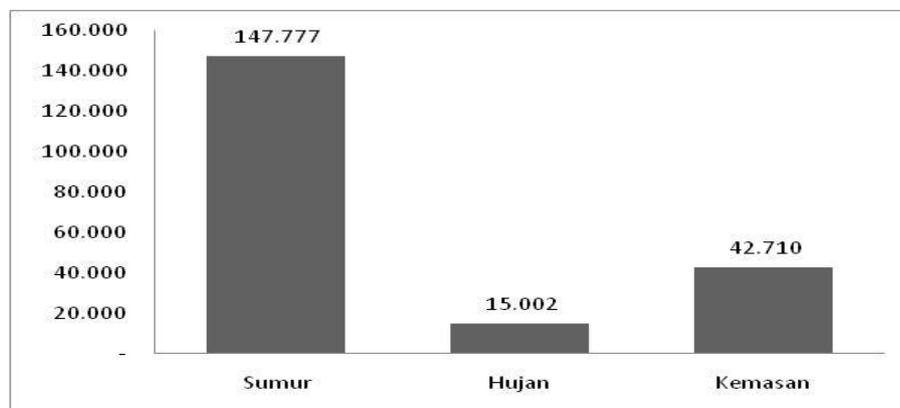
3.2.7. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan

Kondisi iklim di Kabupaten Pematang dapat digambarkan dari adanya akumulasi curah hujan bulanan. Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 1.019 yang menunjukkan bahwa pada bulan Januari adalah musim penghujan, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan November yaitu 0 yang menunjukkan bahwa pada bulan tersebut sama sekali tidak terjadi hujan. Pada bulan Desember belum dilakukan pengukuran curah hujan. Pengukuran

curah hujan dilakukan di Badak Situmpeng dan Kecamatan Moga. Secara rinci akumulasi curah hujan bulanan dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 21**.

3.2.8. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum

Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Manusia menggunakan air salah satunya sebagai air minum. Penduduk di Kabupaten Pemalang memanfaatkan air untuk air minum dan aktivitas sehari-hari. Air yang digunakan sebagai sumber air minum di Kabupaten Pemalang berasal dari berbagai macam sumber. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Pemalang telah memanfaatkan air ledeng sebagai sumber air minum. Jumlah rumah tangga yang memanfaatkan sumur sebagai sumber air sebanyak 147.777 rumah tangga, air hujan sebanyak 15.002 rumah tangga dan air kemasan sebanyak 42.710 rumah tangga. Jumlah rumah tangga yang menggunakan air sumur sebagai sumber air minum terbanyak ada di Kecamatan Comal. Penduduk di Kecamatan Comal menggunakan air sumur dikarenakan tidak adanya sumber mata air maupun sumber air tanah dalam di kecamatan tersebut. Selengkapnya mengenai data jumlah rumah tangga dan sumber air minum dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 22** dan grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pemalang, 2017

Gambar 3. 11 Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2017

Kabupaten Pemalang memiliki mata air yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Moga, Warungpring, Pulosari, Belik, Watukumpul, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, dan Pemalang. Inventarisasi mata air di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL III. 3 INVENTARISASI MATA AIR

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air
1	Moga	32
2	Warungpring	26
3	Pulosari	28
4	Belik	75
5	Watukumpul	34
6	Bodeh	3
7	Bantarbolang	20
8	Randudongkal	2
9	Pemalang	1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, 2015

Beberapa titik mata air yang memiliki potensi cadangan sumber air dengan debit relatif besar diantaranya Mata Air Tlaga Rengganis di Desa Gapura Kecamatan Watukumpul sebesar 2.500 lt/det, Mata Air Jambe di Desa Moga sebesar 2000 lt/det, Mata Air Sirakah dan Mata Air Simaung di Desa Majalangu serta Mata Air Tlaga Gede di Desa Sikasur masing-masing memiliki kapasitas debit sebesar 1.300 lt/det. Mata air dengan debit sebesar 1000 lt/det diantaranya Mata Air Nyata sebesar 1007 lt/det di Desa Pakembangan Kecamatan Warungpring, Mata Air Pete di Desa Gendoang Kecamatan Moga, Mata Air Cempaka Wulung di Desa Banyumudal Kecamatan Moga. Total potensi cadangan debit dari 221 sumber mata air sebesar 24.553 lt/det.

Peruntukan sumber air dari mata air digunakan untuk aktifitas pertanian dan penyediaan air bersih baik yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun oleh penduduk secara swadaya melalui fasilitasi pemerintah desa setempat. Kondisi fisik mata air Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL III. 4 KONDISI FISIK MATA AIR

No	Nama Mata Air	Lokasi		Debit (LT/DT)	Koordinat		Status Kepemilikan Lahan-Kawasan Radius Sekitar Mata Air (200 m)
		Desa	Kecamatan		LS	BT	
1	Sawangan	Wangkelang	Moga	± 500	-	-	Tanah Milik
2	Banyubacin	Wangkelang	Moga	± 400	-	-	Tanah Milik
3	Pete	Gendoang	Moga	± 1000	-	-	Tanah Milik PDAM (Telah dibebaskan PDAM)
4	Brutu	Gendoang	Moga	± 600	-	-	Tanah Milik
5	Ketug	Moga	Moga	± 1000	-	-	Tanah Milik
6	Jambe	Moga	Moga	± 2000	-	-	Tanah Milik
7	Ronce	Moga	Moga	± 500	-	-	Tanah Milik
8	Suci	Moga	Moga	± 400	-	-	Tanah Milik
9	Sikucing	Banyumudal	Moga	± 700	-	-	Tanah Milik
10	Cempaka Wulung	Banyumudal	Moga	± 1000	-	-	Tanah Milik
11	Sirawa	Banyumudal	Moga	± 300	-	-	Tanah Milik
12	Sirup	Banyumudal	Moga	± 300	-	-	Tanah Milik
13	Gondang	Banyumudal	Moga	± 200	-	-	Tanah Milik
14	Tanggepan	Sima	Moga	-	-	-	Tanah Milik
15	Jurang	Sima	Moga	-	-	-	Tanah Milik

No	Nama Mata Air	Lokasi		Debit (LT/DT)	Koordinat		Status Kepemilikan Lahan-Kawasan Radius Sekitar Mata Air (200 m)
		Desa	Kecamatan		LS	BT	
16	Sigangu	Sima	Moga	-	-	-	Tanah Milik
17	Kedungpule	Sima	Moga	-	-	-	Tanah Milik
18	Kondang	Sima	Moga	± 40	-	-	Tanah Milik
19	Cilincing	Sima	Moga	-	-	-	Tanah Milik
20	Simini	Sima	Moga	-	-	-	Tanah Milik
21	Menggala	Sima	Moga	-	-	-	Tanah Milik
22	Kele	Sima	Moga	-	-	-	Tanah Milik
23	Sibedil	Sima	Moga	-	-	-	Tanah Milik
24	Ampelwaga	Sima	Moga	-	-	-	Tanah Milik
25	Kedungampel	Sima	Moga	-	-	-	Tanah Milik
26	Wungu	Mandiraja	Moga	-	-	-	Tanah Milik
27	Pagupaku	Mandiraja	Moga	-	-	-	Tanah Milik
28	Walim	Mandiraja	Moga	-	-	-	Tanah Milik
29	Siaur	Mandiraja	Moga	-	-	-	Tanah Milik
30	Slaga	Mandiraja	Moga	-	-	-	Tanah Milik
31	Patoman	Mandiraja	Moga	-	-	-	Tanah Milik
32	Gondang	Mandiraja	Moga	-	-	-	Tanah Milik
33	Bulangan	Pakembaran	Warungpring	± 4	-	-	Tanah Milik
34	Nyata	Pakembaran	Warungpring	± 1007	-	-	Tanah Milik
35	Kaliduren	Pakembaran	Warungpring	± 8	-	-	Tanah Milik
36	Wadasgamping	Warungpring	Warungpring	± 3	-	-	Tanah Milik

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, 2015

3.2.9. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

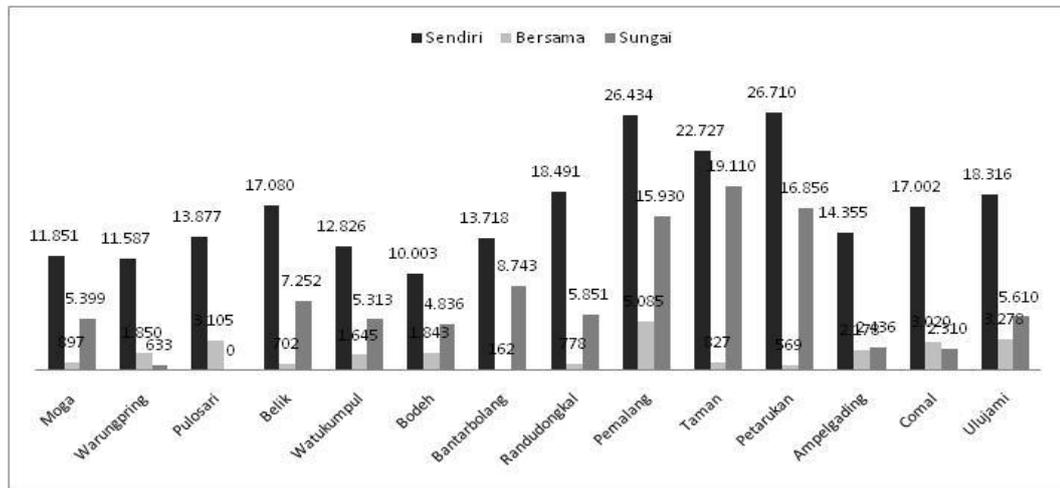
Aktivitas manusia sehari-hari yang memanfaatkan air salah satunya adalah kakus atau buang air besar. Aktivitas kakus sering terlupakan oleh penduduk terutama penduduk di daerah pedesaan dan di daerah kumuh. Padahal aktivitas kakus ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan manusia yang tinggal di daerah tersebut. Kepemilikan fasilitas tepat buang air besar juga erat kaitannya dengan kualitas air. Jika sebuah daerah tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar yang memadai maka akan terjadi pencemaran air akibat aktivitas tersebut.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Kabupaten Pemalang dalam bidang kesehatan adalah perilaku buang air besar sembarangan (*BABS/Open Defecation*). BABS merupakan perilaku yang sangat tidak sehat. BABS adalah suatu tindakan membuang kotoran tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan tanah, udara dan air.

Program pemerintah pusat beberapa tahun lalu tentang Program Hidup Bersih Sehat (PHBS) salah satunya mengenai masalah kepemilikan fasilitas

tempat buang air besar yang masih rendah di beberapa daerah. Kabupaten Pemalang telah melakukan program tersebut sehingga sudah banyak penduduk di Kabupaten Pemalang yang memiliki fasilitas tempat buang air besar baik sendiri maupun bersama.

Dari hasil pendataan dapat diketahui bahwa jumlah KK yang mempunyai jamban sendiri sebanyak 234.977 KK, KK dengan jamban bersama sebanyak 25.939 KK dan yang masih melakukan BABS sebanyak 100.279 KK. Perilaku BABS masih banyak ditemukan di sungai. Wilayah kecamatan dengan perilaku BABS tertinggi di Kecamatan Taman, diurutan kedua Kecamatan Petarukan dan urutan ketiga Kecamatan Pemalang. Selengkapnya mengenai jumlah rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada ampunan **Tabel 23** dan grafik berikut ini.



Sumber : STBM SMART – Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, 2017

Gambar 3. 12Jumlah Rumah Tangga Dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2017

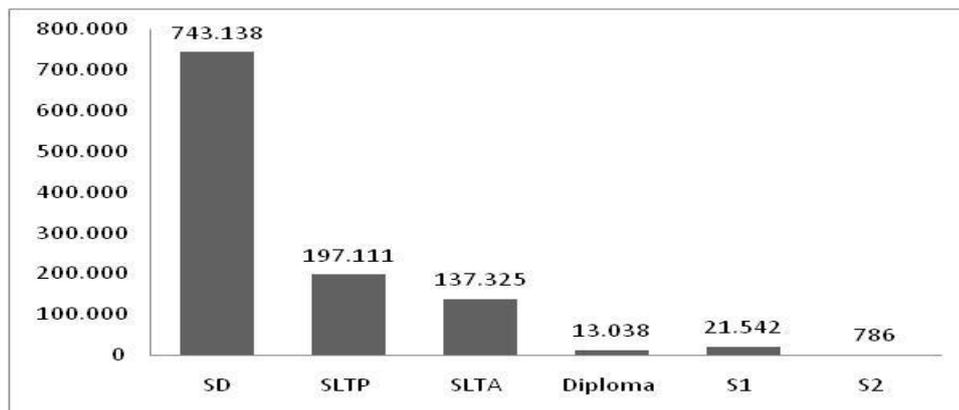
Kepemilikan jamban atau fasilitas buang air besar tidak serta merta berarti suatu daerah bebas dari perilaku BABS. Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang saat ini sedang giat menggalakkan gerakan *Open Defacation Free* (ODF). ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang menyatakan bahwa belum 100% dari masyarakat Kabupaten Pemalang telah buang air persen di jamban sehat. Untuk menunjang keberhasilan dari program ini, sosialisasi kepada masyarakat terus ditingkatkan setiap waktu dan membutuhkan dukungan dari

berbagai instansi dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat.

3.2.10. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan

Kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi umumnya sangat menyadari kebutuhan hidup untuk berperilaku bersih dan sehat. Pada umumnya penduduk berpendidikan tinggi tinggal di daerah perkotaan meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk pedesaan juga memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Dari hasil pendataan yang dilakukan, jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang paling banyak pada kelompok tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 743.138 jiwa. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan lainnya adalah SLTP sebanyak 197.111 jiwa, SLTA sebanyak 137.325 jiwa, Diploma sebanyak 13.038 jiwa, S1 sebanyak 21.542 jiwa dan S2 sebanyak 786 jiwa. Selengkapnya mengenai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 24** dan grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pemalang, 2017

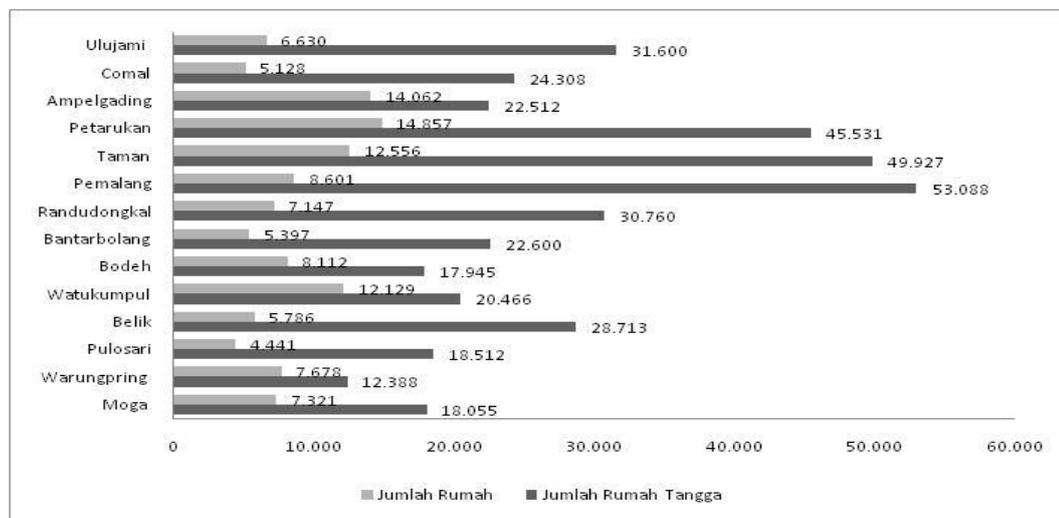
Gambar 3. 13 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah / Kabupaten Pemalang Tahun 2017

Data ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Pemalang berpendidikan rendah, sehingga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang masih banyak

perlu ditingkatkan. Program pemerintah pusat yaitu wajib belajar sembilan tahun nampaknya belum berhasil di Kabupaten Pemalang. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, beberapa diantaranya adalah tingkat kesadaran penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan komitmen baik pemerintah pusat maupun daerah dalam membiayai dan menyediakan fasilitas pendidikan yang baik bagi penduduk yang kurang mampu melalui APBN maupun APBD.

3.2.11. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Masyarakat yang melakukan BABS pada umumnya merupakan masyarakat dalam kategori miskin, dimana mereka tidak mempunyai akses terhadap sarana sanitasi seperti jamban sehat, sehingga dalam melakukan aktivitas buang air besar dilakukan di sungai. Jumlah rumah tangga (KK) dan rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Pemalang sebanyak 119.845 rumah. Selengkapnya mengenai jumlah rumah tangga dan rumah tangga miskin dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 26** dan grafik berikut ini.



Sumber : 1. Badan Pusat Statistik Kab. Pemalang (Pemalang Dalam Angka 2017)
 2. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pemalang, 2017

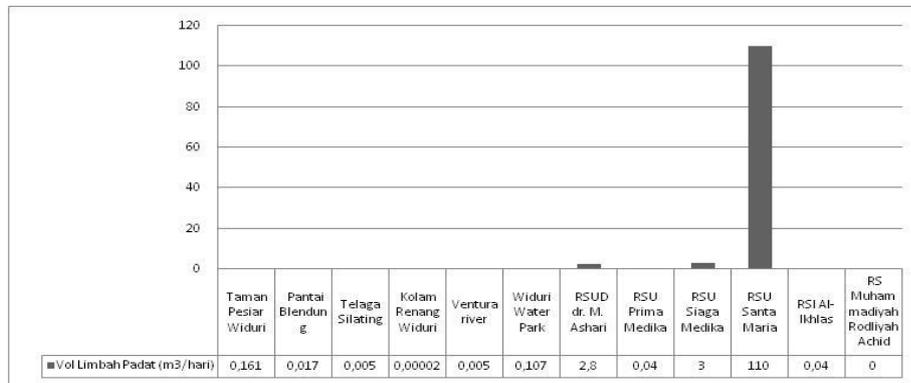
Gambar 3. 14Jumlah Rumah Tangga Miskin di Provinsi Jawa Tengah/ Kabupaten Pemalang Tahun 2017

Dari data diatas dapat diketahui jumlah rumah tangga miskin yang terdapa di Kabupaten Pemalang tertinggi di Kecamatan Petarukan sejumlah 14.852 Kk diurutan kedua Kecamatan Ampelgading sejumlah 14.062 KK dan ketiga di Kecamatan Kecamatan Taman sebanyak 12.556 KK. Pada umumnya, rumah

tangga dalam kategori miskin ini sulit dalam menjangkau akses air bersih dan sanitasi.

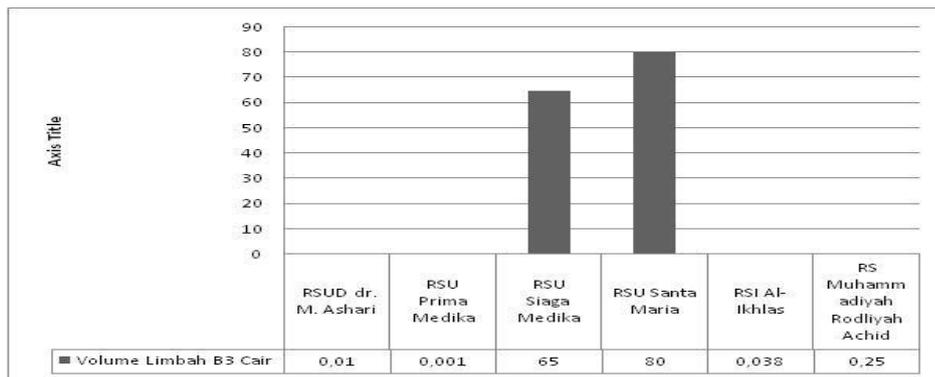
3.2.12. Limbah Padat dan Cair

Aktivitas manusia dapat menimbulkan permasalahan bagi lingkungan, yaitu dengan adanya limbah baik padat maupun cair. Dari hasil pendataan yang sampel pada pendataan tahun 2017 ini diambil pada 2 (dua) aktivitas yang disinyalir menghasilkan limbah padat dan cair yaitu di tempat wisata dan rumah sakit dapat diketahui volume limbah yang dihasilkan. Selengkapnya mengenai limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 27** dan grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pemalang, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang, RSU, 2017

Gambar 3. 15 Volume Limbah Padat



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pemalang, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang, RSU, 2017

Gambar 3. 16 Volume Limbah Padat

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa penghasil limbah padat dan limbah cair di Kabupaten Pemalang yang tertinggi berasal dari RSU Santa Maria. Dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit memerlukan

pengelolaan khusus, terutama limbah B3 cair, sehingga diharapkan tidak mencemari lingkungan disekitarnya.

3.2.13. Analisis *State*, *Pressure*, dan *Response* Kualitas Air di Kabupaten Pemalang

3.2.13.1. Analisis *State*

Kabupaten Pemalang dilalui oleh sungai baik sungai besar maupun anak sungai. Selain itu, juga terdapat danau/waduk/embung/Situ serta mata air yang dalam pemanfaatannya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian. Kualitas air digambarkan melalui mutu air yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Pengukuran kualitas air di Kabupaten Pemalang dilakukan pada sungai, air sumur dan air laut (dilakukan pada tahun 2010). Dari hasil pengukuran kualitas air sungai, dapat diketahui beberapa kandungan yang melebihi ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan. Kondisi air sungai waluh menunjukkan *Total Coliform* dan *Fecal Coliform* di Sungai Waluh melebihi baku mutu. Konsentrasi tinggi dari bakteri coli tersebut menunjukkan bahwa air sungai telah tercemar oleh akibat aktivitas domestik. Selain itu, juga diindikasikan bahwa di sepanjang aliran Sungai Comal dan Waluh terdapat limbah aktivitas domestik yang mencemari kedua sungai.

3.2.13.2. Analisis *Pressure*

Kandungan Total Coliform dan Fecal Coliform di badan sungai ini menunjukkan adanya pencemaran air. Bakteri coliform merupakan golongan mikroorganisme yang lazim digunakan sebagai indikator, di mana bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan suatu sumber air telah terkontaminasi oleh patogen atau tidak. *Coliform* total kemungkinan bersumber dari lingkungan, sementara itu, *fecal coliform* dan *E. coli* terindikasi kuat diakibatkan oleh pencemaran tinja, keduanya memiliki risiko lebih besar menjadi patogen di dalam air. Bakteri *fecal coliform* atau *E. coli* yang mencemari air memiliki risiko yang langsung dapat dirasakan oleh manusia jika mengonsumsi air yang tercemar tersebut. Kondisi pencemaran air sungai ini diperparah dengan masih

ditemukannya kebiasaan masyarakat dalam aktivitas buang air besar. Di Kabupaten Pemalang, masih ditemukan masyarakat yang melakukan BABS di sungai, sehingga menyebabkan pencemaran air sungai.

3.2.13.3. Analisis Response

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk dalam mengatasi permasalahan kualitas air melalui penyusunan program-program yang mendukung perbaikan kualitas air. Beberapa program tersebut antara lain :

1. Lingkungan

- a) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dengan kegiatan:
 - 1) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
 - 2) Pantai dan laut lestari
 - 3) Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
 - 4) Pengendalian dan pengawasan
 - 5) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan & konservasi SDA
- b) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan kegiatan :
 - 1) Pemantauan kualitas lingkungan
 - 2) Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
 - 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
- c) Program peningkatan pengendalian polusi, dengan kegiatan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

2. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- a) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan kegiatan cakupan pelayanan air limbah
- b) Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dengan kegiatan jumlah tempat penampungan air baku (bendungan dan embung) yang digunakan sebagai penampungan air

3. Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan kegiatan Pembinaan PHBS bagi masyarakat di sekitar kawasan CA, Sosialisasi kepada masyarakat melalui kades tentang PHBS dan stop BABS serta pemberian stimulan kepada kawasan yang belum ODF (*Open Defecation Free*).

3.3. KUALITAS UDARA

Manusia hidup memerlukan udara yang sehat. Seringkali kualitas udara luput dari perhatian padahal tanpa udara yang bersih dan sehat sulit bagi manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Udara merupakan media lingkungan yang merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius, hal ini pula menjadi kebijakan pembangunan kesehatan Indonesia dimana program pengendalian pencemaran udara merupakan salah satu dari program unggulannya. Pertumbuhan pembangunan seperti industri, transportasi, perumahan dan perkantoran disamping memberikan dampak positif namun disisi lain akan memberikan dampak negative dimana salah satunya berupa pencemaran udara dan kebisingan baik yang terjadi didalam ruangan (*indoor*) maupun diluar ruangan (*outdoor*) yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan terjadinya penularan penyakit.

Kabupaten Pemalang memiliki sektor industri berkembang dan banyak memiliki banyak industri sedang dan kecil. Sehingga isu pencemaran udara mulai dirasakan dan dipermasalahkan, sehingga perlu diantisipasi supaya meminimalisir peningkatan pencemaran udara. Kabupaten Pemalang saat ini juga sedang berpartisipasi dalam proyek pembangunan nasional yaitu pembangunan jalan bebas hambatan yang melintasi beberapa kecaamatan di Kabupaten Pemalang. Pembangunan jalan tol ini tentu saja mengakibatkan gangguan di sekitar lokasi pembangunan. Gangguan yang paling serius dirasakan adalah kualitas udara di sekitar lokasi proyek dan kualitas udara akibat lalu lintas kendaraan berat yang mengangkut material untuk pembangunan.

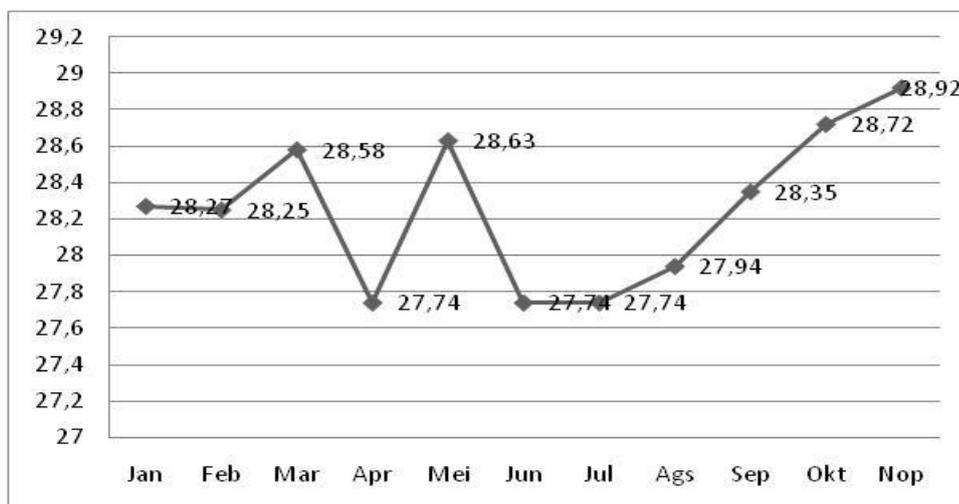
3.3.1. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan

Manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik apabila suhu udara juga dirasakan baik. Suhu udara yang terlalu ekstrim menimbulkan

ketidaknyamanan untuk beraktivitas. Aktivitas manusia baik di bidang industri, perkantoran, perumahan maupun lalu lintas mempunyai potensi dalam menimbulkan pencemaran udara. Pencemaran udara akibat aktivitas tersebut dapat berupa CO₂ (karbon dioksida), SO₂ (sulfur dioksida), NO_x (nitrogen oksida), dan debu yang mengandung logam berat. Meningkatnya gas-gas tersebut disebabkan proses pembakaran yang tidak sempurna yang melebihi kemampuan tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Peristiwa inilah yang disebut dengan efek rumah kaca.

Energi matahari yang masuk ke bumi dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Jika konsentrasi gas-gas pencemar di atmosfer maka radiasi tersebut akan tertahan di atmosfer untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Hal ini menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pencemaran udara di suatu tempat berbanding lurus dengan peningkatan suhu udara.

Dari hasil pengukuran suhu yang telah dilakukan sampai dengan bulan November, suhu udara di Kabupaten Pemalang berkisar antara 27^oC – 28^oC. Suhu udara ini diukur di Stasiun Meteorologi Pengamatan Khusus (SMPK) Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Pemalang yang berada di Desa Kebonsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Selengkapnya mengenai data suhu udara rata-rata bulanan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Lampiran Tabel 28 dan grafik berikut ini.



Sumber: Stasiun Meteorologi Pengamatan Khusus (SMPK) Kabupaten Pemalang, 2017

Gambar 3. 17 Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2017

3.3.2. Kualitas Air Hujan

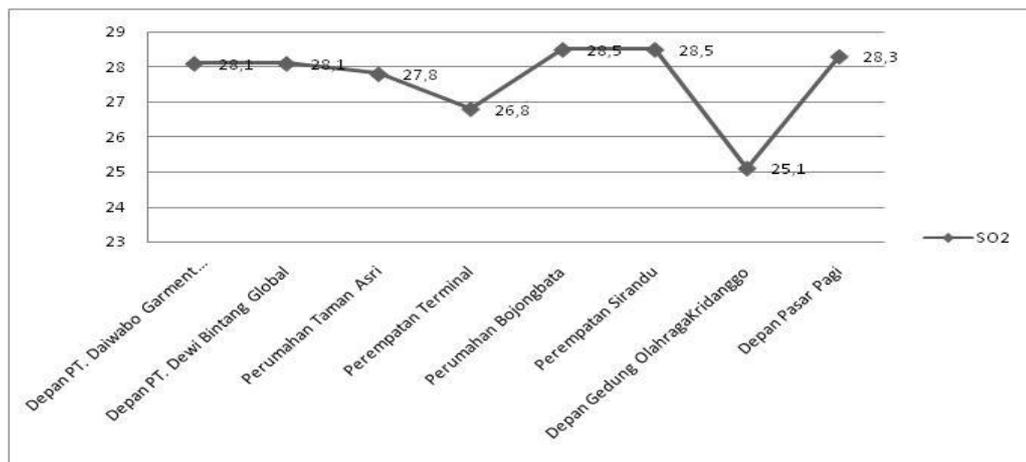
Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik **leleh** es di dekat dan di atas permukaan bumi. Turunnya hujan ke permukaan bumi merupakan salah satu upaya dari alam untuk menurunkan suhu permukaan bumi. Air hujan yang turun membasahi bumi akan mengandung gas-gas pencemar udara di atmosfer. Air hujan yang mengandung banyak zat-zat pencemar udara tersebut menunjukkan kualitas yang buruk. Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh iklim hujan tropis karena memiliki curah hujan bulanan lebih dari 60 mm. Curah hujan bulanan yang tinggi di Kabupaten Pemalang belum diimbangi dengan pengujian kualitas air hujan sehingga tidak bisa ditentukan apakah kualitas air hujan di Kabupaten Pemalang dalam kondisi baik atau tidak (lampiran **Tabel 29**).

3.3.3. Kualitas Udara Ambien

Kualitas udara yang bersih dan sehat tidak hanya memberikan kenyamanan bagi manusia dalam beraktivitas sehari-hari namun juga mewujudkan masyarakat yang sehat terbebas dari penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara. Mengingat pentingnya kualitas udara, Pemantauan kualitas udara ambient dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Setiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah dibiayai pengujian kualitas udara ambient dengan metode *passive sampler* dengan menggunakan dana APBD Provinsi. Pada tahun 2017, pengambilan sampel udara di 10 (sepuluh) lokasi pemantauan. Sampel tersebut dikirimkan ke perusahaan yang telah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk diuji. Hasil pengujian dengan metode *passive sampler* tersebut belum diberikan kepada masing-masing Kabupaten / Kota sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tidak dapat mempublikasikan hasil pengujian yang telah dilakukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pemantauan dan pengukuran kualitas lingkungan udara dan kebisingan di wilayah Kabupaten Pemalang. Pemantauan dilakukan pada lokasi kawasan industri, padat lalu lintas, perkantoran dan pemukiman, karena

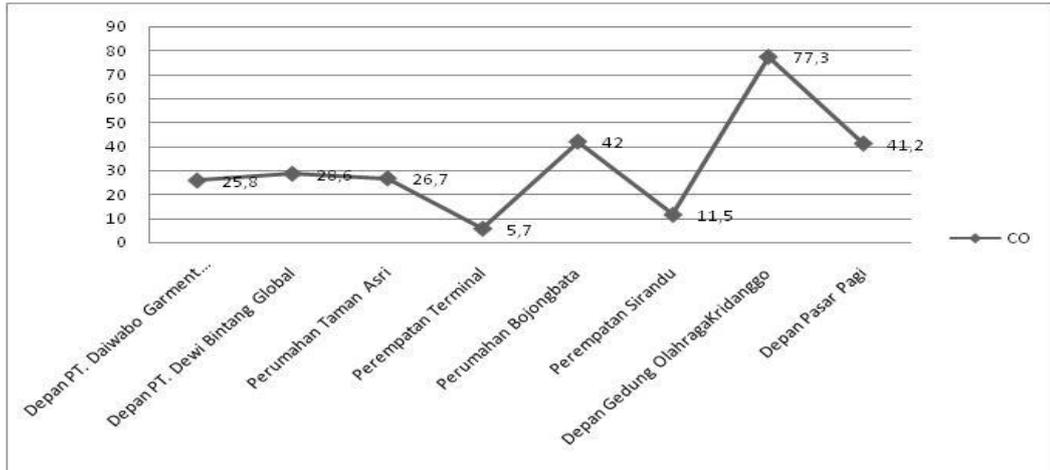
wilayah tersebut yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang saat ini. Pemantauan kualitas udara ambient dilakukan pada 8 (delapan) lokasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang bekerjasama dengan BPL2H di Semarang untuk melakukan pengambilan dan pengujian sampel. Sampel diambil pada tanggal 7 Maret 2017 kemudian dibawa ke Semarang untuk dilakukan pengujian. Hasil pengujian keluar sebulan setelah tanggal pengambilan.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang, 2017,

Gambar 3. 18 Kualitas Udara Ambien SO₂

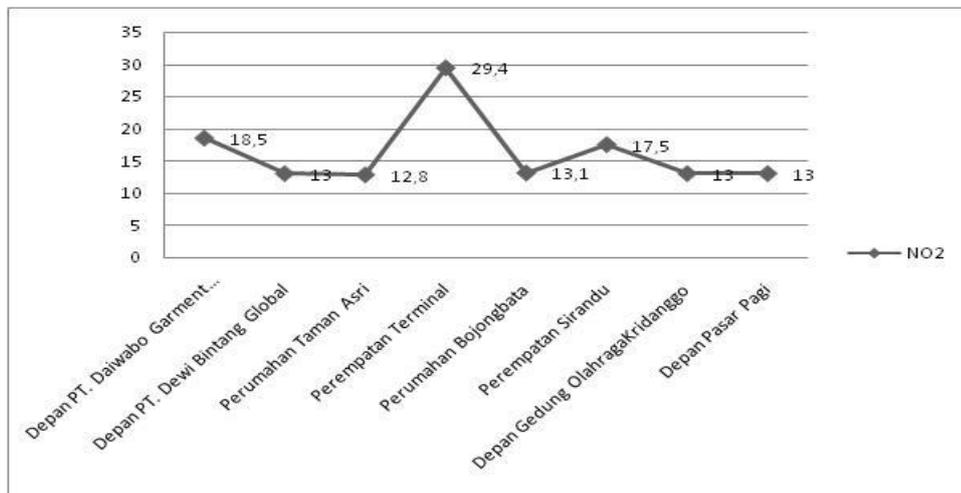
Dari hasil uji laboratorium yang telah dilakukan pada sampel yang telah dikumpulkan, untuk kandungan Sulfur Dioksida (SO₂) di Kabupaten Pemalang mempunyai nilai antara kurang dari 25,1 µg/Nm³– 28,5 µg/Nm³. Jika dibandingkan dengan standar baku mutu sebesar 632 µg/Nm³ (SNI 19-7119.7-2005) maka kandungan Sulfur Dioksida (SO₂) di Kabupaten Pemalang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sehingga aman. Untuk kandungan Karbon Monoksida (CO) dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang, 2017

Gambar 3. 19 Kualitas Udara Ambien CO

Dari hasil uji laboratorium yang telah dilakukan pada sampel yang telah dikumpulkan, untuk kandungan Karbon Monoksida (CO) di Kabupaten Pemalang mempunyai nilai antara kurang dari 5,7 µg/Nm³– 77,3 µg/Nm³. Jika dibandingkan dengan standar baku mutu sebesar 15.000 µg/Nm³ (SNI 19-7119.10-2011) maka kandungan Karbon Monoksida (CO) di Kabupaten Pemalang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sehingga aman. Untuk kandungan Nitrogen Dioksida (NO₂) dapat dilihat pada grafik berikut ini.

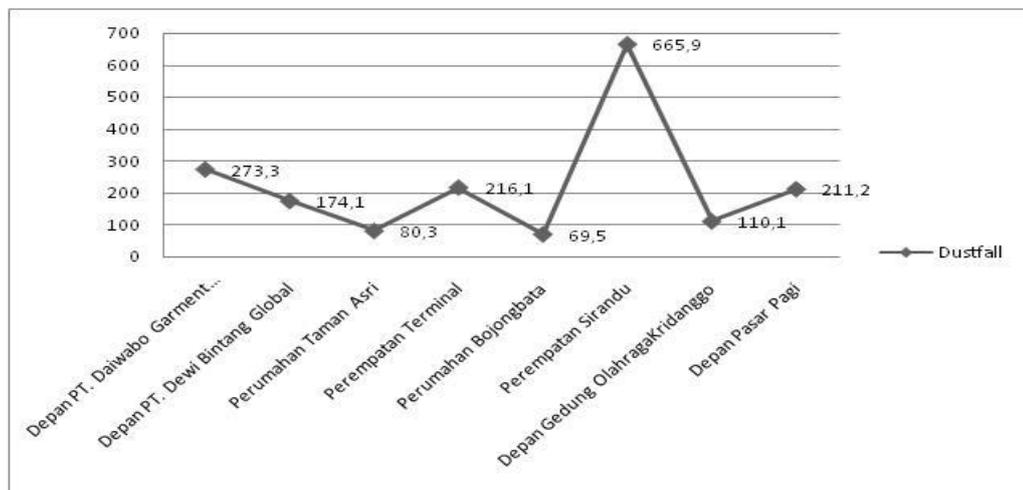


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang, 2017

Gambar 3. 20 Kualitas Udara Ambien NO₂

Kandungan Nitrogen Dioksida (NO₂) di Kabupaten Pemalang berkisar antara 12,8 µg/Nm³-29,4 µg/Nm³. Jika dibandingkan dengan standar baku mutu sebesar 316 µg/Nm³ (SNI 19-7119.2-2005) maka kandungan Nitrogen Dioksida

(NO₂) di Kabupaten Pemalang masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sehingga aman. Untuk kandungan *Dustfall* dapat dilihat pada grafik berikut ini.

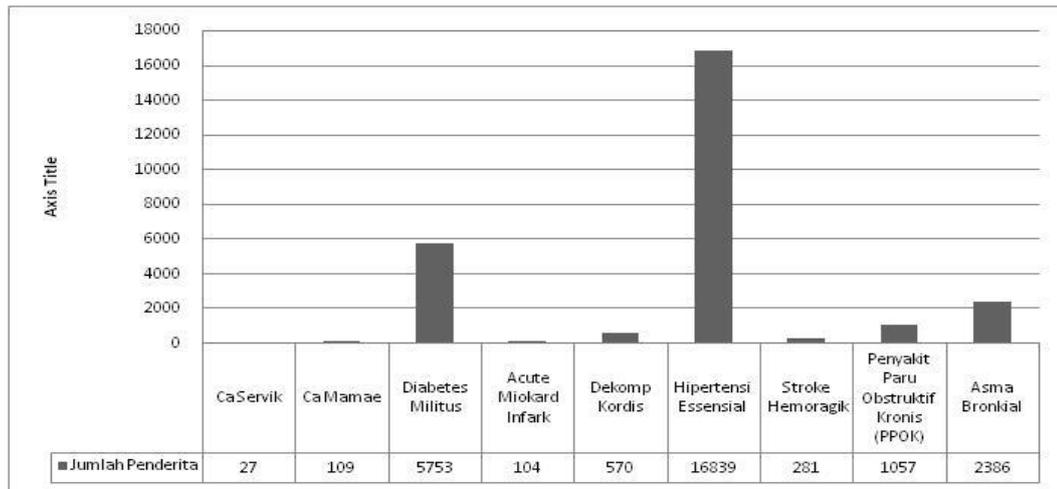


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang, 2017

Gambar 3. 21 Kualitas Udara Ambien *Dustfall*

Kandungan *Dustfall* di Kabupaten Pemalang berkisar antara 69,5 µg/Nm³ - 665,9 µg/Nm³. Konsentrasi *Dustfall* di delapan titik pengambilan sampel tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena konsentrasinya besar terutama konsentrasi *dustfall* di perempatan Sirandu, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang yang mencapai 665,9 µg/Nm³. Hasil ini tidak terlalu mengejutkan karena Perempatan Sirandu merupakan kawasan padat lalu lintas. Perempatan Sirandu juga menjadi tempat persimpangan kendaraan-kendaraan berat yang mengangkut hasil pertambangan maupun bahan material yang digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol. Selengkapnya mengenai kualitas udara ambien di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 30**.

Adanya konsentrasi *dustfall* yang tinggi dapat memicu berbagai macam penyakit. Beberapa jenis penyakit yang terdapat di Kabupaten Pemalang antara lain *Ca Servik*, *Ca Mamae*, *Diabetes Militus*, *Acute Miokard Infark*, *Dekomp Kordis*, *Hipertensi Essensial*, *Stroke Hemoragik*, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), Asma Bronkial. Selengkapnya mengenai jenis penyakit yang ada di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 25** dan grafik berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pemalang, 2017

Gambar 3. 22 Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2017

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Pemalang adalah Hipertensi essensial, di urutan kedua diabetes militus dan di urutan ketiga adalah penyakit asma bronkial. Beberapa jenis penyakit ini dapat dipicu oleh kondisi kualitas lingkungan yang buruk seperti pencemaran udara dan radikal bebas.

3.3.4. Penggunaan Bahan Bakar

Pencemaran udara di Kabupaten Pemalang memang belum mencapai status yang berbahaya. Namun tetap saja pengendalian pencemaran udara harus tetap dilakukan untuk menciptakan udara yang lebih bersih dan sehat. Pencemaran udara erat kaitannya dengan aktivitas pembakaran. Pembakaran yang tidak sempurna mengakibatkan timbulnya polutan yang mencemari udara. Pembakaran dilakukan oleh manusia dalam kegiatan industri, rumah tangga dan transportasi. Berikut disajikan data penggunaan bahan bakar di wilayah Kabupaten Pemalang.

TABEL III. 5 PENGGUNAAN BAHAN BAKAR TAHUN 2016

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Industri :											
1.	Kimia dasar											
2.	Mesin dan logam dasar	10.996.720	-	-	-	-	76.722.148	-	-	-	-	49.730.797
3.	Industri Kecil											
4.	Aneka Industri											

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
B	Rumah Tangga :	-	-	-	-	-	12.063.400	-	-	-	-	-
C	Kendaraan :											
1	Mobil Beban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penumpang pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penumpang umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	Bus besar pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
5	Bus besar umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679
6	Bus kecil pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bus kecil umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421	-
8	Truk besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1471
9	Truk kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957
10	Roda tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Roda dua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

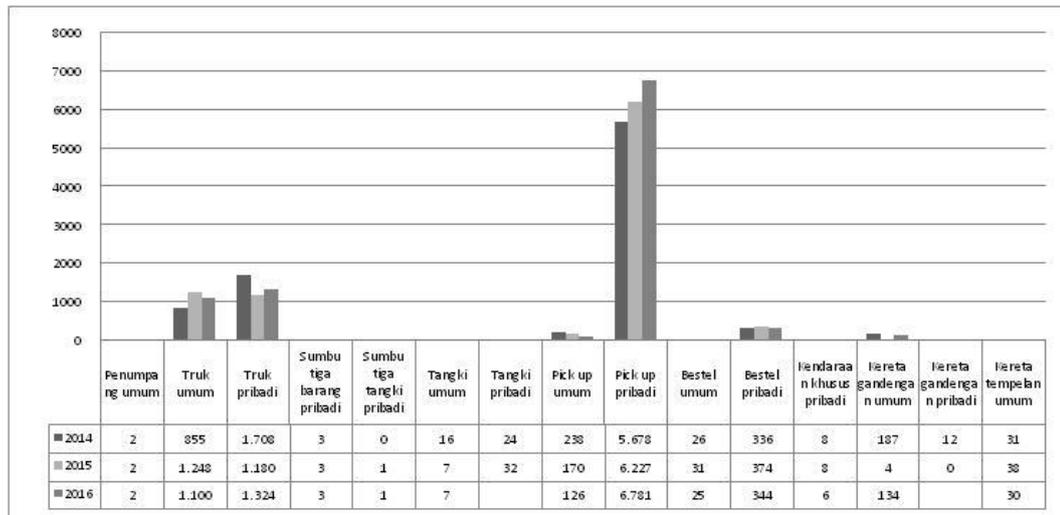
Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Pemalang, 2016
 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pemalang, 2016

Penggunaan bahan bakar untuk industri di Kabupaten Pemalang merupakan akumulasi dari seluruh industri yang ada di Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 sejak bulan Januari hingga Desember. Sedangkan jumlah bahan bakar LPG untuk rumah tangga merupakan akumulasi kuota LPG dari seluruh agen dan pangkalan LPG di Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2017 ini, Kabupaten Pemalang tidak melakukan pendataan terkait dengan penggunaan Bahan Bakar (Lampiran **Tabel 31**).

3.3.5. Jumlah Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Pemalang turut menyumbang tingkat pencemaran udara di Kabupaten Pemalang. Asap kendaraan bermotor mengandung gas karbon monoksida (CO). Gas CO apabila terhirup oleh manusia akan memasuki tubuh melalui paru-paru dan akan bersenyawa dengan hemoglobin (Hb) membentuk COHb. Hemoglobin sendiri berfungsi sebagai pembawa oksigen ke seluruh tubuh.

Polusi dari emisi gas buang kendaraan bermotor lebih berbahaya dari merokok. Dalam asam kendaraan bermotor terdapat sekitar 1.000 unsur beracun. Gas buang kendaraan bermotor ini tidak hanya memicu penyakit fisik tetapi juga bisa memicu penyakit mental yaitu sifat agresif dan gelisah. Selengkapnya mengenai data jumlah penjualan kendaraan bermotor di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 32** dan grafik berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Pemalang, 2017

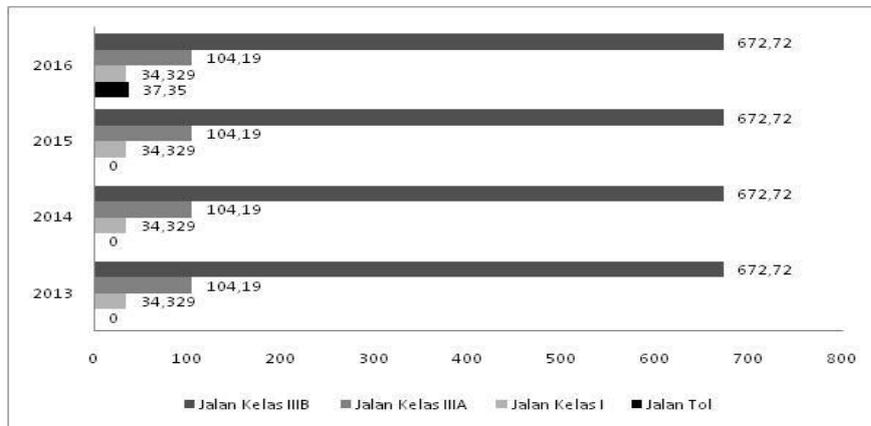
Gambar 3. 23 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2017

Berdasarkan data di atas, jumlah kendaraan bermotor paling banyak di Kabupaten Pemalang adalah jenis pick up pribadi. Jumlah kendaraan pick up pribadi yang diuji KIR oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini menunjukkan kesadaran pemilik kendaraan bermotor tersebut untuk mengujikan kualitas kendaraannya. Dengan melakukan uji KIR secara berkala maka performa kendaraan dapat terus terpantau. Apabila ditemukan kendaraan yang sudah tidak layak digunakan karena hasil pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna, izin operasi kendaraan tersebut harus dicabut.

3.3.6. Perubahan Penambahan Ruas Jalan

Saat ini, masyarakat di Kabupaten Pemalang semakin mudah untuk memiliki kendaraan bermotor pribadi khususnya sepeda motor. Jumlah kendaraan bermotor yang melintasi jalan-jalan di Kabupaten Pemalang membutuhkan prasana jalan raya yang semakin besar dan lebar. Jalan raya di Kabupaten Pemalang terdiri dari tiga kelas jalan yaitu Kelas I, IIIA dan IIIB. Jalan kelas I merupakan jalan nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat sementara jalan kelas IIIA digolongkan sebagai jalan provinsi dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengelola jalan kelas IIIB yang disebut jalan kabupaten. Panjang jalan kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 620/427/Tahun 2012 Tanggal 9

Oktober 2012. Pendataan terkait dengan perubahan penambahan ruas jalan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 33** dan grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pemalang, 2017

Gambar 3. 24 Perubahan Penamabahan Ruas Jalan Raya Tahun 2017

Berdasarkan data di atas, tidak ada perubahan penambahan ruas jalan raya di Kabupaten Pemalang pada tahun 2013-2015 di semua kelas jalan. Pada tahun 2016, terdapat penambahan di rua jalan tol sepanjang 37,35 km. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang terus berupaya meningkatkan kualitas jalan raya kelas IIB dengan melakukan perbaikan jalan raya secara berkala.

3.3.7. Analisis State, Pressure, dan Response Kualitas Udara di Kabupaten Pemalang

3.3.7.1. Analisis State

Berdasarkan pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa kualitas udara di wilayah Pemalang masih sesuai dengan baku mutu. Hasil pengujian yang dilakukan di 7 (tujuh) lokasi menunjukkan kadar SO₂, CO dan No₂ masih sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan. Hanya saja, ditemukan adanya kandungan Dustfall yang tinggi terutama pada lokasi yang sedang berlangsung pembangunan jalan tol yang merupakan program nasional (perempatan sirandu).

3.3.7.2. Analisis Pressure

Adanya kandungan Dustfall yang tinggi disebabkan oleh aktivitas pembangunan jalan tol. Aktivitas transportasi dan pembangunan fisik jalan

menimbulkan pencemaran lingkungan. Semakin tingginya volume transportasi pada kawasan tersebut akan meningkatkan resiko pencemaran udara. Bahan pencemar berasal dari partikel debu dan juga gas buang kendaraan bermotor sehingga resiko peningkatan kandungan karbon monoksida (CO), berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen (NO₂) dan sulfur dioksida (SO), dan partikulat debu termasuk timbal (Pb). Bahan bakar tertentu seperti hidrokarbon dan timbal organik dilepaskan ke udara karena adanya penguapan sistem bahan bakar. Lalu lintas kendaraan bermotor juga dapat meningkatkan kadar partikulat debu yang berasal dari permukaan jalan, komponen ban, dan rem.

Selain disebabkan oleh aktivitas pembangunan jalan tol, pencemaran udara di Kabupaten Pemalang juga disebabkan karena peningkatan jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya.

3.3.7.3. Analisis Response

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup terutama peningkatan kualitas udara, pemerintah Kabupaten Pemalang membuat strategi pemenuhan persentase baku mutu udara dengan membuat kebijakan peningkatan kualitas udara melalui pengawasan dan pengendalian pencemaran udara. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pemalang membuat Program Pengendalian Polusi. Program ini diwujudkan dengan melakukan pengujian emisi / polusi akibat aktivitas produksi.

3.4. Resiko Bencana

Kabupaten Pemalang memiliki beberapa wilayah yang termasuk pada kawasanrawan bencana. Adapun bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Pemalang antara lain: banjir, tanah longsor, puting beliung, dan kebakaran. Secara rinci hasil analisis *State*, *Pressure* dan *Response* Resiko Bencana di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada uraian berikut :

3.4.1. Analisis State

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pemalang Tahun 2017, bahwa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pemalang berupa

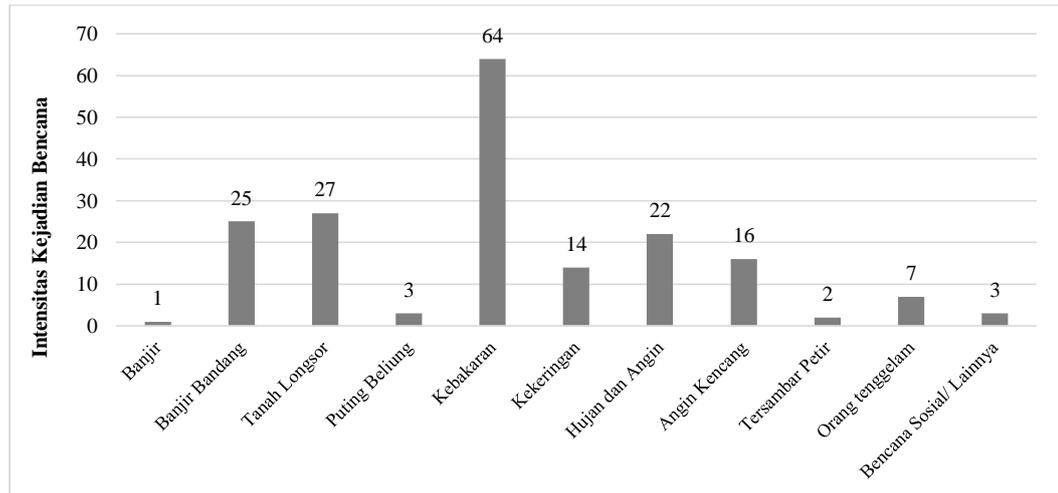
banjir, banjir bandang, tanah longsor, puting beliung, kebakaran, kekeringan, hujan dan angin, angin kencang, tersambar petir, orang tenggelam, dan bencana sosial/ lainnya. Secara rinci penjabaran status resiko bencana pada masing-masing jenis bencana diuraikan sebagai berikut :

▪ **Bencana Alam**

- Bencanabanjir sepanjang tahun 2017 sebanyak 1 kali dengan daerah resiko bencana di Kecamatan Moga tanpa adanya korban jiwa.
- Bencana banjir bandang sepanjang tahun 2017 terjadi sebanyak 25 kali kejadian di Kecamatan Moga, Warungpring, Pulosari, Watukumpul, Bodeh, dan Bantarbolang.
- Bencana tanah longsor sepanjang tahun 2017 terjadi sebanyak 27 kali di Kecamatan Moga, Warungpring, Pulosari, Watukumpul, Bodeh, dan Bantarbolang.
- Bencana angin puting beliung sepanjang tahun 2017 terjadi sebanyak 3 kali di Kecamatan Moga, Belik, dan Bantarbolang.
- Bencana kebakaran sepanjang tahun 2017 sebanyak 64 kali dengan sebaran kejadian diseluruh kecamatan Kabupaten Pemalang. Bencana ini merupakan bencana dengan intensitas kejadian paling banyak dibandingkan dengan jenis bencana yang lain.
- Bencana kekeringan sepanjang tahun 2017 sebanyak 14 kali dengan sebaran kejadian di Kecamatan Moga dan Pulosari.
- Bencana hujan dan angin sepanjang tahun 2017 sebanyak 22 kali dengan sebaran kejadian di Kecamatan Moga, Warungpring, Belik, Watukumpul, Bodeh, Randudongkal, Pemalang, Petarukan, Ampelgading, dan Comal.
- Bencana angin kencangsepanjang tahun 2017 sebanyak 16 kali dengan sebaran kejadian di Kecamatan Moga, Pulosari, Belik, Watukumpul, Pemalang, Petarukan, Ampelgading, dan Comal.
- Bencana tersambar petir sepanjang tahun 2017 sebanyak 2 kali dengan sebaran kejadian di Kecamatan Bantarbolang dan Randudongkal.
- Bencana orang tenggelam sepanjang tahun 2017 sebanyak 7 kali dengan sebaran kejadian di Kecamatan Belik, Bodeh, Bantarbolang, Pemalang dan Taman.

- Bencana sosial lainnya, sepanjang tahun 2017 sebanyak 3 kali dengan sebaran kejadian di Kecamatan Watukumpul dan Randudongkal.

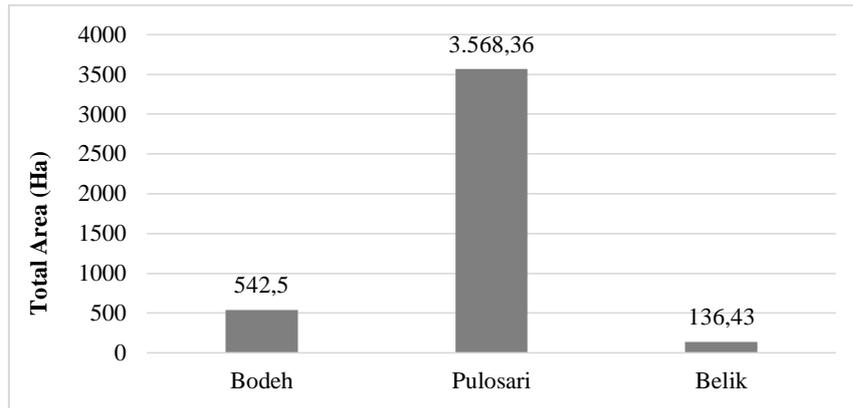
Kondisi status resiko bencana di Kabupaten Pemalang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel (Lampiran **Tabel 37**, **Tabel 39**, dan **Tabel 40**) dan gambar grafik berikut.



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Pemalang, 2017

Gambar 3. 25 Intensitas Kejadian Bencana di Kabupaten Pemalang Tahun 2017

Secara spesifik status resiko bencana kekeringan dapat digambarkan dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang, 2017. Bencana kekeringan melanda 3 (tiga) kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Pemalang yaitu Kecamatan Belik, Pulosari dan Bodeh. Kekeringan di Kecamatan Belik berdampak pada 136,43 hektar. Bencana kekeringan di Kecamatan Pulosari dengan perkiraan seluas 3.568,36 hektar. Sedangkan kekeringan yang melanda Kecamatan Bodeh seluas 542,5 hektar. Selengkapnya status rinci bencana kekeringan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel (Lampiran **Tabel 38**) dan gambar berikut.



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Pemalang, 2017

Gambar 3. 26 Luas Wilayah Daerah Bencana Kekeringan di Kabupaten Pemalang Tahun 2017

3.4.2. Analisis *Pressure*

Penyebab utama banjir di Kabupaten Pemalang salah satunya berasal dari curah hujan yang tinggi. Jika hujan besar turun terus menerus, air tidak akan langsung masuk ke saluran pembuangan air, melainkan air yang turun akan menjadi genangan. Genangan air tersebut lama-lama akan semakin tinggi dan mengakibatkan banjir yang akan merusak aspal jalan yang terkikis oleh air. Selain itu kondisi adanya genangan air tergantung dengan penampungan dan drainase di lokasi tersebut, jika drainase dan penampungan air tidak lancar berarti penampungan tersebut tidak dirawat secara teratur sehingga membuat air hujan tersumbat tidak lancar dan akan menjadi penumpukan dan genangan besar yang jadi penyebab banjir.

Selain bencana banjir, bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pemalang adalah tanah longsor. Gejala umum tanah longsor ditandai dengan munculnya retakan-retakan dilereng yang sejajar dengan arah tebing, biasanya terjadi setelah hujan. Selain menjadi penyebab bencana banjir, curah hujan yang tinggi juga merupakan penyebab adanya bencana tanah longsor. Ketika hujan, air akan menyusup kebagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena air akan melalui tanah yang merekah dan masuk serta terakumulasi dibagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral.

Terjadinya bencana tanah longsor memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan, khususnya manusia. Bila tanah longsor itu terjadi pada

wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, maka korban jiwa yang ditimbulkannya akan sangat besar, terutama bencana tanah longsor yang terjadi secara tiba-tiba tanpa diawali adanya tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya tanah longsor terhadap kehidupan adalah sebagai berikut:

- Terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan dan sebagainya.
- Kerusakan bangunan-bangunan seperti perumahan penduduk, sarana peribadatan dan bangunan lainnya.
- Menghambat proses aktivitas manusia dan merugikan baik masyarakat yang terdapat disekitar bencana.
- Jika terjadi dalam area permukiman bencana tanah longsor dapat menyebabkan adanya korban jiwa.
- Terjadinya kerusakan lahan, hilangnya vegetasi penutup lahan, terganggunya keseimbangan ekosistem dan lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis.

Bencana angin (angin puting beliung, hujan dan angin, dan angin kencang) di Kabupaten Pemalang lebih terjadi akibat adanya curah hujan yang sangat tinggi (ekstrim) akibat pemanasan global tidak terhindarkan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi cuaca yang berpengaruh terhadap kondisi klimatologi yang terbentuk, baik itu iklim, kelembaban udara, suhu rata-rata, maupun kecepatan angin. Suhu rata-rata yang tinggi dan kecepatan angin yang tinggi akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya bencana angin (angin puting beliung, hujan dan angin, dan angin kencang) di Kabupaten Pemalang.

Lain halnya dengan bencana kebakaran, bencana ini selain disebabkan karena adanya kondisi klimatologi yang tidak menentu faktor kesalahan manusia dalam memanfaatkan lahan juga berkontribusi dalam penyebab adanya bencana kebakaran. Hal itu dikarenakan kondisi hutan yang beralih fungsi menjadi fungsi non hutan akan menyebabkan fungsi hijau didalam kawasan hutan berkurang dan lebih rentan untuk terjadi kebakaran. Bencana kebakaran ini juga dapat menjadi penyebab adanya bencana yang lain yaitu kekeringan. Akibat berkurangnya luasan hutan akan berdampak pada berkurangnya dan hilangnya area resapan air

yang menyebabkan daerah tersebut maupun daerah dibawahnya mengalami kekeringan. Bencana kekeringan juga dapat disebabkan karena kondisi klimatologi. Misalnya curah hujan yang rendah dengan area resapan yang kecil akan berpengaruh terhadap minimnya resapan air dalam tanah sehingga kondisi tanah dan lingkungan yang ada cenderung mengalami kekeringan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain.

Kabupaten Pemalang memiliki beberapa wilayah yang beresiko terhadap bencana yaitu :

- Kawasan rawan banjir, meliputi :
 - Rawan banjir : Kecamatan Bodeh, Ulujami, Ampelading, Comal, Petarukan, Taman, Pemalang, Belik, Bantarbolang
 - Rawan genangan : Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami.
- Kawasan rawan longsor, meliputi :
 - Daerah rawan lonsor di wilayah pegunungan : Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga dan Randudongkal.
 - Daerah rawan longsor di sepanjang alur sungai : terdapat pada aliran Sungai Comal, Waluh, Polaga, Lumeneng, Layangan dan Rambut.
- Kawasan rawan kekeringan
 - Rawan kekeringan air bersih : Kecamatan Pulosari dan Belik.
 - Rawan kekeringan pertanian : Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Comal, Ampelgading, Ulujami, dan Bodeh.

Secara spasial kawasan rawan bencana di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Peta Bencana Alam dan Permasalahan Lingkungan Kabupaten Pemalang.

Peta 3. 1Peta Bencana Alam dan Permasalahan Lingkungan Kabupaten Pemalang

3.4.3. Analisis *Response*

Peraturan perundangan yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan dalam hal resiko bencana antara lain Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi pentapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

Upaya mengurangi ancaman atau resiko bencana, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah menyusun program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam sebagai pencegahan bencana alam. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan penanaman bibit tanaman konservasi di sumber-sumber mata air serta kegiatan pemantauan dan pembinaan usaha pertambangan minerba.

Selain itu, upaya penanganan dan pencegahan bencana sebagai upaya dalam peningkatan kualitas lingkungan telah dikembangkan beberapa program baik yang sudah dilaksanakan maupun yang ditargetkan dan termuat dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Beberapa program tersebut antara lain :

- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Bentuk kegiatan meliputi :
 - Pengembangan Desa Tangguh
 - Pemetaan desa dalam kawasan rawan bencana yang terpetakan potensi dan resiko bencananya
- Program Darurat Bencana dan Logistik
Bentuk kegiatan meliputi :
 - Peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten
 - Peningkatan tingkat waktu tanggap kejadian bencana
 - Peningkatan jumlah mobil pemadam yang layak pakai
- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

Bentuk kegiatan meliputi :

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Alam Lingkup Kabupaten
- Peningkatan jumlah peserta rakor/pelatihan penghitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana alam lingkup kabupaten

3.5. Perkotaan

Kota adalah suatu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial. Perkembangan kota merupakan tuntutan sekaligus jawaban dari perkembangan penduduk. Pertumbuhan penduduk menjadi faktor yang sangat berpotensi besar mempengaruhi terjadinya perubahan terhadap lingkungan. Karena pertumbuhan penduduk yang relatif cepat akan secara otomatis berdampak terhadap penggunaan sumber daya alam untuk aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini dihadapi oleh sebagian besar kota/ kabupaten di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Pematang.

Setiap orang memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup. Jika populasi dapat bertahan pada taraf yang ideal, maka keseimbangan antara lingkungan dan regenerasi populasi dapat tercapai. Tanpa adanya peningkatan perekonomian dan pendidikan yang baik, peningkatan penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan peningkatan kebutuhan dan kepentingan yang akan menyebabkan peningkatan kebutuhan air, peningkatan jumlah kendaraan dan bahan bakar, peningkatan jumlah rumah tangga miskin, rendahnya pendidikan masyarakat, peningkatan permukiman kumuh yang tidak dapat mengelola limbah cair dan sampah, pertumbuhan industri dan. Hal – hal tersebut di atas akan menyebabkan terjadinya peningkatan alih fungsi lahan pertanian/perkebunan dan peningkatan lahan kritis, meningkatnya timbulan sampah, peningkatan konsentrasi polutan udara, meningkatnya konsentrasi polutan air sungai dan sumur sehingga akan menyebabkan besarnya/meningkatnya penderita penyakit. Secara rinci analisis *state*, *pressure*, dan *respons* kondisi perkotaan Kabupaten Pematang sebagai berikut :

3.5.1. Analisis *State*

Analisis status kondisi Kabupaten Pemalang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

A. Luas Wilayah, Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

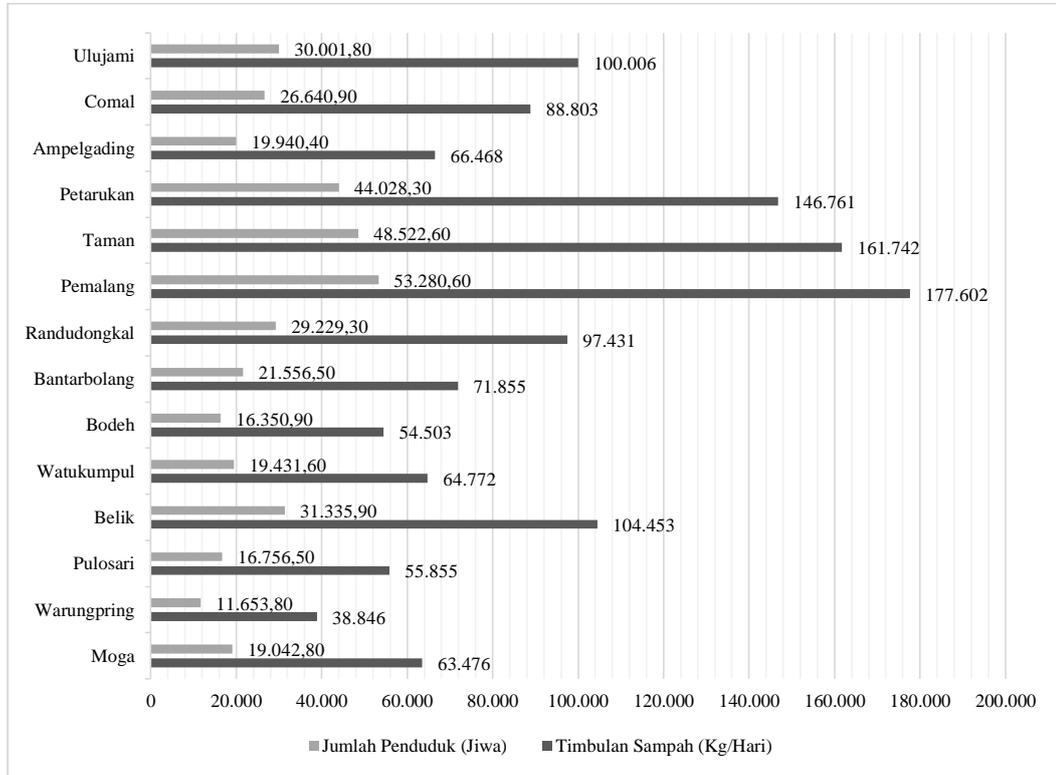
Wilayah Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan dengan luas wilayah 1.115,30 km² dengan jumlah penduduk 1.292.573 jiwa dan pertumbuhan penduduk rata-rata 0,31%. Pertumbuhan penduduk rata-rata di Kabupaten mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pemalang sebesar 0,34%. Pertumbuhan penduduk yang relatif kecil tidak terlalu memberikan tekanan terhadap lingkungan sehingga dampak buruk ke lingkungan dapat diminimalisir.

Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang berdasar tahun data BPS tahun 2016, mengalami trend kenaikan di semua wilayah kecamatan. Kecamatan di wilayah perkotaan yaitu Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Taman masih menduduki peringkat atas jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pemalang. Tingkat pertumbuhan penduduk di kecamatan tersebut berada di bawah rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pemalang sebesar 0,27%. Sementara itu, Kecamatan Comal merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 3.346,04 jiwa/km², karena jumlah penduduk yang banyak tinggal di wilayah yang relatif kecil. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah terdapat di Kecamatan Watukumpul sebesar 502,03 jiwa/km² (**Lampiran Tabel 41**).

B. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah

Salah satu permasalahan akibat kenaikan jumlah penduduk adalah kenaikan jumlah timbulan sampah. Sampah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah padat dari aktivitas penduduk sehari-hari harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah kesehatan. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik juga meminimalisir permasalahan sosial akibat sampah.

Jumlah timbulan sampah paling besar terdapat di ibukota Kabupaten Pemalang yaitu Kecamatan Pemalang sebesar 53.280,6 kg/hari. Perkiraan timbulan sampah dan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat dilihat pada (Lampiran **Tabel 41**) dan gambar berikut.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang, 2017

Gambar 3. 27 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Pemalang Tahun 2017

C. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi

Kecamatan Pemalang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perkantoran dan transportasi sehingga jumlah timbulan yang dihasilkan paling besar dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Jumlah timbulan sampah yang besar mendasari kegiatan fisik dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pemalang. Kegiatan fisik lainnya dalam pengelolaan sampah yaitu TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) dengan lokasi kegiatan : Kelurahan Pelutan, Desa Taman, dan Kantor Unit Kebersihan dan Pertamanan. Adapun pelaksana kegiatan diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang (Lampiran **Tabel 43**).

3.5.2. Analisis *Pressure*

Tekanan persampahan paling utama adalah banyaknya jumlah penduduk. Produksi sampah terbanyak berasal dari Kecamatan Pemalang sebesar 53.280,6 kg/hari dengan jumlah penduduk sebesar 177.602 jiwa, sedangkan produksi sampah terkecil berasal dari Kecamatan Warungpring sebesar 11.653,80 kg/hari dengan jumlah penduduk 38.846 jiwa. Jumlah sampah harian ditimbun di TPA cukup besar yaitu sebanyak 138 ton, sedangkan jumlah sampah harian tidak terkelola sebesar 91 ton. Timbulan sampah sebesar itu diangkut ke TPA dengan menggunakan alat angkut sampah. Sampah di TPA dikelola dengan ditempatkan pada segmen-segmen yang ada di TPA sebelum nantinya diratakan untuk ditutup dengan tanah. Sisa sampah yang belum terolah ini memerlukan penanganan supaya tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.

Sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang melalui Unit Kebersihan dan Pertamanan melayani wilayah perkotaan. Secara rinci kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang disajikan sebagai berikut.

1	Luas Daerah Pelayanan Pengelolaan Sampah	:	200,548 km ²
2	Persentase Cakupan Daerah Pelayanan	:	17,98%
3	Jumlah Timbulan Sampah Harian	:	
	3.1 Wilayah kota otonom		- ton
	3.2 Wilayah kabupaten		229 ton
	3.3 Wilayah ibu kota kabupaten		- ton
4	Komposisi Sampah Menurut Materi		
	4.1 Sisa makanan	:	39,5%
	4.2 Kayu, ranting, dan daun	:	4%
	4.3 Kertas	:	7 %
	4.4 Plastik	:	22,5%
	4.5 Logam	:	3,5%
	4.6 Kain dan tekstil	:	5,5%
	4.7 Karet dan kulit	:	5,5%
	4.8 Kaca	:	4%
	4.9 Lainnya	:	8,5%
5	Jumlah Timbulan Sampah harian Menurut Sumber		
	5.1 Rumah Tangga	:	137,4 ton
	5.2 Kantor	:	11,45 ton
	5.3 Pasar tradisional	:	22,9 ton
	5.4 Pusat perniagaan	:	16,03 ton
	5.5 Fasilitas public	:	9,16 ton
	5.6 Kawasan	:	27,48 ton
	5.7 Lainnya	:	4,58 ton
6	Jumlah Sampah Terolah harian		

6.1	Komposting	:	4 ton
6.2	Daur ulang untuk bahan baku	:	- ton
6.3	Daur ulang untuk produk kreatif	:	1 ton
6.4	Bahan bakar, <i>RDF</i>	:	- ton
6.5	Dikelola bank sampah	:	0.33 ton
6.6	Daur ulang menjadi biogas	:	- ton
6.7	Lainnya	:	- ton
7	Jumlah Sampah harian Ditimbun di TPA	:	138 ton
8	Jumlah Sampah harian Tidak Terkelola	:	91 ton

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2017

3.5.3. Analisis Response

Upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang salah satunya digambarkan dari adanya kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang yang didukung dengan adanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Salah satu sarana tersebut yaitu alat angkut persampahan yang berupa gerobak sampah, truk terbuka, dump truck dan arm roll. Jumlah dan kapasitas alat angkut persampahan Kabupaten Pemalang Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

TABEL III. 6 JUMLAH DAN KAPASITAS ALAT ANGKUT PERSAMPAHAN TAHUN 2017

No	Jenis Alat Angkut	Jumlah	Kapasitas	Satuan (m ³ atau ton)	Ritasi	Jumlah beroperasi
1	Gerobak Sampah	50	0.5	M ³	2	100
2	Gerobak motor sampah	-	-	-	-	-
3	Truk Terbuka	2	3	M ³	2	4
4	Truk <i>Compactor</i>	-	-	-	-	-
5	<i>Dump Truck</i>	26	5	M ³	3	78
6	<i>Arm Roll</i>	6	5	M ³	3	18
7	<i>Trailer Container</i>	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2017

Jumlah alat angkut persampahan di Kabupaten Pemalang tersebut di atas, belum dapat mencakup pelayanan untuk seluruh wilayah Kabupaten Pemalang. Sedangkan rute pengangkutan persampahan di Kabupaten Pemalang Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL III. 7 RUTE PENGANGKUTAN PERSAMPAHAN TAHUN 2017

No	Jenis Alat Angkut	Rute Pengangkutan
1	Excavator	Pengolahan sampah di TPA Pegongsoran
2	Excavator	Pengolahan sampah di TPA Pegongsoran

No	Jenis Alat Angkut	Rute Pengangkutan
3	Buldozer	Pengolahan sampah di TPA Pegongsoran
4	Buldozer	Pengolahan sampah di TPA Pegongsoran
5	Dump Truck	Kantor UKP - TPS SBI, TPS SPGB Lawangrejo I,II,III - TPS Krasak - TPS Tanjungsari - TPS Sugihwaras - TPA - Kantor UKP
6	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Rusunawa - TPS Bojongnangka I,II - TPS Wanasari - TPS Sumberharjo - TPA - Kantor UKP
7	Dump Truck	Kantor UKP - Transfer Depo Sugihwaras - TPS Waterpark Widuri - TPS Makam Syekh Maulana Syamsudin - TPS Danasari I,II - TPA SMK NU - TPA - Kantor UKP
8	Dump Truck	Kantor UKP - RSUD M. Ashari - TPS Lap. Bojongbata - TPS Mengori - TPS Sewaka - TPS Kramat I,II - TPA - Kantor UKP
9	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Kabunan I (pantura) - TPS Kabunan II (Dasri) - TPS Kabunan III (Dpn Mushola) - TPS RS. Siaga Medika - TPS RM. Nurayana - TPS TPI Asem doyong - TPA - Kantor UKP
10	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Jebed Utara - TPS Cibelok I,II - TPS Penggarit - TPS Pasar Gondang - TPS Pener - TPA - Kantor UKP
11	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Depo Taman - TPS Bandelan - TPA - Kantor UKP
12	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Rusunawa - TPS Kantor DKK - TPS Rumah Tahanan (LP) - TPS PKBI (PDAM) - TPS SMK N 1 Pemalang - TPS Tambak Ringin - TPA - Kantor UKP
13	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Pasar Beji - TPS Pasar Banjardawa - TPA - Kantor UKP
14	Truk Terbuka	Kantor UKP - TPS Bojongbata (Gardu Induk PLN) - TPS MAN - TPS MTSN - TPA - Kantor UKP
15	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Tembara - TPS Kalibaros - TPS Danayasa Buaran - TPS SMK PGRI Kaligelang - TPS Saradan - TPA - Kantor UKP
16	Arm Roll	Kantor UKP - TPS Lapangan Tertib - TPA - Kantor UKP
17	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Gedung Banjar I,II,III, - TPS dr. Sindu - TPS Tegalmлатi I,II - TPS OW. Nyamplungsari - TPS Klareyan - TPS Kauman - TPS Kalirandu - TPS Pasar Pegundan - TPS SMK N 1 Pegundan dan Petarukan - TPS SMA Nusantara - TPS SD N Ambokulon - TPA - Kantor UKP
18	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Pasar Comal - TPS RM. Prima - TPA - Kantor UKP
19	Arm Roll	Kantor UKP - TPS Pasar Anyar - TPA - Kantor UKP
20	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Pasar Randudongkal - TPA - Kantor UKP
21	Dump Truck	Kantor UKP - TPS PJKA Pemalang - TPS SMA N 2 PML - TPS Polres Pemalang - TPA - Kantor UKP
22	Truk Terbuka	Kantor UKP - TD Mulyoharjo - TPA - Kantor UKP
23	Arm Roll	Kantor UKP - TPS Pasar Pagi Pemalang - TPS Terminal Induk PML - TPA - Kantor UKP
24	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Pasar Belik - TPS Bulakan - TPS Terminal Belik - TPS Bantarbolang - SMA N 1 Bantarbolang - TPA - Kantor UKP
25	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Pasar Buah dan sayur - TPS Pasar Pagi Pemalang - TPA - Kantor UKP
26	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Pasar Petarukan - TPS Pasar Ulujami - TPS Sirangkang - TPS SMA N 1 Sirangkang - TPA - Kantor UKP
27	Dump Truck	Kantor UKP - TD Kesambiduwur - Alun-alun Kota Pemalang - TPS Paduraksa - TPA - Kantor UKP
28	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Pasar Comal - TPS Grosir Comal - TPA - Kantor UKP
29	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Hotel Regina - TPS SPBG Petarukan - TPS RM. Pringjajar - TPS RM. Langgeng - SMK N 1 Ampelgading - TPS

No	Jenis Alat Angkut	Rute Pengangkutan
		Garmen Comal - TPS Pasar Ujung Gede - TPS Si Kayu - TPS Bumirejo I,II,III,IV,V,VI - TPS SMK Pamutih - TPS Bendungan Pamutih - TPS SMP 4 Tumbal - TPA - Kantor UKP
30	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Wanarejan Utara I,II,III - TPA - UKP
31	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Pasar Moga - TPS RSI Moga - TPS SMA N Moga - TPA - Kantor UKP
32	Dump Truck	Kantor UKP - TPS Kemiri Sewu - TPS Pasar Warungpring - TPS Panti Jompo - TPS RB Mardotilaah - TPA - Kantor UKP

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2017

Pelaksanaan pengolahan sampah di Kabupaten Pemalang pada sumber sampah meliputi lokasi pemukiman, pasar, perkantoran, sekolah dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Adanya karena keterbatasan jumlah armada termasuk supir dan tenaga bongkar muat sampah menjadikan penyebab belum semua wilayah di Kabupaten Pemalang dapat terlayani. Berikut pengolahan Sampah Di Sumber Sampah Tahun 2016 Kabupaten Pemalang.

TABEL III. 8 PENGOLAHAN SAMPAH DI SUMBER SAMPAH TAHUN 2016

No	Lokasi	Alamat	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan	Skala Pengolahan	Teknologi yang Digunakan	Pelaku atau Pelaksana
1	Pasar	Pasar Buah dan sayur Pemalang	Pengolahan sampah organik (sisa sayur dan buah) menjadi pupuk organik dengan sistem aerob	Pemanfaatan pupuk organik untuk petani sayur	kecil	Komposter	Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang
2	Sekolah	SMP N 1 Pemalang	Pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik dengan sistem anaerob	Pemanfaatan pupuk organik untuk keperluan berkebun di sekolah	kecil	komposter	Warga sekolah
3	Sekolah	SMP N 5 Pemalang	Pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik dengan sistem anaerob	Pemanfaatan pupuk organik untuk keperluan berkebun di sekolah	kecil	Komposter	Warga sekolah
4	Sekolah	SMA N 1 Pemalang	Pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik dengan sistem anaerob	Pemanfaatan pupuk organik untuk keperluan berkebun di sekolah	kecil	Komposter	Warga sekolah
5	Sekolah	SMA N 2 Pemalang	Pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik dengan sistem anaerob	Pemanfaatan pupuk organik untuk keperluan berkebun di sekolah	kecil	Komposter	Warga sekolah
6	Sekolah	SMA N 3 Pemalang	Pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik dengan sistem anaerob	Pemanfaatan pupuk organik untuk keperluan berkebun di sekolah	kecil	Komposter	Warga sekolah
7	Sekolah	SMK N 1 Pemalang	Pengolahan sampah organik menjadi pupuk	Pemanfaatan pupuk organik untuk keperluan berkebun di	kecil	Komposter	Warga sekolah

No	Lokasi	Alamat	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan	Skala Pengolahan	Teknologi yang Digunakan	Pelaku atau Pelaksana
			organik dengan sistem anaerob	sekolah			
8	Perumahan	Kelurahan Paduraksa Kec. Pemalang	Pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik	pemanfaatan pupuk organik untuk keperluan berkebun di Kelurahan Paduraksa	menengah	Komposter	Paguyupan/ kelompok masyarakat di Kelurahan Paduraksa
9	Perumahan	Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang	Pencacahan sampah plastik	Pemanfaatan cacahan plastik digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik daur ulang	menengah	Giling	Paguyupan/ kelompok masyarakat di Kelurahan Pelutan
10	Perumahan	Desa Sewaka Kec. Pemalang	Pencacahan sampah plastik	Pemanfaatan cacahan plastik digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik daur ulang	menengah	Giling	Paguyupan/ kelompok masyarakat di Desa Sewaka
11	Perumahan	Kelurahan Sugihwaras Kec. Pemalang	Pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik dan pencacahan sampah plastik	Pemanfaatan pupuk organik untuk keperluan bercocok tanam di lingkungan kelurahan Sugihwaras dan cacahan plastik digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik daur ulang	Menengah	Kopomster untuk pengolahan pupuk dan giling untuk pencacah plastik	Paguyupan/ kelompok masyarakat di Kelurahan Sugihwaras
12	Perumahan	Desa Widodaren Kec. Petarukan	Pengolahahn sampah organik menjadi pupuk organik	pemanfaatan pupuk organik untuk keperluan berkebun di Desa Widodaren	menengah	Komposter	Paguyupan/ kelompok masyarakat di Desa Widodaren

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab Pemalang, 2017

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang bisa berjalan dengan baik tentunya didukung oleh prasarana yang baik pula. Prasarana pengelolaan sampah

tersebut berupa TPA dan TPST. Berikut disajikan tabel prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang.

TABEL III. 9 TPA DAN TPST TAHUN 2016

Jenis Fasilitas	Lokasi	Ijin Lingkungan	Penjelasan Mengenai Ijin Lingkungan	Penanggung Jawab	Tahun Mulai Beroperasi	Luas Lahan (ha)	Sistem Operasi
TPA	Dusun Pesalakan Desa Pegongoran Kec. Pemalang	-	Dokumen UKL-UPL disusun tahun 2013	DLH Kabupaten Pemalang	2017	1,20	<i>Controlled landfill</i>
TPST	Komplek pasar Buah dan Sayur Pemalang	-	SPPL	DLH Kabupaten Pemalang	2009	0,30	
TPST	Kelurahan Paduraksa	-	SPPL	DLH Kabupaten Pemalang	2012	0,20	
TPST	Kelurahan Sugihwaras	-	SPPL	DLH Kabupaten Pemalang	2013	0,20	
TPST	Desa Tegalmati	-	SPPL	DLH Kabupaten Pemalang	2015	0,20	
TPST	Desa Widodaren	-	SPPL	DLH Kabupaten Pemalang	2016	0,20	
TPST	Kelurahan Bojombata	-	SPPL	DLH Kabupaten Pemalang	2016	0,20	
TPST	Kelurahan Petarukan	-	SPPL	DLH Kabupaten Pemalang	2017	0,20	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab Pemalang, 2017

Selain upaya pengelolaan sampah yang telah dilakukan Kabupaten Pemalang diatas, upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang juga didukung dari adanya program atau kegiatan dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah. Salah satu program tersebut adalah program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Program tersebut memiliki sasaran program antara lain:

- Tersusunnya dokumen kebijakan persampahan
- Tersedianya sarana dan prasarana persampahan
- Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan sampah
- Bertambahnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik

- Terselenggaranya kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan persampahan
- Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengelolaan persampahan
- Pelaksanaan lomba kebersihan tingkat RW wilayah perkotaan, Pelatihan Fermentasi Limbah Rumah Tangga
- Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi
- Terselenggaranya pertemuan/koordinasi penilaian kota sehat/adipura
- Terselenggaranya pemantauan lokasi titik pantau adipura penilaian adipura, becak sampah dan tempat sampah terpilah
- Pembuatan dokumen adipura

BAB IV

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Pemalang mempunyai komitmen terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dimana dalam proses pembangunan tetap memperhatikan kualitas lingkungan. Sebagaimana yang tertuang dalam visi RPJMD Kabupaten pemalang Tahun 2016-2021 yaitu “*Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri Dan Sejahtera*”, perwujudan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup dijabarkan dalam Misi Ke-4 yaitu “Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah” dengan strategi dan kebijakan yang mendukung antara lain :

a. Strategi :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan;
2. Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi dan penyediaan air baku;
3. Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pedesaan (drainase, air bersih, sanitasi, permukiman kumuh);
4. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
5. Peningkatan RTH (Ruang Terbuka Hijau);
6. Peningkatan jaringan energi dan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbaharukan);
7. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, dan perbaikan sistem manajemen transportasi; dan
8. Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup.

b. Kebijakan

1. Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang berbasis kewilayahan;
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keselamatan dalam berlalu lintas; dan
3. Peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan fasilitas penunjang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Guna mendukung upaya pencapaian visi, misi, strategi dan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang terus mengembangkan inovasi-inovasi dalam upaya memelihara fungsi dan kualitas lingkungan hidup. Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru. Inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai pemasukan hal-hal baru yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di daerah. Inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup mencakup tindak lanjut dari isu prioritas lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebelumnya. Inovasi yang dimaksud berupa program dan kegiatan yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sumberdaya alam seperti air, udara, tanah, hutan dan lainnya merupakan sumberdaya yang penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk manusia. Bahkan, sumberdaya alam ini tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup manusia, tetapi juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan yang lebih luas. Namun, semua itu bergantung pada bagaimana pengelolaan sumberdaya alam tersebut, karena pengelolaan yang buruk berdampak pada kerugian yang akan ditimbulkan dari keberadaan sumberdaya alam, misalnya dalam bentuk banjir, pencemaran air, dan sebagainya.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundang-undangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan hidup telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif yang dilakukan dapat dalam bentuk inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga daerah dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.

1. Inisiatif Yang Dikembangkan Oleh Masyarakat Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pengembangan inisiatif dari masyarakat yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan mendukung program-program dari pemerintah melalui ikut berperan aktif dalam setiap pelaksanaan program. Peran aktif masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui :

1. Adanya LSM yang bergerak dibidang lingkungan

Keberadaan LSM lingkungan juga ikut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup merupakan mitra yang baik dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Saat ini, hanya terdapat 2 (dua) LSM yang ada di Kabupaten Pematang. LSM Sahabat Alam dan Banowati Cinta Lingkungan merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Sahabat Alam dengan kegiatan penyelamatan mangrove, sedangkan Banowati Cinta Lingkungan dengan kegiatan penyelamatan lahan kritis. LSM akan menjadi pendukung bagi masyarakat baik dalam menggerakkan pengembangan pengelolaan lingkungan, penanganan permasalahan lingkungan maupun memberikan pendampingan berupa fasilitasi dalam berbagai hal. Bagi Pemerintah Daerah, keberadaan LSM juga akan memberikan kritik, saran, masukan baik dalam penyelesaian permasalahan lingkungan maupun dalam pengambilan kebijakan di bidang lingkungan hidup (Lampiran **Tabel 45**)

2. Peran aktif masyarakat menjadi Perintis Lingkungan Hidup
Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Beberapa penghargaan yang diterima oleh masyarakat terkait dengan perannya dalam lingkungan hidup mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya mengenai penerima penghargaan lingkungan hidup dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 46**.
3. Pengembangan program yang diinisiasi oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah (Lampiran **Tabel 47**).

Beberapa program yang dikembangkan antara lain :

- a) Pelatihan Pengelolaan Sampah Anorganik/Organik
Program pelatihan pengelolaan sampah anorganik/organik diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan kelompok sasaran pemuda, PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), organisasi masyarakat, kelompok masyarakat di 7 (tujuh) desa.
- b) Gerakan Sapu Bersih Sampah (Saber Sampah)
Program Saber Sampah diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan kelompok sasaran pengunjung *Car Free Day* di Alun-Alun Kabupaten Pemalang.
Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan, dengan menyalurkannya setiap tindakan yang menyalahi peraturan pemerintah melalui kotak pengaduan yang disediakan oleh OPD di Kabupaten Pemalang. Selama kurun waktu tahun 2017, pengaduan masyarakat yang terkait dengan lingkungan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat sebanyak 6 (enam) pengaduan (Lampiran **Tabel 44**). Pengaduan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup kemudian ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh Dinas Lingkungan Hidup.



Kondisi Eksisting KEE Mangrove Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang



Sosialisasi Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang



Kegiatan Sapu Bersih (SABER) Sampah pada Car Free Day di Alun-Alun Pemalang

Sumber : Dokumentasi, 2017

Gambar 4. 1 Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

2. Inisiatif Terhadap Isu Perubahan Iklim

Inisiatif yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang terhadap isu perubahan iklim dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:

- a) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada setiap proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Pemalang, seperti penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Pemalang.
- b) Melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang menimbulkan dampak lingkungan secara priodik melalui pengawasan izin lingkungan. dalam rangka memantau pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) oleh kegiatan usaha yang ada secara periodik melakukan kegiatan pengawasan ke setiap usaha baik yang sudah memiliki dokumen UKL/UPL maupun yang belum (Lampiran **Tabel 36**). Hal ini sebagai wujud mengamankan janji dari pemrakarsa kegiatan yang sudah tertuang di dalam dokumen UKL/UPL yang dibuat.

- c) Menginisiasi gerakan *Car Free Day* sebagai salah satu upaya dalam mengurangi pencemaran udara yang dapat berdampak pada perubahan iklim.

3. Inisiatif Terhadap Perbaikan Kualitas Lingkungan

Inisiatif terhadap perbaikan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang antara lain melalui kegiatan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

TPST didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pemisahan dan pengolahan sampah secara terpusat. Kegiatan pokok di TPST adalah :

- a) Pengolahan lebih lanjut sampah yang telah dipilah di sumbernya.
- b) Pemisahan & pengolahan langsung komponen sampah kota.
- c) Peningkatan mutu produk *recovery/recycling*.

Sehingga fungsi TPST adalah sebagai tempat berlangsungnya pemisahan, pencucian/pembersihan, pengemasan, dan pengiriman produk daur ulang sampah.

Pembangunan TPST di Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang di Kelurahan Pelutan, Desa Taman dan Kantor Unit Kebersihan dan Pertamanan (Lampiran **Tabel 43**). Selain itu kegiatan pengelolaan sampah organik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang di Desa Sewaka, Desa Widodaren, Kelurahan Mulyoharjo sejak tahun 2016.



Armada Pengangkut Sampah DLH Kabupaten Pemalang



TPA Pegongsoran Kabupaten Pemalang

Sumber : Dokumentasi, 2017

Gambar 4. 2 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Dalam Mendukung Perbaikan Kualitas Lingkungan Kabupaten Pemalang

4. Inisiatif Terhadap Perbaikan Kualitas Sumberdaya Alam

Inisiatif terhadap perbaikan kualitas sumberdaya alam yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang melalui kegiatan :

a. Rehabilitasi lingkungan.

Rehabilitasi lingkungan perlu dilaksanakan mengingat lingkungan yang sudah dimanfaatkan oleh manusia demi kepentingan yang cukup beragam memberikan dampak mulai dari yang kecil, menengah dan besar terhadap lingkungan. Jika lingkungan tidak direhabilitasi akan berakibat fatal pada masa yang akan datang, karena bumi bukanlah milik kita tapi titipan untuk cucu dimasa yang akan datang, sehingga perlu dijaga kelestariannya untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi yang akan datang.

Selain rehabilitasi upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk merehabilitasi lingkungan, salah satunya adalah dengan melakukan penghijauan dan reboisasi terhadap kondisi lahan dan tanah yang mulai kritis dan tandus akibat aktivitas membakar lahan, menebang pohon secara ilegal, penambangan tanpa reklamasi dan melaksanakan perkebunan tidak beraturan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkannya. Peranan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam hal melaksanakan program penghijauan ini sangat dituntut demi tercapainya sasaran menuju lingkungan yang sehat. Keberhasilan program reboisasi dan rehabilitasi lahan akan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan terutama dalam aspek:

1. Fungsi hidrologi
2. Fungsi perlindungan tanah
3. Stabilitas iklim mikro
4. Penghasil O₂, dan penyerap gas-gas pencemar udara
5. Potensi sumberdaya pulih yang dapat dipanen
6. Pelestarian sumberdaya plasma nutfah
7. Perkembangbiakan ternak dan satwa liar
8. Pengembangan kepariwisataan dan rekreasi
9. Menciptakan kesempatan kerja
10. Penyediaan fasilitas pendidikan dan penelitian.

Pemerintah Kabupaten Pemalang menaruh komitmen tinggi di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pemalang berusaha dan berupaya untuk melakukan pengelolaan, pelestarian, pengendalian, perlindungan di bidang lingkungan hidup di daerah. Untuk dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka diperlukan upaya strategis didalam pengelolaan lingkungan dalam kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten

Pemalang.

Di Kabupaten Pemalang sendiri sudah dilakukan kegiatan penghijauan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Kegiatan penghijauan adalah penanaman kembali lahan kritis di luar kawasan hutan yang ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kondisinya sehingga fungsinya sebagai media produksi, tata air maupun pendukung kehidupan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan peruntukannya.

Realisasi penghijauan di Kabupaten Pemalang Tahun 2017 mencapai luasan 361,8 hektar yang berada di Kecamatan Belik dan Watukumpul dengan jumlah pohon ditanam adalah 206.419 batang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang serius dalam rangka merehabilitasi lingkungan hidup di daerahnya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman ditempati.

5. Inisiatif Terhadap Tata Kelola Lingkungan

Kabupaten Pemalang sampai dengan Tahun 2017 telah memiliki 8 (delapan) produk hukum dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup (Lampiran **Tabel 48**). Adapun produk hukum tersebut yaitu :

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang 2011-2031.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang.
- c) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah.
- d) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang.
- e) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.

- f) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Sinergitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang.
- g) Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 522 Tahun 2010 tentang Pemetaan Kawasan Hutan Kota Sekitar Terminal Induk Kota Pemalang, Obyek Wisata Widuri, Pelabuhan Sugihwaras, Blok Pajasaka Desa Danasari dan Blok Muara Desa Asemdayong.
- h) Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/563/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 188.4/660/Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Mangrove Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
- i) Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/564/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Diharapkan dengan adanya peraturan ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pemalang.

Dana anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup sebesar Rp.5.650.410.000,- (Lampiran **Tabel 49**). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan beberapa program pengelolaan lingkungan hidup yaitu :

- a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- e) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- f) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- g) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- h) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- i) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- j) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dokumentasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan di Kabupaten Pemalang antara lain dapat dilihat pada gambar berikut.



Pengambilan Sampel Air Sungai dan Sumber Mata Air di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang



Pengambilan Sampel Air Limbah Industri Tahu di Kec. Randudongkal Kabupaten Pemalang



Uji Udara Ambien di depan PT. Daiwaboo Pemalang

Sumber : Dokumentasi, 2017

Gambar 4. 3 Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

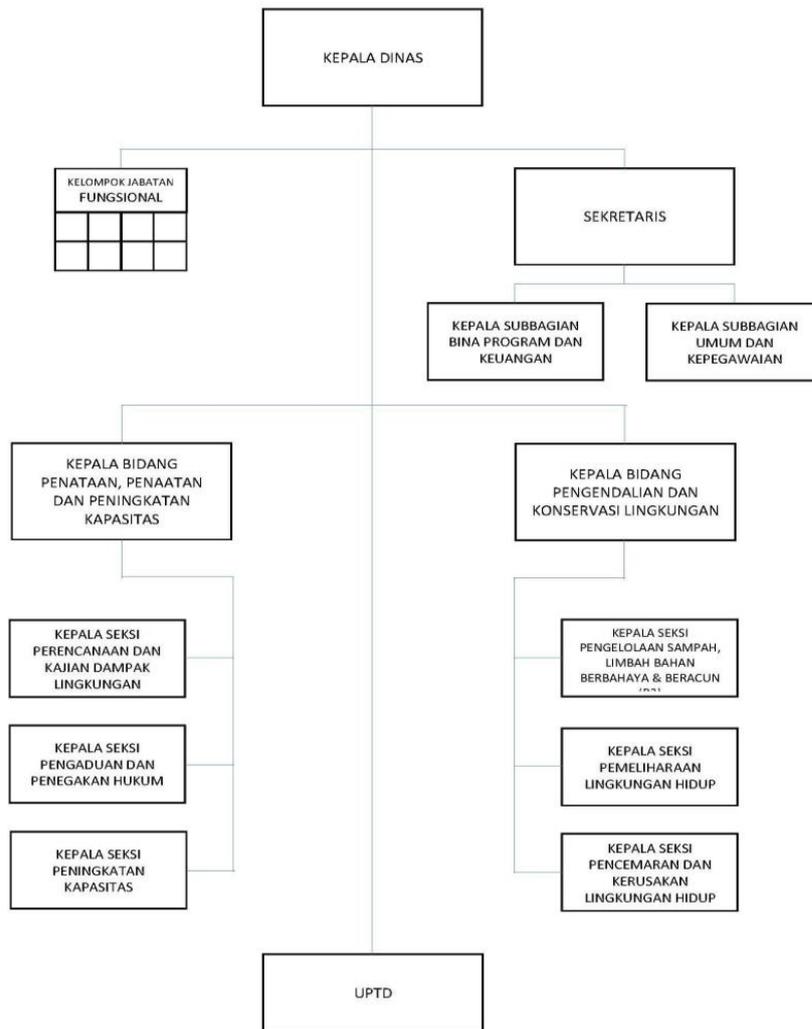
Dalam mendukung kinerja kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Adapun beberapa upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia antara lain melalui :

- a) Peningkatan pengetahuan serta keterampilan SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Pelatihan penerapan program efektifitas pengelolaan lingkungan hidup.

- c) Pengembangan program serta kegiatan tanggung jawab perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*).

6. Inisiatif Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah

Inisiatif peningkatan kapasitas lembaga daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan peningkatan kualitas kinerja personil. Program yang dilakukan adalah program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Dalam program tersebut, dilakukan kegiatan yang menunjang pengembangan kualitas SDM perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsinya. Adapun personel DLH Kabupaten Pemalang hanya sejumlah 64 orang (Lampiran **Tabel 50**). Jumlah personel tersebut dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya diwadahi dalam kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Selain itu, juga terdapat staf fungsional sejumlah 1 (satu) orang (Lampiran **Tabel 51**). Secara diagramatis, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Perbup Nomor 63 Tahun 2016

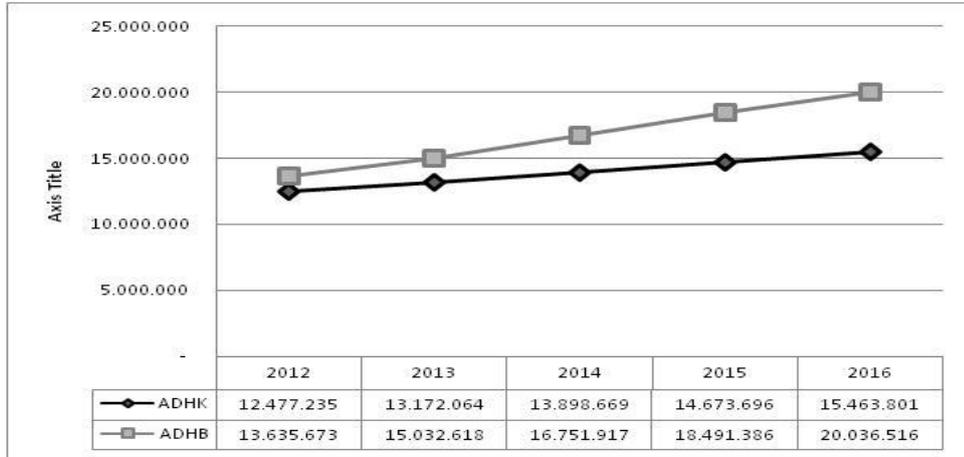
Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Peningkatan kapasitas OPD dilakukan melalui beberapa program antara lain :

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melalui kegiatan :
 - a) Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi OPD
 - b) Pengiriman pegawai pada seminar/workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melalui kegiatan Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi OPD

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai

aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Dari nilai PDRB tahun 2012-2016 mengalami peningkatan baik PDRB berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Nilai PDRB dapat dilihat pada Lampiran **Tabel 52 dan Tabel 53** serta grafik berikut ini.



Sumber: Badan Statistik Kabupaten Pemalang, 2017

Gambar 4. 5 Perkembangan PDRB ADHB Dan ADHK Kabupaten Pemalang

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2017 merupakan gambaran informasi terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Pemalang yang didukung oleh hasil dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh OPD Kabupaten Pemalang.

Pemerintah Kabupaten Pemalang menaruh komitmen tinggi di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pemalang berusaha dan berupaya untuk melakukan pengelolaan, pelestarian, pengendalian, perlindungan di bidang lingkungan hidup di daerah. Untuk dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka diperlukan upaya strategis didalam pengelolaan lingkungan dalam kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten Pemalang.

Dalam upaya pengelolaan lingkungan, berbagai program telah dilakukan oleh berbagai pihak baik oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, masyarakat maupun dunia usaha, hal ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Beberapa program terkait dengan lingkungan yang telah dilaksanakan antara lain program berkala seperti pengujian terhadap kualitas air, mendorong pembangunan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) pada sejumlah industri, konservasi sungai dan sumberdaya air, pengendalian banjir, reboisasi, pengembangan teknologi pengelolaan sampah serta pemantauan terhadap kualitas lingkungan hidup.

Beberapa isu lingkungan hidup yang terdapat di Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Pembangunan jalan tol, yang mengakibatkan peningkatan suhu udara akibat peningkatan aktivitas transportasi.

2. Belum terimplementasinya konsep pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) dengan baik diseluruh wilayah Kabupaten Pemalang
3. Penurunan kualitas air sungai di Kabupaten Pemalang, terutama dari segi mikrobiologi (konsentrasi *Fecal Coliform* dan *Total Coliform* lebih tinggi dari kriteria baku mutu)
4. Degradasi lingkungan akibat banjir yang terjadi di beberapa daerah terutama di wilayah bagian utara Kabupaten Pemalang

Berdasarkan hasil analisis metode PSR (*Pressure, State, dan Response*) terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Kependudukan

Tekanan utama dari kependudukan adalah meningkatnya jumlah timbulan sampah yang memerlukan penanganan sehingga sampah dapat dikelola dengan baik.

2. Permukiman

Tekanan permukiman selain sampah adalah dalam kaitannya dengan pencemaran air. di Kabupaten Pemalang masih ditemukan rumah tangga yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka seperti sungai. Perilaku BABS ini merupakan budaya yang ada di masyarakat. Perilaku BABS masih banyak ditemukan di wilayah bagian utara.

3. Pertanian

Tekanan utama dari pertanian adalah tingginya penggunaan pupuk anorganik dalam pengolahan lahan baik untuk pertanian maupun perkebunan. Bentuk tekanan dari pertanian adalah tingginya residu pupuk yang masuk ke sungai sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai.

4. Industri

Tekanan utama dari kegiatan industri adalah terjadinya pencemaran air akibat limbah yang dihasilkan dari aktifitas industri terutama industri rumah tangga yang tidak memiliki IPAL.

State (status) digambarkan oleh kondisi media lingkungan hidup yang terkena dampak. Dalam hal ini adalah sungai yang tercemar serta kerusakan lahan di wilayah Kabupaten Pemalang.

1. Lahan

Adanya lahan kritis di daerah Kecamatan Bantarbolang perlu diwaspadai. Lahan kritis tersebut seluas 4,3 ha yang berada di kawasan hutan produksi. Selain permasalahan lahan kritis, yang perlu diwaspadai adalah desakan kebutuhan pembangunan yang dapat memicu adanya alih fungsi lahan juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu ditangani, sehingga diharapkan aktivitas guna lahan yang berkembang sesuai dengan fungsi peruntukannya.

2. Air

Adanya pencemaran air yang ditandai dengan adanya kandungan *Coliform* dan *Fecal Coliform* yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Hal ini diperparah dengan ditemukannya sebagian masyarakat yang masih melakukan BABS di sungai, sehingga ikut menambah kandungan *Coliform* dan *Fecal Coliform* yang ada dalam air sungai.

3. Udara

kualitas udara di Kabupaten Pemalang sesuai dengan pengujian yang telah dilakukan dalam keadaan aman, dalam arti di bawah ambang batas yang dipersyaratkan. Hanya saja ditemukan kandungan debu dalam konsentrasi tinggi, terutama pada lokasi pembangunan jalan tol.

Respon merupakan tingkat upaya dari pemerintah terhadap perbaikan kualitas lingkungan yaitu adanya produk hukum dan upaya nyata yang telah dilakukan, yakni :

1. Produk Hukum :

Produk hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan pada tahun 2016 adalah :

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang 2011-2031.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang.
- c) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah.

- d) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang.
 - e) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
 - f) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Sinergitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang.
 - g) Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 522 Tahun 2010 tentang Pemetaan Kawasan Hutan Kota Sekitar Terminal Induk Kota Pemalang, Obyek Wisata Widuri, Pelabuhan Sugihwaras, Blok Pajasaka Desa Danasari dan Blok Muara Desa Asemdayong.
 - h) Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/563/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 188.4/660/Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Mangrove Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
 - i) Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/564/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
2. Upaya nyata yang telah dilakukan antara lain adalah :
- a) Melakukan pengujian kualitas udara ambien secara berkala.
 - b) Melakukan pembangunan dan penanaman pada bangunan restorasi trotoar.
 - c) Memberikan pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik.
 - d) Memberikan edukasi pada masyarakat melalui kegiatan ‘Sapu Bersih Sampah (SABER SAMPAH)’.
 - e) Mengoptimalkan fungsi TPST dan TPA dalam pengelolaan sampah.
 - f) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
 - g) Melakukan pengujian kualitas air sungai secara berkala.
 - h) Melakukan pengujian kualitas air limbah industri secara berkala.

- i) Mendorong jumlah usaha dan kegiatan agar memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).
- j) Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian sungai.

5.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Diperlukan strategi untuk mencapai target program pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang diharapkan. Strategi pengelolaan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik OPD maupun masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peningkatan kegiatan pengendalian, pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam secara mandiri dan partisipatif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. Pengembangan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses oleh setiap orang.

5.3. PENUTUP

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) dapat menjadi sumber acuan serta pemicu semangat seluruh masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 167. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2007. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 66. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2007. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 68. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2008. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 69. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 149. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2011. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 74. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2013. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2014. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 2. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2014. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 294. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2014. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 299. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

_____. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN DATA

TABEL - 1	LUAS KAWASAN LINDUNG BERDASARKAN RTRW DAN TUTUPAN LAHANNYA.....	1
TABEL - 2	LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN LAHAN UTAMA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	3
TABEL - 3	LUAS HUTAN BERDASARKAN FUNGSI DAN STATUS DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	3
TABEL - 4	LUAS LAHAN KRITIS DI DALAM DAN LUAR KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	4
TABEL - 5	EVALUASI KERUSAKAN TANAH DI LAHAN KERING AKIBAT EROSI AIR DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	4
TABEL - 6	EVALUASI KERUSAKAN TANAH DI LAHAN KERING DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	5
TABEL - 7	EVALUASI KERUSAKAN TANAH DI LAHAN BASAH DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	5
TABEL - 8	LUAS DAN KERAPATAN TUTUPAN MANGROVE DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	5
TABEL - 9	LUAS DAN KERUSAKAN PADANG LAMUN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	6
TABEL - 10	LUAS TUTUPAN DAN KONDISI TERUMBU KARANG DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	6
TABEL - 11	LUAS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	6
TABEL - 12	JENIS PEMANFAATAN LAHAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016.....	6
TABEL - 13	LUAS AREAL DAN PRODUKSI PERTAMBANGAN MENURUT JENIS BAHAN GALIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	7
TABEL - 14	REALISASI KEGIATAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI DI KABUPATEN PEMALANG.....	7
TABEL - 15	KONDISI SUNGAI DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	8
TABEL - 16	KONDISI DANAU/WADUK/SITU/EMBUNG DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	8
TABEL - 17	KUALITAS AIR SUNGAI DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	10
TABEL - 18	KUALITAS AIR DANAU/WADUK/SITU/EMBUNG DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	11

TABEL - 19 KUALITAS AIR SUMUR DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	11
TABEL - 20 KUALITAS AIR LAUT DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010.....	11
TABEL - 21 CURAH HUJAN RATA-RATA BULANAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	12
TABEL - 22 JUMLAH RUMAH TANGGA DAN SUMBER AIR MINUM DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	12
TABEL - 23 JUMLAH RUMAH TANGGA DAN FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	12
TABEL - 24 JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016.....	13
TABEL - 25 JENIS PENYAKIT UTAMA YANG DIDERITA PENDUDUK DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	14
TABEL - 26 JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	14
TABEL - 27 VOLUME LIMBAH PADAT DAN CAIR BERDASARKAN SUMBER PENCEMARAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016.....	15
TABEL - 28 SUHU UDARA RATA-RATA BULANAN DI KABUPATEN TAHUN 2017.....	16
TABEL - 29 KUALITAS AIR HUJAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	16
TABEL - 30 KUALITAS UDARA AMBIEN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	17
TABEL - 31 PENGGUNAAN BAHAN BAKAR DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	18
TABEL - 32 PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016.....	19
TABEL - 33 TABEL PERUBAHAN PENAMBAHAN RUAS JALAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	19
TABEL - 34 DOKUMEN IZIN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	20
TABEL - 35 PERUSAHAAN YANG MENDAPAT IZIN MENGELOLA LIMBAH B3 DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	20
TABEL - 36 PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN(AMDAL, UKL/UPL, SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL) DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016.....	20
TABEL - 37 BENCANA BANJIR, KORBAN, DAN KERUGIAN DI KABUPATEN PEMALANG.....	21

TABEL - 38	BENCANA KEKERINGAN, LUAS, DAN KEKERINGAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	21
TABEL - 39	BENCANA KEBAKARAN HUTAN/LAHAN, LUAS DAN KERUGIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	22
TABEL - 40	BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DAN GEMPA BUMI, KORBAN, KERUGIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	22
TABEL - 41	LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	23
TABEL - 42	PERKIRAAN JUMLAH TIMBULAN SAMPAH PER HARI DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	23
TABEL - 43	KEGIATAN FISIK LAINNYA OLEH INSTANSI DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	23
TABEL - 44	STATUS PENGADUAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	24
TABEL - 45	JUMLAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	24
TABEL - 46	PENERIMA PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	24
TABEL - 47	KEGIATAN / PROGRAM YANG DIINISIASI MASYARAKAT DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	24
TABEL - 48	PRODUK HUKUM BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	25
TABEL - 49	ANGGARAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017	25
TABEL - 50	JUMLAH PERSONIL LEMBAGA PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	26
TABEL - 51	JUMLAH STAF FUNGSIONAL BIDANG LINGKUNGAN DAN STAF YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017.....	26
TABEL - 52	RODUK DOMESTIK BRUTO ATAS HARGA BERLAKU DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016	26
TABEL - 53	PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS HARGA KONSTAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016	27

TABEL - 1
LUAS KAWASAN LINDUNG BERDASARKAN RTRW DAN TUTUPAN LAHANNYA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung		6.609	-	-	-	-
		2. Kawasan Bergambut		-	-	-	-	-
		3. Kawasan Resapan Air		1.250	-	-	-	-
	Kawasan Perlindungan Setempat	1. Sempadan Pantai		109,85	-	-	-	-
		2. Sempadan Sungai		14,25	-	-	-	-
		3. Kawasan Sekitar Danau		30,4	-	-	-	-
		4. Ruang Terbuka Hijau		5.051	-	-	-	-
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam		-	-	-	-	-
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya		2.149	-	-	-	-
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut		-	-	-	-	-
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut		-	-	-	-	-
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau		0,98	-	-	-	-
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut		-	-	-	-	-
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		1,26	-	-	-	-
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		-	-	-	-	-
	Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor		-	-	-	-	-
		2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang		-	-	-	-	-
		3. Kawasan Rawan Banjir		-	-	-	-	-
	Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam	a. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil		-	-	-	-
			b. Kawasan Keunikan Bentang Alam		-	-	-	-
			c. Kawasan Keunikan Proses Geologi		-	-	-	-
		2. Kawasan Rawan Bencana	a. Kawasan Rawan Rawan Letusan Gunung Berapi		-	-	-	-
			b. Kawasan		-	-	-	-

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rawan Gempa Bumi					
			c. Kawasan Rawan Gerakan Tanah	-	-			
			d. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif		-	-	-	-
			e. Kawasan Rawan Tsunami	-	-	-	-	-
			f. Kawasan Rawan Abrasi	-	-	-	-	-
			g. Kawasan Rawan Gas Beracun	-	-	-	-	-
		3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	a. Kawasan Imbuhan Air Tanah		-	-	-	-
			b. Sempadan Mata Air	-	-	-	-	-
	Kawasan Lindung Lainnya	1. Cagar Biosfir		-	-	-	-	-
		2. Ramsar		-	-	-	-	-
		3. Taman Buru		-	-	-	-	-
		4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah		-	-	-	-	-
		5. Kawasan Pengungsian Satwa		-	-	-	-	-
		6. Terumbu Karang		-	-	-	-	-
		7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi		-	-	-	-	-
Kawasan Budidaya				-	-	-	-	-

Keterangan : tanda (-) artinya belum ada pendataan atau data yang terkait tidak tersedia

Sumber : Badan Pertanahan Kab. Pemalang

TABEL - 2
LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN LAHAN UTAMA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Moga	1.013,41	666,59	1.520,02	275,54	706,42	96,15
2	Warungpring	809,87	1.181,99	335,67	-	101,49	17,95
3	Pulosari	4.061,38	-	2.649,04	262,55	2.125,92	55,92
4	Belik	2.201,07	671,50	3.673,48	87,32	5.917,46	88,43
5	Watukumpul	2.319,96	639,20	3.604,72	71,57	6.099,59	138,95
6	Bodeh	1.378,81	2.715,51	417,82	63,41	3.890,73	264,80
7	Bantarbolang	1.837,30	3.233,16	918,12	81,73	8.330,50	253,66
8	Randudongkal	1.609,10	3.494,59	404,19	350,91	3.261,60	79,37
9	Pemalang	1.620,20	5.234,99	675,42	0,98	2359,51	58,37
10	Taman	1.409,90	4.597,86	135,85	-	438,24	47,29
11	Petarukan	1.606,80	5.869,61	236,19	-	-	223,37
12	Ampelgading	928,14	3.013,63	175,81	-	1.292,02	149,14
13	Comal	1.196,41	1.333,11	134,0	-	-	62,02
14	Ulujami	1.650,94	2.441,94	338,57	-	-	2.288,03

Keterangan : tanda (-) artinya belum ada pendataan atau data yang terkait belum tersedia

Sumber : Badan Pertanahan Kab. Pemalang

TABEL - 3
LUAS HUTAN BERDASARKAN FUNGSI DAN STATUS
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)		
		Perhutani KPH Kab. Pemalang	BKPH Moga	BKPH Randudongkal
1	2	3	4	5
A. Berdasarkan Fungsi Hutan				
1.	Hutan Produksi	24.392,67	1.628,64	6.975,20
2.	Hutan Lindung	-	3.533,20	1.905,10
3.	Taman Nasional	-	-	-
4.	Taman Wisata Alam	-	-	-
5.	Taman Buru	-	-	-
6.	Cagar Alam	-	0,70	-
7.	Suaka Margasatwa	-	-	-
8.	Taman Hutan Raya	-	-	-
B. Berdasarkan Status Hutan				
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	-	-	8.880,30
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	-	-	-
3.	Hutan Kota	-	-	-
4.	Taman Hutan Raya	-	-	-
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	-	-	-

Keterangan :

Sumber : Perhutani KPH Kab. Pemalang, BKPH Moga, BKPH Randudongkal

No.	Fungsi Hutan	Luas Area Hutan di Kab. Pemalang
1	2	3
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	15.898,37
2.	Hutan Lindung	-
3.	Taman Nasional	-
4.	Taman Wisata Alam	-
5.	Taman Buru	-
6.	Cagar Alam	-
7.	Suaka Margasatwa	-
8.	Taman Hutan Raya	-
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	-
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	-
3.	Hutan Kota	-
4.	Taman Hutan Raya	-
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	-

TABEL - 4
LUAS LAHAN KRITIS DI DALAM DAN LUAR KAWASAN HUTAN
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Kecamatan	Kritis (Ha)				Sangat Kritis (Ha)				Penyebab Lahan Kritis
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Moga	-	-	0	-	-	-	-	0	-
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	-	-	0	-	-	-	-	0	-
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bantarbolang	4,3	-	0	-	-	-	-	0	-

Keterangan : tanda (-) artinya data yang terkait belum tersedia atau belum dilakukan pendataan

Sumber : Perhutani KPH Kab. Pemalang, BKSDA Kab. Pemalang,

TABEL - 5
EVALUASI KERUSAKAN TANAH DI LAHAN KERING AKIBAT EROSI AIR
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
1	2	3	4	5
1	< 20 cm	0,2 – 1,3	-	-
2	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	-	-
3	50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0	-	-
4	100 – 150 cm	9,0 – 12	-	-
5	> 150 cm	> 12	-	-

Keterangan : tanda (-) artinya data yang terkait belum tersedia atau belum dilakukan pendataan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 6
EVALUASI KERUSAKAN TANAH DI LAHAN KERING
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan*)	Status Melebihi/Tidak
1	2	3	4	5
1	Ketebalan Solum	< 20 cm	-	-
2	Kebatuan Permukaan	> 40 %	-	-
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	-	-
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	-	-
4	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	-	-
5	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6	Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	-	-
7	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	-	-
8	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	-	-
9	Redoks	< 200 mV	-	-
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	-	-

Keterangan : Tanda (-) artinya data yang tersedia

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang, 2014

TABEL - 7
EVALUASI KERUSAKAN TANAH DI LAHAN BASAH
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Melebihi/Tidak
1	2	3	4	5
1	Subsistensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut \geq 3 m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	-	-
2	Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH \leq 2,5	-	-
3	Kedalaman Air Tanah Dangkal	> 25 cm	-	-

Keterangan : tanda (-) artinya data yang terkait belum tersedia atau belum dilakukan pendataan

Sumber : Dinas Pertanian

TABEL - 8
LUAS DAN KERAPATAN TUTUPAN MANGROVE
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase Tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
1	2	3	4	5
1	Pemalang	47	5 s/d 25	100 s/d 400
2	Taman	47	5 s/d 25	100 s/d 400
3	Petarukan	53	5 s/d 25	100 s/d 400
4	Ulujami	1.745	5 s/d 25	100 s/d 400

Keterangan :

Sumber : Badan Pengelolaan Hutan Wilayah V, DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2017

TABEL - 9
LUAS DAN KERUSAKAN PADANG LAMUN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Presentase Area Kerusakan (%)
1	2	3	4
1.	Pemalang	-	-
2.	Taman	-	-
3.	Petarukan	-	-
4.	Ulujami	-	-

Keterangan : NIHIL : Data tidak tersedia

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pemalang

TABEL - 10
LUAS TUTUPAN DAN KONDISI TERUMBU KARANG
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Kabupaten	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemalang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan : NIHIL : Data tidak tersedia

Sumber : POSSI Kab. Pemalang – Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 11
LUAS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Jenis Penggunaan	Luas Lahan (Ha)		Sumber Perubahan
		Lama	Baru	
1	2	3	4	5
1.	Permukiman	-	11.908,19	-
2.	Industri	-	31,66	-
3.	Perkebunan	-	1.194,01	-
4.	Pertambangan	-	-	-
5.	Sawah	-	35.093,68	-
6.	Pertanian lahan kering	-	25.218,90	-
7.	Perikanan	-	2.365,93	-
8.	Lainnya (sebutkan)	-	-	-

Keterangan : tanda (-) artinya data yang terkait belum tersedia atau belum dilakukan pendataan

Sumber : Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Pemalang, Tahun 2017

TABEL - 12
JENIS PEMANFAATAN LAHAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Tambang		Besar		Tidak tersedia data tentang penggolongan skala usaha
			Menengah		
			Rakyat		
2.	Perkebunan		Besar	10,98	
			Menengah		
			Rakyat		
3.	Pertanian		Besar	531,55	
			Menengah		
			Rakyat		
4.	Pemanfaatan Hutan		Besar	28,15	
			Menengah		
			Rakyat		

Keterangan :

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2017

TABEL - 13
LUAS AREAL DAN PRODUKSI PERTAMBANGAN MENURUT JENIS BAHAN GALIAN
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	2	3	4	5	6
1			3	3	-
2			10	10	-
3			1	1	-
4			4	4	-
5			1	1	-
6			5	5	-
7			6	6	-
8			12,37	12,37	-
9			10	10	-
10			10	10	-

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 14
REALISASI KEGIATAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI DI KABUPATEN PEMALANG

No.	Kecamatan	Penghijauan			Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Belik	-	-	-	223	223	119.500
2	Watukumpul	-	-	-	138,8	138,8	86.919

Keterangan : tanda (-) artinya data yang terkait belum tersedia atau belum dilakukan pendataan

Sumber : BKPH Moga

No.	Kecamatan	Penghijauan			Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemalang	-	-	-			
2	Taman	-	-	-			
3	Petarukan	-	2,25	900			
4	Comal	-	2,375	950			
5	Ulujami	-	36	40.000			
6	Bodeh	-	4,625	1.850			
7	Ampelgading	-	-	-			
8	Bantarbolang	-	4,875	1.950	-		
9	Randudongkal	-	5	2.000			
10	Moga	-	-	-			
11	Warungpring	-	-	-			
12	Pulosari	-	75,06	44.024			
13	Belik	-	7,375	2.950			
14	Watukumpul	-	49,5	19.800			

Keterangan : Tanda (-) artinya data yang terkait belum tersedia atau belum dilakukan pendataan

Sumber : Badan Pengelolaan Hutan Wilayah V DLHK Provinsi Jawa Tengah

TABEL - 15
KONDISI SUNGAI DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sungai Comal	165	-	-	-	179.046,83	1.412,37
2	Sungai Waluh	36	-	-	-	21.614,00	1.145,60
3	Sungai Rambut	57	-	-	-	-	-
4	Sungai Layangan	7	-	-	-	-	-
5	Sungai Polaga	35	-	-	-	-	-
6	Sungai Lumeneng	23	-	-	-	-	-
7	Sungai Sragi Lama	8,375	-	-	-	-	-
8	Anak Sungai Comal	-	-	-	-	-	-
9	Anak Sungai Waluh	-	-	-	-	-	-
10	Anak Sungai Rambut	-	-	-	-	-	-
11	Sungai Kecil Bermuara ke Sungai Sragi Lama	83,1	-	-	-	-	-
12	Sungai Wilayah Kota Pemalang	61,65	-	-	-	-	-

Keterangan : Tanda (-) menunjukkan belum ada pendataan hal terkait

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pemalang

TABEL - 16
KONDISI DANAU/WADUK/SITU/EMBUNG DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Wilayah	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1	2	3	4	5
1	Tuk Wungu	Moga	0,002	-
2	Bengkok/Mandiraja	Moga	0,002	-
3	Tuk Suci	Moga	0,003	-
4	Jagel	Moga	0,045	-
5	Tegal Salam	Moga	0,045	-
6	Bawangan/Penakir	Pulosari	0,047	-
7	Pagenteran	Pulosari	0,133	-
8	Cikuwung (kiri)	Pulosari	0,062	-
9	Cikuwung (kanan)	Pulosari	0,008	-
10	Cikunang	Pulosari	0,150	-
11	Sarangan	Pulosari	0,005	-
12	Pasamoan	Pulosari	0,006	-
13	Tuk Kedondong	Pulosari	0,002	-
14	Cikendung	Pulosari	0,003	-
15	Pagengan	Belik	0,00009	-
16	Telaga Gede	Belik	0,106	-
17	Tuk Tembok	Belik	0,003	-
18	Tuk Gesing	Belik	0,003	-
19	Lubang Warak	Belik	0,003	-
20	Tuk Mangli	Belik	0,003	-
21	Tuk Kali Singit	Belik	0,003	-
22	Telaga Jendul	Watukumpul	0,182	-
23	Telaga Rengganis	Watukumpul	0,255	-
24	Mentek	Watukumpul	0,011	-
25	Gamping	Watukumpul	0,003	-
26	Jurang	Watukumpul	0,005	-
27	Ringin	Watukumpul	0,018	-
28	Cempaka	Watukumpul	0,009	-
29	Pejarakan	Watukumpul	0,008	-
30	Karangbrai	Bodeh	0,025	-
31	Rancah	Bantarbolang	0,104	-

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Wilayah	Luas (Ha)	Volume (m ³)
32	Paguyangan	Bantarbolang	0,045	-
33	Mengori	Pemalang	0,350	-
34	Pelutan	Pemalang	0,462	-
35	Danayasa	Taman	0,523	-
36	Kali Gelang	Taman	0,450	-
37	Ponowaren	Taman	0,003	-
38	Cibiyuk	Ampelgading	0,671	-
39	Tegalsari Barat	Ampelgading	0,004	-

Keterangan : Tanda (-) menunjukkan belum ada pendataan hal terkait

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pemalang

TABEL - 17
KUALITAS AIR SUNGAI DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/ thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/ L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL	TDS	TSS	DO	BOD	COD	NO2	NO3	NH3	Klorin bebas (mg/ L)	T-P (mg/ L)	Fenol (µg/ L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	Total coliform (jmlh/ 1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/ L)
								(mg/ L)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Waluh	a.Ds. Rembul Kec. Randudongkal	07/03/2017	28,2	251	12,5	7,67	-	251	12,5	10,6	2,3	< 5,4	-	1	-	0,05	0,06	-	292,5	286	10900	55300	<0,001	0,013
		b.Ds. Glandang Kec. Bantarbolang	07/03/2017	30,6	99,9	134	7,97	-	99,9	134	8,1	< 2	<5,4	-	1,4	-	0,22	0,12	-	574,2	143	3100	22500	< 0,001	0,047
		c. Ds. Lenggerong Kec. Bantarbolang	07/03/2017	32,1	118	26,5	7,53	-	118	26,5	10	< 2	<5,4	-	1,6	-	0,12	0,1	-	278,6	179	7000	34400	< 0,001	0,019
		d.Ds. Beji Kec. Taman	07/03/2017	32,4	128	24,3	7,45	-	128	24,3	6,5	0,6	< 5,4	-	1,6	-	0,23	0,11	-	481,4	38	1800	18000	< 0,001	0,038
		e. Ds. Asemdayong Kec. Taman	07/03/2017	33,3	187	37	7,02	-	187	37	7,6	< 2	7	-	1,4	-	0,85	0,15	-	900,9	284	15700	66900	< 0,001	0,031
		f. Ds. Beji Kec. Taman	07/03/2017	33,4	856	67,5	7,23	-	856	67,5	5,7	< 2	10	-	1,4	-	0,375	0,15	-	< 1400	140	13500	57400	< 0,001	0,03

Keterangan :

1. Mengacu pada PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
2. (-) : Parameter tidak dipersyaratkan
3. (-) : Parameter tidak dianalisa

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 18
KUALITAS AIR DANAU/WADUK/SITU/EMBUNG DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No	Nama	Waktu sampling (tg/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin (mg/L)	T-F (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal Coliform (jmlh/1000)	Total Coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NIHIL																								

Keterangan : Mengacu pada PerMen No. 28 Tahun 2009 Tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 19
KUALITAS AIR SUMUR DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tg/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluoride (mg/L)	Nitrit Sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin Bebas (mg/L)	Blereng Sebagai H2S (mg/L)	Fecal Coliform (jml/100ml)	Total Coliform (jml/100 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
NIHIL																																							

Keterangan : NIHIL : Data Tidak Tersedia (Tahun 2017 Tidak Dilakukan Uji Kualitas Air Sumur Karena Keterbatasan Peralatan)
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 20
KUALITAS AIR LAUT DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010

No	Nama Lokasi	Waktu sampling (tg/bln/thn)	Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (Oc)	pH	Salinitas (%)	DO (mg/l)	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Amonia total (mg/l)	NO2- N (mg/l)	NO3- N (mg/l)	PO4-P (mg/l)	Sianida (CN-) (mg/l)	Sulfida (H2S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Laut Mojo Pemalang	16 Juni 2010	Laut Mojo Pemalang	-	Tidak berbau	-	-	175	-	-	30,6	7,26	-	15	3	>1.500	-	19	-	21	-	-	0,14	-	-	-	-

Keterangan :
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang, 2010

TABEL - 21
CURAH HUJAN RATA-RATA BULANAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Badak Situmpeng	447	474	294	350	87	56,46	-	-	103	167	-	-
2	Kecamatan Moga	572	429	446	325	279	174	143	137	164	288	-	-

Keterangan :

Tanda (-) menunjukkan belum terjadi hujan pada periode pengukuran

Huruf (R) menunjukkan tidak ada pendataan dikarenakan keterbatasan alat ukur

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Pemalang

TABEL - 22
JUMLAH RUMAH TANGGA DAN SUMBER AIR MINUM DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Kecamatan	Ledeng	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Moga	-	314	-	-	-	-
2	Warungpring	-	6325	-	-	3.170	-
3	Pulosari	-	680	-	13.245	-	-
4	Belik	-	3498	-	1.757	17.647	-
5	Watukumpul	-	819	-	-	-	-
6	Bodeh	-	8911	-	-	304	-
7	Bantarbolang	-	10.851	-	-	1.696	-
8	Randudongkal	-	20.797	-	-	3.357	-
9	Pemalang	-	6.827	-	-	13.781	-
10	Taman	-	6.373	-	-	272	-
11	Petarukan	-	17.081	-	-	1.285	-
12	Ampelgading	-	6.422	-	-	80	-
13	Comal	-	45.189	-	-	3	-
14	Ulujami	-	13.690	-	-	1.115	-

Keterangan : Tanda (-) artinya nihil

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pemalang, Tahun 2017

TABEL - 23
JUMLAH RUMAH TANGGA DAN FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
1	2	3	4	5	6	7
1	Moga	18.147	11.851	897	0	5.399
2	Warungpring	14.070	11.587	1.850	0	633
3	Pulosari	16.982	13.877	3.105	0	0
4	Belik	25.034	17.080	702	0	7.252
5	Watukumpul	19.784	12.826	1.645	0	5.313
6	Bodeh	16.682	10.003	1.843	0	4.836
7	Bantarbolang	22.623	13.718	162	0	8.743
8	Randudongkal	25.120	18.491	778	0	5.851
9	Pemalang	47.449	26.434	5.085	0	15.930
10	Taman	42.664	22.727	827	0	19.110
11	Petarukan	44.135	26.710	569	0	16.856
12	Ampelgading	18.969	14.355	2.178	0	2.436
13	Comal	22.332	17.002	3.020	0	2.310
14	Ulujami	27.204	18.316	3.278	0	5.610

Keterangan : -

Sumber : STBM SMART – Dinas Kesehatan Kab. Pemalang

TABEL - 24
JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

No.	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah			SD			SLTP			SLTA			Diploma			S1			S2		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Moga	7.770	7.683	15.453	20.684	21.063	41.747	4.633	3.948	8.581	2.764	1.955	4.719	215	269	484	342	315	657	13	9	22
2.	Pulosari	7.820	7.369	15.189	17.265	17.127	34.392	2.911	2.780	5.691	1.288	851	2.139	147	143	290	178	138	316	5	3	8
3.	Belik	15.844	14.996	30.840	36.099	35.297	71.392	4.721	4.233	8.954	2.882	2.161	5.043	263	250	513	372	320	692	13	3	16
4.	Watukumpul	10.212	9.750	19.962	24.832	23.695	48.527	4.033	3.562	7.595	1.518	1.091	2.609	210	200	410	266	216	482	4	6	10
5.	Bodeh	5.934	5.864	11.798	17.730	17.458	35.188	4.752	4.481	9.233	2.597	1.822	4.419	198	234	432	307	330	637	16	4	20
6.	Bantarbolang	10.696	10.468	21.164	23.467	23.995	47.462	6.523	5.586	12.109	3.510	2.443	5.953	256	267	523	415	364	779	13	10	23
7.	Randudongkal	13.643	13.113	26.756	26.982	27.360	54.342	7.914	7.125	15.039	5.797	4.511	10.308	504	578	1.082	844	773	1.617	26	15	41
8.	Pemalang	27.104	26.242	53.346	41.497	42.413	83.910	13.486	12.539	26.025	14.849	12.414	27.263	1.243	1.494	2.737	2.647	2.433	5.080	187	70	257
9.	Taman	23.352	23.305	46.657	43.195	43.805	87.000	13.957	13.037	26.994	12.842	9.481	22.323	927	1.116	2.043	1.822	1.750	3.572	102	56	158
10.	Petarukan	20.578	20.578	40.873	37.966	39.071	77.037	13.086	12.032	25.118	9.979	7.052	17.031	760	849	1.609	1.343	1.161	2.504	50	18	68
11.	Ampelgading	8.892	8.943	17.835	17.155	17.932	35.087	6.623	6.178	12.801	4.991	3.620	8.611	313	354	667	599	594	1.193	17	9	26
12.	Comal	9.148	8.866	18.014	20.812	21.548	42.360	8.984	8.368	17.352	7.668	6.114	13.782	526	618	1.144	1.001	995	1.996	46	25	71
13.	Ulujami	14.486	13.992	28.478	31.408	30.098	61.506	8.061	7.925	15.986	5.650	4.450	10.100	357	497	854	820	786	1.606	35	17	52
14.	Warungpring	6.002	5.751	11.753	11.613	11.571	23.184	3.005	2.628	5.633	1.749	1.276	3.025	119	131	250	223	188	411	10	4	14
	Jumlah	181.481	176.637	358.118	370.705	372.433	743.138	102.689	94.422	197.111	78.084	137.325	137.325	6.038	7.000	13.038	11.179	10.363	21.542	537	249	786

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pemalang, 2017

TABEL - 25
JENIS PENYAKIT UTAMA YANG DIDERITA PENDUDUK DI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2017

No. 1	Jenis Penyakit 2	Jumlah Penderita 3
1.	Ca Servik	27
2.	Ca Mamae	109
3.	Ca Hepar	-
4.	Ca Paru	-
5.	Diabetes Militus	5.753
6.	Angina Pectoris	-
7.	Acute Miokard Infark	104
8.	Dekomp Kordis	570
9.	Hipertensi Essensial	16.839
10.	Hipertensi Lainnya	-
11.	Stroke Hemoragik	281
12.	Stroke Non Hemoragik	-
13.	Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)	1.057
14.	Asma Bronkial	2.386
15.	Psikosis	-

Keterangan : Tanda (-) artinya belum dilakukan pendataan atau data yang terkait belum tersedia

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pemalang, 2017

TABEL - 26
JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No 1	Kabupaten/Kota 2	Jumlah Rumah Tangga 3	Jumlah Rumah 4
1	Moga	18.055	7.321
2	Warungpring	12.388	7.678
3	Pulosari	18.512	4.441
4	Belik	28.713	5.786
5	Watukumpul	20.466	12.129
6	Bodeh	17.945	8.112
7	Bantarbolang	22.600	5.397
8	Randudongkal	30.760	7.147
9	Pemalang	53.088	8.601
10	Taman	49.927	12.556
11	Petarukan	45.531	14.857
12	Ampelgading	22.512	14.062
13	Comal	24.308	5.128
14	Ulujami	31.600	6.630

Keterangan :

Sumber :

1. Badan Pusat Statistik Kab. Pemalang (Pemalang Dalam Angka 2017)

2. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pemalang

TABEL - 27
VOLUME LIMBAH PADAT DAN CAIR BERDASARKAN SUMBER PENCEMARAN
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

No.	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m3/hari)	Volume Limbah Cair (m3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m3/hari)
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Bergerak :						
	NIHIL						
	b. Tidak Bergerak						
	1. Tempat Wisata	1. Taman Pesiar Widuri	17,6	0,161	-	-	-
		2. Pantai Blendung	2	0,017	-	-	-
		3. Telaga Silating	2	0,005	-	-	-
		4. Pantai Joko Tingkir	1	-	-	-	-
		5. Kolam Renang Widuri	6,5	0,00002	-	-	-
		6. Ventura river		0,005	-	-	-
		7. Widuri Water Park		0,107	-	-	-
	2. Hotel	1. Hotel Regina	-	-	-	-	-
		2. The Winner Premier	-	-	-	-	-
		3. The Winner Hotel	-	-	-	-	-
		4. Hotel Dewi Sri	-	-	-	-	-
		5. Hotel Pemalang	-	-	-	-	-
		6. Hotel Moga Indah	-	-	-	-	-
		7. Hotel Benda Asri	-	-	-	-	-
		8. Hotel Mutiara	-	-	-	-	-
		9. Hotel Raja Wali	-	-	-	-	-
		10. Hotel Segoro	-	-	-	-	-
		11. Hotel Murni	-	-	-	-	-
		12. Hotel Luas Indah II	-	-	-	-	-
		13. Hotel Panorama	-	-	-	-	-
		14. Hotel Dina	-	-	-	-	-
		15. Hotel Kencana	-	-	-	-	-
		16. Hotel Jambe Kembar	-	-	-	-	-
		17. Hotel Srea Bravo Indian/SBI	-	-	-	-	-
		18. Hotel Rahmat Niaga Box	-	-	-	-	-
		19. Hotel Sari argo	-	-	-	-	-
		20. Hotel Sri IPTEK	-	-	-	-	-
		21. Hotel Sentana Mulia	-	-	-	-	-
		22. Hotel Gajah Murni	-	-	-	-	-
		23. Wisma Klasik	-	-	-	-	-
	3. Rumah Sakit	1. RSUD dr. M. Ashari	4,917	±2,8	±150	±0,5	±0,01
		2. RSUD Prima Medika	0,6385	±0,040	±0,080	±0,057	±0,001
		3. RSUD Siaga Medika	-	±3	±55	±0,8	±65
		4. RSUD Santa Maria	1,29	±110	±80	±7,45	±80
		5. RSI Al-Ikhlas	-	±0,04	±0,07	±0,012	±0,038
		6. RSIA Siti Aminah	-	-	-	-	-
		7. RS Muhammadiyah	0,3255	-	-	-	-

No.	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m3/hari)	Volume Limbah Cair (m3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m3/hari)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mardhatillah					
		8. RS Muhammadiyah Rodliyah Achid	0,3397	-	1	-	0,25
		9. RS Harapan Sehat	-	-	-	-	-

Keterangan : Tanda (-) menunjukkan belum ada pendataan

Sumber :

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pemalang
2. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
3. RSUD dr. M. Ashari Pemalang
4. RSU Siaga Medika Pemalang
5. RSU Santa Maria Pemalang
6. RSI Al-Ikhlas Pemalang

TABEL - 28
SUHU UDARA RATA-RATA BULANAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Stasiun Meteorologi Pengamatan Khusus (SMPK) Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Pemalang di Desa Kebonsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang	28,27	28,25	28,58	27,74	28,63	27,74	27,74	27,94	28,35	28,72	28,92	

Keterangan : tanda (-) artinya data yang terkait belum tersedia atau belum dilakukan pendataan

TABEL - 29
KUALITAS AIR HUJAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

Waktu Pemantauan	pH	DHL	SO4	NO3	Cr	NH4	Na	Ca ²⁺	Mg ²⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jan									
Feb									
Mar									
Apr									
Mei									
Jun									
Jul									
Ags									
Sep									
Okt									
Nop									
Des									

Keterangan : NIHIL : Data Tidak Tersedia

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 30
KUALITAS UDARA AMBIEN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

Lokasi	Lama Pengukuran	SO ₂ (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)	O ₃ (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)	PM ₁₀ (µg/Nm ³)	PM _{2,5} (µg/Nm ³)	TSP (µg/Nm ³)	Pb (µg/Nm ³)	Dustfall (µg/Nm ³)	Total Fluorides Sebagai F (µg/Nm ³)	Fluor Index (µg/Nm ³)	Klorine dan Klorine Dioksida (µg/Nm ³)	Sulphat Index (µg/Nm ³)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Depan PT. Daiwabo Garment Indonesia	1 jam	< 28,1	< 25,8	18,5	-	-	-	-	-	-	273,3	-	-	-	-
Depan PT. Dewi Bintang Global	1 jam	< 28,1	28,6	< 13,0	-	-	-	-	-	-	174,1	-	-	-	-
Perumahan Taman Asri	1 jam	< 27,8	26,7	< 12,8	-	-	-	-	-	-	80,3	-	-	-	-
Perempatan Terminal	1 jam	< 26,8	5,7	29,4	-	-	-	-	-	-	216,1	-	-	-	-
Perumahan Bojongbata	1 jam	< 28,5	42,0	< 13,1	-	-	-	-	-	-	69,5	-	-	-	-
Perempatan Sirandu	1 jam	< 28,5	11,5	17,5	-	-	-	-	-	-	665,9	-	-	-	-
Depan Gedung Olahraga Kridanggo	1 jam	< 25,1	77,3	< 13,0	-	-	-	-	-	-	110,1	-	-	-	-
Depan Pasar Pagi	1 jam	< 28,3	41,2	< 13,0	-	-	-	-	-	-	211,2	-	-	-	-

Keterangan : Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukannya pengujian terhadap parameter tersebut

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 31
PENGUNAAN BAHAN BAKAR DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Industri :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Kimia dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Mesin dan logam dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Industri Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Aneka Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Rumah Tangga :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Kendaraan :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Mobil Beban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penumpang pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penumpang umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bus besar pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bus besar umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bus kecil pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bus kecil umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Truk besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Truk kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Roda tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Roda dua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Tanda (-) menunjukkan data tidak tersedia

Sumber : Diskoperindag Kab. Pemalang

TABEL - 32
PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
1.	Mobil Beban	-	-	-
2.	Penumpang pribadi	-	-	-
3.	Penumpang umum	2	2	2
4.	Truk umum	855	1.248	1.100
5.	Truk pribadi	1.708	1.180	1.324
6.	Sumbu tiga barang pribadi	3	3	3
7.	Sumbu tiga tangki pribadi	-	1	1
8.	Tangki umum	16	7	7
9.	Tangki pribadi	24	32	-
10.	Pick up umum	238	170	126
11.	Pick up pribadi	5.678	6.227	6.781
12.	Bestel umum	26	31	25
13.	Bestel pribadi	336	374	344
14.	Kendaraan khusus umum	-	-	-
15.	Kendaraan khusus pribadi	8	8	6
16.	Kereta gandengan umum	187	4	134
17.	Kereta gandengan pribadi	12	-	-
18.	Kereta tempelan umum	31	38	30

Keterangan :

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pemalang

Diisi dari tabel Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji di Kabupaten Pemalang

TABEL - 33
TABEL PERUBAHAN PENAMBAHAN RUAS JALAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No	Jenis Jalan	Panjang Jalan (km)			
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4	5	6
1.	Jalan Tol	-	-	-	37,35
2.	Jalan Kelas I	34,329	34,329	34,329	34,329
3.	Jalan Kelas II	-	-	-	-
4.	Jalan Kelas IIIA	104,19	104,19	104,19	104,19
5.	Jalan Kelas IIIB	672,72	672,72	672,72	672,72
6.	Jalan Kelas IIIC	-	-	-	-

Keterangan :

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Pemalang, 2017 dan

TABEL - 34
DOKUMEN IZIN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
1	2	3	4
1	UKL-UPL Pertambangan Batuan (Sirtu)	Pertambangan	Tegar Prasetyadhi
2	UKL-UPL Pertambangan Batuan (Sirtu)	Pertambangan	Drs. H. Ruba'i
3	UKL-UPL Pertambangan Batuan Tanah Urug	Pertambangan	Hamidah Tri Irianti
4	UKL-UPL Pertambangan Batuan Andhesit	Pertambangan	Sapari
5	UKL-UPL Pertambangan Batuan Diorit	Pertambangan	Yusuf Adianto
6	UKL-UPL Pertambangan Batuan Tanah Urug	Pertambangan	Asrofi Ismail
7	UKL-UPL Pertambangan Batuan Tanah Urug	Pertambangan	Eka Risti Pratiwi
8	UKL-UPL Pertambangan Batuan Tanah Urug	Pertambangan	Yunianto
9	UKL- UPL Pertambangan Batuan Tanah Urug	Pertambangan	Oliver Sih Riswandari
10	UKL-UPL Pertambangan Batuan Tanah Urug	Pertambangan	Slamet Ikhwanto
11	UKL-UPL Pertambangan Batuan Tanah Urug	Pertambangan	Tunggal Suro Budho
12	UKL-UPL Pembangunan Perumahan Grand Widuri Estate	Pembangunan Perumahan	Dewanto Ari Kuncoro
13	UKL-UPL Pertambangan Batuan Diorit	Pertambangan	PT. Asa Sukses Amanah
14	UKL-UPL Pembangunan Perumahan Sapphire Boutique	Pembangunan Perumahan	PT. Mitra Sapphire Boutique
15	UKL-UPL Pertambang		

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 35
PERUSAHAAN YANG MENDAPAT IZIN MENGELOLA LIMBAH B3
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
1	2	3	4	5
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan : NIHIL : Belum ada industri di Kabupaten Pemalang yang mengelola limbah B3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 36
PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN (AMDAL, UKL/UPL, SURAT PERNYATAAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL) DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
1	2	3	4
1	PT. PHILIPS	21/04/2015	Sudah Melaporkan UKL/UPL setiap 6 bulan sekali
2	Pabrik Delivat Gondorukem terptent	07/07/2015	Mempunyai data UKL/UPL No.660.1/097/KLH Diminta untuk merevisi data
3	PTPN (IX) Persero Devisi Tansemusin PG. Sumber Harjo	02/07/2015	Data lingkungan RKL & RPL thn 1994 Sudah melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan setiap 3 bln sekali
4	PT. Wana Lestari Indonesia		Akan melaporkan UKL / UPL tiap 6 bln sekali
5	PT. Jagoarta Indonesia	17/04/2015	Perusahaan belum mempunyai data lingkungan
6	RS. Ibu & anak SITI AMINAH	10/06/2015	Akan melaporkan UKL / UPL tiap 6 bln sekali
7	PT. Daiwabo Garment Indonesia		Tidak menghasilkan Limbah cair Tiap 6 bln melakukan uji kualitas air sumur ke DKK Kab. PKL
8	RS. Muhamadiyah Rodhliyah Achid Moga		RS Sudah memiliki dokumen UKL / UPL Sudah melakukan laporan tiap 6 bln sekali
9	Klinik An-Nur	10/06/2015	Sudah mempunyai data UKL / UPL

No. 1	Nama Perusahaan/Pemrakarsa 2	Waktu (tgl/bln/thn) 3	Hasil Pengawasan 4
			Di himbau untuk melaporkan tiap 6 bln sekali ke kantor LH
10	RSU. Siaga medika pml	20/04/2015	Di himbau untuk melaporkan tiap 6 bln sekali ke kantor LH Sudah mempunyai data UKL / UPL
11	Hotel Regina	30/04/2015	Belum melaporkan pelaporan UKL / UPL kantor LH 6 bln sekali Sudah memiliki DPLH
12	RSUD. Dr. M.Ashari Pml	01/07/2015	Telah melaporkan DPLH ke LH 6 bln sekali Belum melakukan penaikan kualitas Udara Ambien
13	PT. Candi Mekar	06/07/2015	Sudah memiliki data UKL / UPL Sedang melakukan revisi data UKL /UPL
14	Klinik pratama Muhamadiyah Madlatillah Rdkl	07/07/2015	Belum melakukan laporan UKL / UPL ke Bupati Melaporkan UKL / UPL tiap 3 bln sekali
15	PT. Dwi bintang Global	08/07/2015	Sudah Memiliki data UKL / UPL Telah melaporkan UKL / UPL tiap 6 bln sekali
16	RSU. Santa Maria	09/07/2015	Sudah memiliki data UKL / UPL Belum melaporkan UKL / UPL
17	Klinik Pratama Hj. Zaenab	03/07/2015	Sudah memiliki data UKL / UPL Sudah melaporkan UKL / UPL Ke Bupati
18	Rs. Prima Medika	10/07/2015	Sudah memiliki data UKL / UPL Belum melaporkan UKL / UPL secara periodik

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 37
BENCANA BANJIR, KORBAN, DAN KERUGIAN DI KABUPATEN PEMALANG

No 1	Kecamatan 2	Total Area Terendam (Ha) 3	Jenis Bencana (Intensitas Kejadian) 4	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp) 7
				Mengungsi 5	Meninggal 6	
1	Moga	-	2	-	-	-
2	Warungpring	-	2	-	-	-
3	Pulosari	-	2	-	-	-
4	Belik	-	0	-	-	-
5	Watukumpul	-	15	-	-	-
6	Bodeh	-	3	-	-	-
7	Bantarbolang	-	2	-	-	-
8	Randudongkal	-	0	-	-	-
9	Pemalang	-	0	-	-	-
10	Taman	-	0	-	-	-
11	Petarukan	-	0	-	-	-
12	Ampelgading	-	0	-	-	-
13	Comal	-	0	-	-	-
14	Ulujami	-	0	-	-	-

Keterangan : Tanda (-) artinya data yang terkait belum tersedia atau belum ada pendataan

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Pemalang

TABEL - 38
BENCANA KEKERINGAN, LUAS, DAN KEKERINGAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No 1	Kecamatan 2	Total Area (Ha) 3	Perkiraan Kerugian (Rp) 4
1.	Bodeh	542,50	-
2.	Pulosari	3568,36	-
3.	Belik	136,43	-

Keterangan : Tanda (-) menunjukkan tidak ada korban bencana

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pemalang

TABEL - 39
BENCANA KEBAKARAN HUTAN/LAHAN, LUAS DAN KERUGIAN
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No	Kecamatan	Perkiraan Luas Hutan/Lahan Terbakar (Ha)	Jenis Bencana (Intensitas Kejadian)	Perkiraan Kerugian (Rp)
1	2	3	4	5
1	Moga	-	2	-
2	Warungpring	-	1	-
3	Pulosari	-	2	-
4	Belik	-	1	-
5	Watukumpul	-	3	-
6	Bodeh	-	2	-
7	Bantarbolang	-	3	-
8	Randudongkal	-	3	-
9	Pemalang	-	26	-
10	Taman	-	7	-
11	Petarukan	-	3	-
12	Ampelgading	-	2	-
13	Comal	-	7	-
14	Ulujami	-	2	-

Keterangan : Tanda (-) artinya data yang terkait belum tersedia atau belum ada pendataan

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pemalang

TABEL - 40
BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DAN GEMPA BUMI, KORBAN, KERUGIAN
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No	Kecamatan	Jenis Bencana (Tanah Longsor)	Jumlah Korban Meninggal (Jiwa)	Perkiraan Kerugian (Rp)
1	2	3	4	5
1	Moga	3	-	-
2	Warungpring	2	-	-
3	Pulosari	2	-	-
4	Belik	0	-	-
5	Watukumpul	15	-	-
6	Bodeh	3	-	-
7	Bantarbolang	2	-	-
8	Randudongkal	0	-	-
9	Pemalang	0	-	-
10	Taman	0	-	-
11	Petarukan	0	-	-
12	Ampelgading	0	-	-
13	Comal	0	-	-
14	Ulujami	0	-	-

Keterangan : Tanda (-) artinya data yang terkait belum tersedia atau belum ada pendataan

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pemalang

TABEL - 41
LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN KEPADATAN
PENDUDUK KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	2	3	4	5	6
1	Moga	41,41	63.476	0,28	1.533
2	Warungpring	26,31	38.846	0,36	1.476
3	Pulosari	87,52	55.855	0,34	638
4	Belik	124,54	104.453	0,31	839
5	Watukumpul	129,02	64.772	0,30	502
6	Bodeh	85,98	54.503	0,34	634
7	Bantarbolang	139,19	71.855	0,40	516
8	Randudongkal	90,32	97.431	0,40	1.079
9	Pemalang	101,93	177.602	0,27	1.742
10	Taman	67,41	161.742	0,27	2.399
11	Petarukan	81,29	146.761	0,32	1.805
12	Ampelgading	53,3	66.468	0,30	1.247
13	Comal	26,54	88.803	0,28	3.346
14	Ulujami	60,55	100.006	0,29	1.652
	Jumlah	1.115,31	1.292.573	4,46	1.159

Keterangan :

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pemalang, 2017

TABEL - 42
PERKIRAAN JUMLAH TIMBULAN SAMPAH PER HARI
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (kg/hari)
1	2	3	4
1	Moga	63.476	19.042,8
2	Warungpring	38.846	11.653,8
3	Pulosari	55.855	16.756,5
4	Belik	104.453	31.335,9
5	Watukumpul	64.772	19.431,6
6	Bodeh	54.503	16.350,9
7	Bantarbolang	71.855	21.556,5
8	Randudongkal	97.431	29.229,3
9	Pemalang	177.602	53.280,6
10	Taman	161.742	48.522,6
11	Petarukan	146.761	44.028,3
12	Ampelgading	66.468	19.940,4
13	Comal	88.803	26.640,9
14	Ulujami	100.006	30.001,8

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 43
KEGIATAN FISIK LAINNYA OLEH INSTANSI DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1	2	3	4
1	TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)	- Kelurahan Pelutan - Desa Taman - Kantor Unit Kebersihan dan Pertamanan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 44
STATUS PENGADUAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
1	2	3	4
1	Kepala Desa Pegongsoran	Penambangan pasir di Sungai Waluh	Sudah selesai
2	Masyarakat Desa Wisnu	Rencana penambangan PT ASA Sukses Amanah	Sudah selesai
3	Masyarakat Desa Sumur Kidang	Pertambangan	Sudah selesai
4	Masyarakat Desa Tegalsari Timur	Pertambangan Sungai Comal	Sudah selesai
5	Masyarakat Desa Pegiringan	Pertambangan	Sudah selesai
6	Masyarakat Desa Surajaya	Pertambangan	Sudah selesai

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 45
**JUMLAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017**

No	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
1	2	3	4
1	Sahabat Alam	-	Desa Pesantren, Kec. Ulujami
2	Banowati Cinta Lingkungan	-	Desa Majalangu, Kec. Watukumpul

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 46
PENERIMA PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Nama Orang/Kelompok/ Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Isa Ansori	Peringkat II (Kategori Perintis Lingkungan Hidup)	Gubernur Jawa Tengah	2015
2	Kelurahan Mulyoharjo	Peringkat III (LBS Tingkat Jawa Tengah)	Gubernur Jawa Tengah	2014

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 47
**KEGIATAN / PROGRAM YANG DIINISIASI MASYARAKAT
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017**

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
1	2	3	4	5
1	Pelatihan Pengelolaan Sampah Anorganik/Organik	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang	Pemuda, PKK, Organisasi Masyarakat, Kelompok Masyarakat (7 Desa)	Mei - September 2017
2	Gerakan Sapu Bersih Sampah (Saber Sampah)	Dinas Lingkungan Kab. Pemalang	Pengunjung Car Free Day di Alun-alun Kota Pemalang	Maret 2017

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 48
PRODUK HUKUM BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
1	2	3	4
1	Peraturan Bupati Pemalang	35 Tahun 2014	Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
2	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang	15 Tahun 2012	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
3	Surat Keputusan Bupati Pemalang	522 Tahun 2010	Pemetaan Kawasan Hutan Kota Sekitar Terminal Induk Kota Pemalang, Obyek Wisata Widuri, Pelabuhan Sugihwaras, Blok Pajasaka Desa Danasari dan Blok Muara Desa Asemdayong
4	Peraturan Bupati Pemalang	3 Tahun 2010	Tata Cara Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang
5	Peraturan Bupati Pemalang	19 Tahun 2009	Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah
6	Surat Keputusan Bupati Pemalang	188.4/563/2017 16 Juni 2017	Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 188.4/660/Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Mangrove Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
7	Surat Keputusan Bupati Pemalang	188.4/564/2017 16 Juni 2017	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
8	Peraturan Bupati Pemalang	51 Tahun 2017 16 Oktober 2017	Sinergitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang, 2017

TABEL - 49
ANGGARAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	APBD	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	449.132.955	727.876.000
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	936.506.818	339.000.000
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.244.138.963	1.453.000.000
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	110.000.000	260.000.000
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	25.000.000	30.000.000
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	213.000.000
2.	APBN	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	295.454.545	750.000.000
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	431.818.182	100.000.000
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	952.382.537	1.577.534.000
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	200.000.000
3.	Bantuan Luar Negeri	-	-	-

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 50
JUMLAH PERSONIL LEMBAGA PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT
TINGKAT PENDIDIKAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Doktor (S3)	-	-	-
2.	Master (S2)	4	2	6
3.	Sarjana (S1)	6	8	14
4.	Diploma (D3/D4)	2	-	2
5.	SLTA	36	6	42
	Jumlah	48	16	64

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 51
JUMLAH STAF FUNGSIONAL BIDANG LINGKUNGAN DAN STAF YANG TELAH
MENGIKUTI DIKLAT DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
1	DLH	Pedal	1	1	1	1

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

TABEL - 52
PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS HARGA BERLAKU
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.822.369,43	4.382.174,13	4.753.475,69	5.224.887,57	5.490.139,23
B	Pertambangan dan Penggalian	595.463,25	652.452,12	718.638,53	778.731,48	866.762,19
C	Industri Pengolahan	2.620.151,88	2.855.930,13	3.419.321,40	3.897.004,85	4.274.499,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.133,86	15.149,89	17.513,62	19.879,83	24.754,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.085,81	11.940,53	13.179,93	13.914,59	14.428,73
F	Konstruksi	568.873,44	623.829,17	692.787,86	766.661,33	839.427,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.234.480,70	2.367.266,43	2.569.990,45	2.752.120,73	3.076.300,61
H	Transportasi dan Pergudangan	375.580,11	402.655,91	449.338,80	494.458,38	527.623,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	715.493,79	758.037,66	846.837,88	943.591,09	1.021.182,75
J	Informasi dan Komunikasi	266.758,49	287.940,07	315.391,46	344.067,09	367.924,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	407.502,67	444.980,75	495.394,34	559.016,65	620.814,29
L	Real Estate	227.450,85	244.983,88	272.109,94	300.034,65	326.327,85
M,N	Jasa Perusahaan Administrasi	42.067,66	48.278,12	54.896,14	61.570,77	68.014,71
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	519.286,88	560.902,19	586.449,45	637.274,13	671.048,98
P	Jasa Pendidikan	714.225,99	826.778,32	918.339,78	1.020.370,82	1.121.792,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135.728,71	152.051,07	170.457,17	188.962,54	206.705,42
R,S,T, U	Jasa lainnya	364.019,02	397.267,43	457.794,89	488.839,01	518.767,88
	PDRB	13.635.672,54	15.032.617,80	16.751.917,33	18.491.385,51	20.036.515,73

Keterangan :

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pemalang, 2017

TABEL - 53
PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS HARGA KONSTAN
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.455.924,36	3.680.933,28	3.612.139,81	3.763.228,26	3.850.771,69
B	Pertambangan dan Penggalian	571.189,49	600.719,99	638.084,77	656.263,08	715.206,26
C	Industri Pengolahan	2.316.429,16	2.472.070,49	2.810.141,65	3.015.527,05	3.185.813,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.157,73	15.944,00	18.036,82	19.579,23	22.419,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.177,20	11.791,94	12.642,14	12.935,89	13.283,69
F	Konstruksi	528.904,91	559.369,84	585.324,60	617.993,54	662.286,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.118.196,71	2.185.406,25	2.317.609,80	2.420.232,68	2.603.495,09
H	Transportasi dan Pergudangan	367.454,07	389.201,63	411.165,21	434.021,95	462.443,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	688.784,08	711.838,36	759.004,66	808.886,30	861.503,74
J	Informasi dan Komunikasi	267.669,68	293.660,40	333.187,09	363.177,09	383.543,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	357.963,28	371.375,48	393.784,29	427.009,97	463.368,47
L	Real Estate	220.559,27	235.733,75	251.857,94	269.812,96	286.551,82
M,N	Jasa Perusahaan	38.743,81	42.943,64	47.414,07	52.360,28	55.942,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	465.688,16	475.653,89	476.414,94	498.969,52	505.060,44
P	Jasa Pendidikan	586.997,98	633.468,34	697.828,72	757.180,33	807.635,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117.828,26	124.179,21	134.337,06	143.313,06	154.696,69
R,S,T, U	Jasa lainnya	348.567,08	367.773,13	399.695,84	413.205,02	429.778,74
	PDRB	12.477.235,23	13.172.063,62	13.898.669,41	14.673.696,21	15.463.800,58

Keterangan :

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pemalang 2017